



BERITA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT



BULAN JULI

TAHUN 2026

KLIPING KORAN



Jl. Khatib Sulaiman No.87 Padang Telp. (0751) 7057391 - 705753
Fax. (0751) 7059328 Padang 25133, Sumatera Barat

NO	JUDUL	HALAMAN	DPRD Sumbang Dorong Sinkronisasi Program Pembangunan Daerah dan Nasional
1.	Komisi IV Desak Perbaikan Pintu Air Di Talawi, DPRD Sumbang Ingatkan Ancaman Banjir dan Gangguan Irigasi	1	17. Fraksi PPP Ingatkan Pemprov, Opini WTP Harus Berdampak pada Kesejahteraan Rakyat
2.	Komisi IV DPRD Sumbang Desak Dinas SDA BK Segera Perbaiki Pintu Air Di Talawi	3	18. Yessi Endriani Perkuat Ketahanan Keluarga Lewat Sekolah
3.	Muzli M.Nur Kembali Pimpin Pasaman, PAN Bidik Lima Kursi DPRD di Pemilu 2029	5	19. Kelok 10 Rusak Parah, Nofrizon: Masyarakat Agama Minta Gubernur Lewat Tanpa Pengawalan
4.	Wakil Ketua DPRD Sumbang, Nanda Satria: Bentengi Generasi Muda dari Dampak Digital	6	20. Siapkan SDM Unggul, Muhidi Dorong Kepala Sekolah Perkuat kepemimpinan
5.	Komisi V DPRD Sumbang Sempurnakan Regulasi Penyelenggaraan Pendidikan 7 Bosda dan Beasiswa Disepakati Masuk Materi Ranperda	7	21. Komisi IV DPRD Sumbang Matangkan Ranperda Lingkungan Hidup
6.	DPRD Sumbang Ucapkan Hari Bayangkara ke 80	9	22. Ketua DPRD Sumbang Bekali UMKM Strategi Menembus Pasar Digital
7.	Pemulihan Bencana Masuk Prioritas APBD 2027	11	23. Komisi IV DPRD Sumbang Bedah Ranperda Lingkungan Bersama Akademisi dan Warga Sipil
8.	Gubernur Diminta Tinjau Ke Lapangan Kelok 44 Memprihatinkan	13	24. Evi Yandri Dukung Peningkatan Kapasitas Wasit INKADO
9.	Rancangan KUA-PPAS 2027 Disampaikan, DPRD Sumbang Dorong Selaras dengan RPJMD dan Kebutuhan Pasca Bencana	14	25. Dilepas Wakil Ketua DPRD Sumbang Wasit INKADO Ikuti Ujian Sertifikasi di Banglades
10.	DPRD Sumbang Mulai Bahas KUA-PPAS 2027	16	26. Wakil Ketua DPRD Sumbang Lepas Wasit INKADO Ikuti Sertifikasi AKF di Bangladesh
11.	Pemprov Sumbang Sampaikan KUA-PPAS 2027, DPRD Sumbang Dorong Sinkronisasi Pembangunan dan Pemulihan Daerah	17	27. Cegah Kenakalan Remaja Ketua DPRD Sumbang Minta Kepala sekolah Ajarkan Siswa Bikin Ajarkan Siswa Bikin Roadmap Masa Depan
12.	Perlu Sinkronisasi dalam Penyusunan KUA-PPAS 2027	19	28. Evi Yandri Lepas Wasit INKADO Sumbang Menuju Ujian Sertifikasi AKF
13.	Akselerasi Transformasi Ekonomi Jadi Prioritas	21	29. Penyusunan Ranperda Lingkungan Hidup Dimatangkan
14.	KUA PPAS Sumbang Tahun Anggaran 2027 Mulai Dibahas	22	30. Ketua DPRD Sumbang Dorong Kepala Sekolah Perkuat Kepemimpinan Visioner
15.	Sumbang Siapkan Anggaran Rp. 20 Miliar untuk Perbaiki Jalan Provinsi	24	31. Hadapi Tantangan Pendidikan Ketua DPRD Sumbang Dorong Kepala Sekolah Perkuat Kepemimpinan
16.	Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan KUA-PPAS Tahun 2027,	25	32. Ranperda Terganjal Di Kemendagri, KPID Sumbang Dorong Lahirnya Pergub Penyiaran Lokal
			33. Evi Yandri Gelar Festival Sipak Rago Se-Sumbang Kelima
			34. Target Konstruksi 2028 DPRD Sumbang Dorong Pembebasan Lahan Taplau Dipercepat.

35. Iqra Chisa Dorong Parcepatan Pembahasan Lahan Taplau	50	56. Pansus Aset Konsultasi ke Kemendagri
36. Festival Sipak Rago Pala Bergilir Evi Yandri Kembali Digelar	52	57. Fraksi NasDem Minta Pemprov Sumbang Serious Tindaklanjuti Temuan BPK
37. Wakil Ketua DPRD Sumbang Dorong Percepatan Penataan Kawasan Pantai Padang	54	58. Ketua DPRD Sumbang Dorong Guru Vokasi Cetak SDM Berdaya Saing Global
38. Ketua Fraksi Gerindra Salurkan Bantuan Rp 52 Juta untuk SMPIT Cahaya Madani	56	59. DPRD Sumbang Sahkan Ranperda 2025, Di Tengah Efisiensi dan Bencana, APBD Sumbang terserap 94,54 Persen
39. Cegah Kenakalan Remaja Ketua DPRD Sumbang Minta Sekolah Ajarkan Siswa Susun Roadmap Masa Depan	57	60. DPRD Sumbang Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025
40. Kejurnas Grastack Pasbar Berakhir, Evi Yandri Dorong Lahirnya Pembalap Berprestasi	59	61. SDA Tak Lagi Jamin Kemajuan Bangsa, Muhidi Dorong Guru Siapkan SDM Unggul
41. Sekretaris DPRD Sumbang Perkuat Budaya Kerja Disiplin	60	62. Peningkatan Kompetensi Guru Harus Jadi Perhatian Bersama
42. DPRD Sumbang Dukung Pasaman Barat Jadi Tuan Rumah Porprov 2026	61	63. Minta Pemprov Perkuat Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah
43. Tingkatkan Koordinasi dan Pelayanan Publik	63	64. Ketua DPRD Sumbang Dorong Kepsek Perkuat Kepemimpinan Visioner
44. Muhidi Tantang kepala Sekolah Bertransformasi	64	65. DPRD Sumbang Minta Pemprov Benahi Kelemahan Pengelolaan Keuangan
45. DPRD Sumbang Siapkan Rekomendasi Pembenahan Tata Kelola Aset Daerah	66	66. Kabag Persidangan Sekretariat DPRD Sumbang Ajak ASN Tingkatkan Kompetensi dan Integritas
46. Pansus Aset DPRD Sumbang Lakukan Konsultasi ke Kemendagri	68	67. Pengelolaan APBD 2025, DPRD Sumbang Beri Catatan Strategis
47. Kasus Bullying Disorot, Nanda Satria Desak Satgas Diperkuat	69	68. Tajamkan Renja, Bamus DPRD Tanah datar 'Berguru' ke DPRD Sumbang
48. DPRD Sumbang Desak Pengelolaan Stadion Utama Diserahkan ke Dispora	70	69. DPRD Kawal Perbaikan APBD Sumbang
49. Irsyad Syafar Ajak Semua Pihak Dukung Pembinaan Tenis Meja Sumbang	71	70. DPRD Beri Catatan Strategis untuk APBD
50. Komisi III DPRD Sumbang Dorong Pemprov Perkuat Inovasi	72	71. Ketua DPRD Sumbang Soroti Tawuran, Narkoba, hingga LGBT
51. Komisi II DPRD Sumbang Dorong Program Khusus Jaga Nilai Tukar Petani	74	72. Bundo Kanduang Padang Dukung Penerapan Perda Trantibumlinmas
52. Pansus Aset DPRD Sumbang Lakukan Konsultasi ke Kemendagri	76	73. DPRD Sumbang Gelar Paripurna Penyampaian Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026
53. Perkuat Disiplin dan Komitmen pelayanan Publik	79	74. Nurfirmanwansyah Sosialisasikan Perda Penyelenggaraan Pendidikan
54. Ketua DPRD Sumbang Ajak Guru Perketat Pencegahan Bullying di Sekolah	80	75. Antrean Pengisian BBM Masih Mengular' Kinerja Satgas Pengawasan Dipertanyakan
55. DPRD Sumbang Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Jadi Perda	81	76. Tindak Tegas Oknum Guru Berperilaku Menyimpang
		77. Nurfirmanwansyah Sosialisasikan Perda Provinsi No 2 Tahun 2029

78. Kejati Diminta Fokus Tindak Oknum Penanganan Korupsi KUR Jangan Sudutkan Bank Nagari	119
79. Ketua DPRD Sumbang Dorong UMKM Naik Kelas	121
80. Ketua DPRD Sumbang Dorong Penyesuaian Kebijakan APBD	122
81. Potensi PAD Ratusan Miliar DPRD Sumbang Desak Pemprov Serius Pungut PAP Perkebunan Sawit	124
82. Pungut Pajak Air Permukaan Secara Serius	125
83. Ketua DPRD Sumbang Dorong UMKM Kuasai Teknologi Digital	126
84. DPRD Desak Pemprov Sumbang Serius Pungut Pajak Air Permukaan	127
85. Ketua DPRD Sumbang Tegaskan Pentingnya Perda Trantibum	128
86. Wakil Ketua DPRD Sumbang Kecam Keras Orgen Tunggal dengan Biduan Erotis di Kuranji	130
87. Rafdinal Bekali Orang Tua Anak Cerebral Palsy Terapi Mandiri	131
88. Zulkenedi Said Kaji Difusi Kebijakan Penanganan Covid-19	132
89. Wakil Ketua DPRD Sumbang Evi Yandri Kecam Keras Orgen Tunggal dengan Artis Erotis di Kuranji	134
90. Zulkenedi Said Raih Gekar Doktor Bidang Sospo	135



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	RABU, 1 JULI 2026	12

Komisi IV Desak Perbaiki Pintu Air Di Talawi, DPRD Sumbar Ingat Ancaman Banjir dan Gangguan Irigasi

KOMISI IV DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mendesak Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Sumbar segera memperbaiki kerusakan sistem hidrolik pintu air Daerah Irigasi (DI) Talawi. Kerusakan tersebut dinilai berpotensi memicu banjir saat debit air meningkat serta mengganggu pasokan air untuk lahan pertanian.

Permintaan itu disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Sumbar, Muzli M. Nur, usai melakukan peninjauan ke DI Batang Agam dan DI Talawi bersama jajaran Komisi IV, baru-baru ini.

Muzli mengatakan, kedua infrastruktur irigasi tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan daerah, sehingga perlu mendapat perhatian serius, baik dari sisi pemeliharaan maupun peningkatan fasilitas.

"Menjaga ketahanan pangan berarti juga menjaga infrastruktur irigasi sebagai urat nadi pertanian. Karena itu, DI Batang Agam dan DI Talawi membutuhkan perhatian serius serta perawatan berkala," ujarnya.

Ia menjelaskan, kondisi paling memprihatinkan ditemukan di DI Talawi. Berdasarkan informasi petugas lapangan, sistem hidrolik pintu air sudah lama tidak berfungsi, sehingga pengoperasian harus dilakukan secara manual.

Menurutnya, kondisi tersebut sangat berisiko saat terjadi peningkatan debit air akibat curah hujan tinggi. Pintu air seharusnya dapat dibuka dengan cepat untuk mengendalikan aliran dan mengurangi potensi banjir.

"Kerusakan ini tidak boleh dianggap sepele. Jika debit air meningkat, pintu air harus bisa dioperasikan dengan cepat. Jika tidak segera diperbaiki, kondisi ini berpotensi menyebabkan banjir yang dapat merendam per-

mukiman warga maupun lahan pertanian," tegasnya.

Selain mengancam keselamatan masyarakat, Muzli menilai kerusakan fasilitas irigasi juga dapat mengganggu distribusi air ke areal persawahan yang berdampak pada produktivitas pertanian.

Untuk itu, Komisi IV DPRD Sumbar akan mengagendakan rapat kerja bersama Dinas PSDA Sumbar dan perwakilan kelompok tani guna membahas temuan di lapangan serta mendorong percepatan penanganan.

"Kami akan memanggil Dinas PSDA dan kelompok tani untuk mengevaluasi kondisi di lapangan. Kami ingin memastikan ada solusi konkret, termasuk dukungan anggaran, agar perbaikan segera dilakukan demi keselamatan masyarakat dan keberlanjutan sektor pertanian di Sumatera Barat," tutupnya.

Turut hadir dalam peninjauan tersebut Anggota Komisi IV DPRD Sumbar, Nurkhalis Dt Bijo Dirajo dan Bakri Bakar, bersama jajaran Dinas PSDA Sumbar.

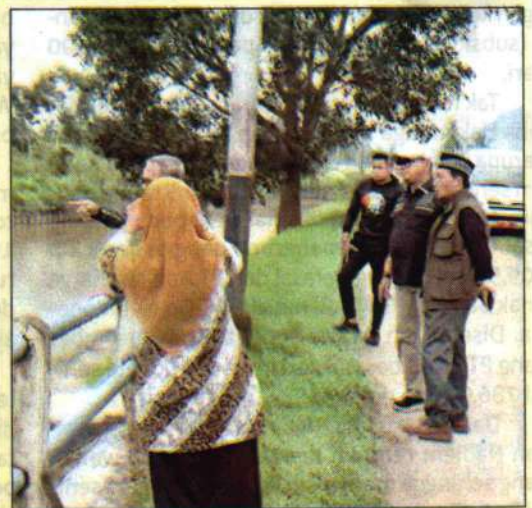
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Sumbar, Nurkhalis Dt Bijo Dirajo, menegaskan bahwa infrastruktur irigasi merupakan salah satu penopang utama sektor pertanian yang harus mendapat perhatian berkelanjutan dari pemerintah daerah.

"Irigasi yang berfungsi dengan baik akan memberikan kepastian pasokan air bagi petani. Karena itu, kami berharap seluruh kerusakan yang ditemukan dapat segera ditindaklanjuti agar tidak mengganggu aktivitas pertanian maupun mengancam keselamatan masyarakat saat musim hujan," ujarnya.

Ia menambahkan, Komisi IV DPRD Sumbar akan terus mengawal perbaikan infrastruktur sumber daya air melalui fungsi pengawasan dan penganggaran agar pelayanan kepada masyarakat, khususnya petani, semakin optimal. (*)



KLIPING BERITA



ANGGOTA Komisi IV DPRD Sumbar meninjau langsung komponen pintu air yang tidak lagi berfungsi optimal di Daerah Irigasi (DI) Talawi. Komisi IV mendesak Dinas PSDA Sumbar segera melakukan perbaikan menyeluruh guna mengantisipasi ancaman banjir bandang dan menjamin pasokan air pertanian warga.





KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan Martak Lahan Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat	RABU, 1 JULI 2026	<i>9</i>

Komisi IV DPRD Sumbar Desak Dinas SDABK Segera Perbaiki Pintu Air DI Talawi

Desakan itu disampaikan Anggota DPRD Sumbar, Muzli M. Nur, usai melakukan peninjauan lapangan ke DI Batang Agam dan DI Talawi bersama jajaran Komisi IV, baru-baru ini.

Menurut Muzli, kedua daerah irigasi tersebut memiliki peran penting dalam menopang ketahanan pangan daerah sehingga memerlukan perhatian serius, baik melalui pemeliharaan rutin maupun peningkatan fasilitas pendukung.

"Menjaga ketahanan pangan berarti kita juga harus menjaga infrastruktur irigasi

sebagai urat nadi pertanian. Karena itu, DI Batang Agam dan DI Talawi membutuhkan perhatian serius serta perawatan yang dilakukan secara berkala," ujarnya.

Ia menjelaskan, kondisi paling memprihatinkan ditemukan di DI Talawi. Berdasarkan informasi dari petugas di lapangan, sistem hidrolik elektrik pintu air telah lama tidak berfungsi sehingga seluruh proses pengoperasian pintu air masih dilakukan secara manual.

Kondisi tersebut, kata Muzli, sangat berisiko ketika

terjadi peningkatan debit air akibat curah hujan tinggi. Seharusnya, pintu air dapat dibuka secara cepat untuk mengendalikan aliran air dan meminimalkan potensi banjir.

"Kerusakan ini tidak boleh dianggap sepele. Jika debit air meningkat, pintu air harus bisa dioperasikan dengan cepat. Apabila tidak segera diperbaiki, kondisi ini berpotensi menyebabkan banjir yang dapat merendam permukiman warga maupun lahan pertanian," tegasnya.

Selain mengancam keselamatan masyarakat, kerusakan fasilitas irigasi tersebut juga dinilai dapat mengganggu distribusi air ke areal persawahan yang pada akhirnya berdampak terhadap produktivitas pertanian.

Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, Komisi IV DPRD Sumbar akan mengadakan rapat kerja bersama Dinas PSDA Sumbar dan perwakilan kelompok tani.

Pertemuan itu bertujuan mengevaluasi kondisi di lapangan sekaligus mendorong percepatan penanganan.

"Kami akan memanggil Dinas PSDA dan kelompok tani untuk mengevaluasi kondisi yang kami temukan di

PADANG, HALUAN — Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat mendesak Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (SDABK) Sumbar segera memperbaiki kerusakan sistem hidrolik pintu air di Daerah Irigasi (DI) Talawi. Kerusakan tersebut dinilai berpotensi memicu banjir saat debit air meningkat sekaligus mengganggu pasokan air bagi lahan pertanian.

lapangan. Kami ingin memastikan ada solusi konkret, termasuk dukungan anggaran, agar perbaikan dapat segera dilakukan demi keselamatan masyarakat dan keberlanjutan sektor pertanian di Sumatera Barat," tukas Muzli.

Sementara itu Anggota Komisi IV DPRD Sumbar, Nurkhalis Dt. Bijo Dirajo, menyampaikan Komisi IV berkomitmen untuk terus mengawal pembangunan yang tepat sasaran demi Sumbar yang lebih maju dan makmur.

"Kunjungan Komisi IV ke lapangan merupakan bagian dari fungsi pengawasan yang ketat terhadap infrastruktur irigasi, guna memastikan aliran

air berjalan optimal dan berdampak langsung bagi produktivitas pertanian masyarakat.

Infrastruktur yang sehat adalah urat nadi kesejahteraan petani. Kami berkomitmen untuk terus mengawal pembangunan yang tepat sasaran," ucapnya. (*)



KLIPING BERITA



	HALAMAN





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Rabu, 1 Juli 2026 (16 Muharam 1448 H)	8

MUZLI M. NUR KEMBALI PIMPIN PAN PASAMAN

PAN Bidik Lima Kursi DPRD di Pemilu 2029

PASAMAN - Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muzli M. Nur, kembali dipercaya memimpin Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional Kabupaten Pasaman untuk periode 2024-2029.

Penetapan tersebut ditandai dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN Nomor PAN/A/Kpts/KU_SJ/476/V/2026.

Pelantikan kepengurusan baru DPD PAN Pasaman dijadwalkan Jumat (12/6) mendatang oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Kembalinya Muzli memimpin partai berlambang matahari terbit itu sekaligus menjadi awal konsolidasi internal dalam menghadapi agenda politik ke depan, termasuk Pemilu Legislatif 2029.

Muzli menegaskan, kepengurusan yang baru akan fokus memperkuat struktur partai hingga tingkat akar rumput serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap PAN.

"Kami siap bekerja keras dan merapatkan barisan. Target kami pada Pemilu 2029 adalah meningkatkan perolehan kursi PAN di DPRD Pasaman menjadi lima kursi. Saat ini PAN memiliki tiga kursi, dan kami optimistis target tersebut bisa dicapai melalui kerja kolektif seluruh kader," ujar Muzli saat diwawancarai, Selasa (9/6).

Menurutnya, pencapaian target tersebut tidak hanya bergantung pada kekuatan partai, tetapi juga kemampuan kader untuk hadir dan memberikan solusi atas berbagai persoalan masyarakat.

Ia menegaskan PAN Pasaman akan terus memperkuat komunikasi dengan masyarakat, memperjuangkan aspirasi publik, serta menghadirkan program-program yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.

Kembalinya Muzli memimpin PAN Pasaman juga tidak lepas dari pengalaman panjangnya di dunia politik dan organisasi. Sebelum terjun ke politik, ia berkarier sebagai General Manager di sebuah perusahaan swasta. Namun, semangat reformasi mendorongnya kembali ke kampung halaman untuk mengabdikan diri melalui jalur politik.

Pada Pemilu 1999, Muzli berhasil terpilih sebagai anggota DPRD dan sejak saat itu mampu mempertahankan kepercayaan masyarakat hingga enam periode berturut-turut. Pengalaman tersebut menjadikannya salah satu politisi senior yang cukup berpengaruh di wilayah Pasaman dan Pasaman Barat.

Di internal partai, rekam jejak Muzli juga terbilang panjang. Sebelum pemekaran Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat, ia pernah menjabat Ketua DPD PAN Pasaman sebanyak dua periode. Selain itu, ia juga dipercaya menduduki posisi Wakil Ketua DPW PAN Sumatera Barat selama empat periode. (401)



TERIMA MANDAT - Muzli M. Nur saat menerima mandat sebagai Ketua DPD PAN Pasaman. (ist)

**BREAKING
NEWS!**



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Rabu, 1 Juli 2026 (16 Muharam 1448 H)	8

WAKIL KETUA DPRD SUMBAR, NANDA SATRIA:

Bentengi Generasi Muda dari Dampak Digital

BUKITTINGGI - Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Nanda Satria, menyerukan pentingnya restrukturisasi peran perempuan Minangkabau dalam menghadapi era digital.

Ia menegaskan bahwa Bundo Kanduang adalah benteng pertahanan terakhir sekaligus garda terdepan dalam menyelamatkan moral generasi muda dari dampak negatif kemajuan teknologi.

Pernyataan tegas tersebut disampaikan saat menjadi narasumber utama dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Bundo Kanduang se-Sumatera Barat yang berlangsung di Bukittinggi, Minggu (7/6).

Nanda memaparkan bahwa tantangan mendidik anak dan kemenakan saat ini jauh lebih kompleks akibat derasnya arus informasi. Menurutnya, Bundo Kanduang tidak boleh lagi sekadar menjadi simbol pelestari tradisi, melainkan harus aktif mengambil peran strategis dalam lingkungan domestik dan sosial.

Kehadiran mereka sangat dibutuhkan untuk menyaring pengaruh luar dan memberikan pengawasan ketat terhadap tumbuh kembang anak.

Di hadapan ratusan peserta, politisi ini mengingatkan bahwa kemajuan hakiki suatu daerah tidak melulu diukur dari megahnya infrastruktur fisik atau laju pertumbuhan ekonomi.

Kunci utama masa depan Sumatera Barat justru terletak pada kualitas karakter sumber daya manusianya. Oleh karena itu, investasi terbaik yang harus dilakukan saat ini adalah memperkuat fondasi moral generasi penerus. (401)



BIMTEK - Nanda Satria saat menjadi narasumber utama dalam Bimtek Bundo Kanduang se-Sumatera Barat yang berlangsung di Bukittinggi, Minggu (7/6). (lst)





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Rabu, 1 Juli 2026 (16 Muharam 1448 H)	10

KOMISI V DPRD SUMBAR SEMPURNAKAN REGULASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bosda dan Beasiswa Disepakati Masuk

Materi Ranperda

Komisi V DPRD Sumatera Barat (Sumbar) terus mematangkan dan menyempurnakan muatan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Setelah melaksanakan konsultasi ke kementerian terkait dan melakukan studi banding ke sejumlah daerah yang memiliki regulasi serupa, sejumlah poin strategis disepakati untuk masuk dalam revisi Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan. Hal ini terungkap saat rapat kerja yang digelar Komisi V bersama OPD mitra, Senin (15/6).

Rapat kerja tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Lazuardi Erman, didampingi Sekretaris Pembahasan Ranperda, Zaksai Kasni. Hadir pula anggota Komisi V, yakni Endarmy, Yessi Endriani, dan Syofian Hendri.

Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Lazuardi Erman, mengatakan sejumlah poin yang telah disepakati untuk diakomodasi dalam Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan antara lain pengaturan mata pelajaran muatan lokal, pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu dan berprestasi, serta penganggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang bersumber dari APBD.

Menurutnya, BOSDA menjadi salah satu poin penting yang dikawal untuk diatur dalam perda karena dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat memiliki keterbatasan dan belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan operasional sekolah.

"Karena keterbatasan dana BOS dari pusat, banyak sekolah terpaksa mencari sumber pendanaan tambahan. Karena itu, kita ingin keberpihakan APBD benar-benar hadir membantu sekolah melalui BOSDA, baik untuk penambahan gaji guru maupun kebutuhan operasional sekolah," ujar

Lazuardi.

Ia menegaskan, BOSDA sejatinya merupakan bentuk keberpihakan pemerintah daerah terhadap sektor pendidikan yang perlu diwujudkan melalui penganggaran. "Karena itu, Komisi V berkomitmen mengawal agar pengaturan BOSDA dapat dimasukkan dalam regulasi yang sedang disusun," tegasnya.

Selain itu, Perda Penyelenggaraan Pendidikan yang tengah disusun juga akan mengatur mekanisme sumbangan komite sekolah agar tidak membebani orang tua siswa dan tidak menimbulkan polemik sebagaimana yang kerap terjadi selama ini.

Lazuardi menjelaskan, ketentuan umum mengenai sumbangan komite akan diatur

dalam perda, sementara pengaturan yang lebih rinci akan dituangkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub).

"Untuk sumbangan komite, kita masukkan sebagai salah satu materi yang diatur dalam perda agar bantuan yang diberikan kepada sekolah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Sebab, berdasarkan Permendikdasmen, komite sekolah dilarang melakukan pungutan biaya pendidikan kepada orang tua atau wali murid," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Pembahasan Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan, Zaksai Kasni, menambahkan bahwa selain mengawal pengaturan mengenai muatan lokal, BOSDA, beasiswa, dan sumbangan komite, Komisi V juga komitmen untuk memperjuangkan

agar jam mengajar guru pengampu mata pelajaran muatan lokal dapat diakui sebagai jam sertifikasi.

Menurutnya, persoalan tersebut muncul karena sebagian besar guru muatan lokal saat ini memiliki latar belakang pendidikan yang tidak linear dengan mata pelajaran yang diajarkan. Akibatnya, jam mengajar mereka belum dapat diperhitungkan sebagai pemenuhan beban kerja sertifikasi.

"Selama tiga tahun terakhir, muatan lokal yang diajarkan berkaitan dengan keminangkabauan. Sementara hingga saat ini belum tersedia lulusan pendidikan keminangkabauan karena program studi tersebut belum ada di perguruan tinggi di Sumbar. Karena





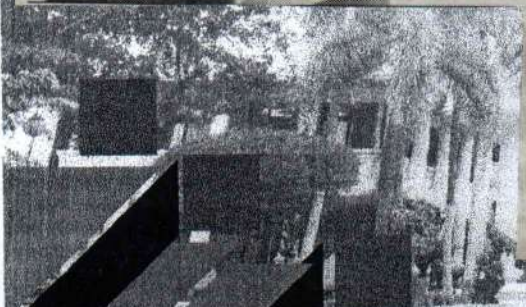
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

tidak linear, jam mengajar guru-guru tersebut juga belum dapat dihitung sebagai jam sertifikasi," ujarnya.

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, Komisi V berkomitmen mengawal persoalan tersebut ke pemerintah pusat agar dapat diakomodasi dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang tengah disusun.

"Kami akan mendorong agar jam mengajar guru muatan lokal dapat diakui sebagai jam sertifikasi melalui revisi UU Sisdiknas. Dengan demikian, pelaksanaan mata pelajaran muatan lokal dapat berjalan lebih optimal dan para guru juga terbantu dalam memenuhi beban jam sertifikasi mereka," pungkas Zaksai.(*)





SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Padang Ekspres	KAMIS 2 JULI 2026	8

 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sumatera Barat

Selamat
HARI BHAYANGKARA Ke-80

 **80** *Anda Mengabdikan*
POLRI
Untuk Masyarakat

"Semoga memperkuat kolaborasi
antara anggota Polri dan warga
dalam membangun lingkungan yang tertib
berlandaskan prinsip Polri untuk Masyarakat"

1 Juli 1946 - 1 Juli 2026



Ir. INSANUL KAMIL M.ENG.Ph.D
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat





SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Padang Ekspres	JUMAT 3 JULI 2026	9



**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sumatera Barat**

Selamat
HARI BHAYANGKARA Ke-80



80 Tahun Mengabdikan
POLRI
Untuk Masyarakat

"Semoga memperkuat kolaborasi
antara anggota Polri dan warga
dalam membangun lingkungan yang tertib
berlandaskan prinsip Polri untuk Masyarakat"

1 Juli 1946 - 1 Juli 2026



Drs. H. Muhidi, MM
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Padang Ekspres	SELASA 7 JULI 2026	7

PEMULIHAN BENCANA MASUK PRIORITAS APBD 2027

DPRD Provinsi Sumbar mulai membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027. Di balik agenda rutin penyusunan APBD itu, terselip tantangan besar: bagaimana menyusun anggaran di tengah keterbatasan fiskal, sementara kebutuhan penanganan pascabencana di Sumbar diperkirakan mencapai Rp 33 triliun.

Pembahasan diawali dalam rapat paripurna DPRD Sumbar, Senin (6/7), dipimpin Ketua DPRD Muhidi, didampingi Wakil Ketua Evi Yandri dan Nanda Satria. Hadir pula Gubernur Sumbar Mahyeldi, Sekretaris DPRD Maifrizon, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Darul Idris, jajaran OPD, serta unsur Forkopimda.

Muhidi menegaskan, penyusunan KUA-PPAS 2027 tidak hanya mengacu pada RPJMD Sumbar 2025-2029 dan RKPD 2027, tetapi juga diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027. Sinkronisasi itu dinilai menjadi langkah strategis agar program prioritas daerah mendapat dukungan pendanaan dari pemerintah pusat.

Menurutnya, kemampuan APBD Provinsi maupun APBD kabupaten/kota tidak cukup untuk membiayai seluruh kebutuhan pemulihan pascabencana yang nilainya mencapai puluhan triliun rupiah.

"Karena itu, penyesuaian arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dengan prioritas nasional menjadi langkah strategis

agar dukungan anggaran dari pemerintah pusat dapat dioptimalkan," kata Muhidi.

Isu kebencanaan memang masih menjadi pekerjaan rumah besar Sumbar. Dalam beberapa tahun terakhir, provinsi ini berulang kali dilanda banjir, longsor, hingga banjir bandang yang merusak infrastruktur, permukiman, lahan pertanian, dan fasilitas publik. Kondisi tersebut membuat kebutuhan belanja rehabilitasi dan rekonstruksi terus meningkat, sementara ruang fiskal daerah relatif terbatas.

Sementara Gubernur Mahyeldi menjelaskan, penyampaian rancangan KUA-PPAS merupakan amanat Pasal 89 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

Ia menyebut, dokumen KUA-PPAS 2027 menjadi penjabaran tahun kedua pelaksanaan RPJMD Sumbar 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Perda Nomor 4 Tahun 2025. Dokumen tersebut juga diselaraskan dengan RPJPD Sumbar 2025-2045 melalui Perda

Nomor 4 Tahun 2024, sekaligus mengakomodasi kebijakan nasional Asta Cita dan visi-misi kepala daerah.

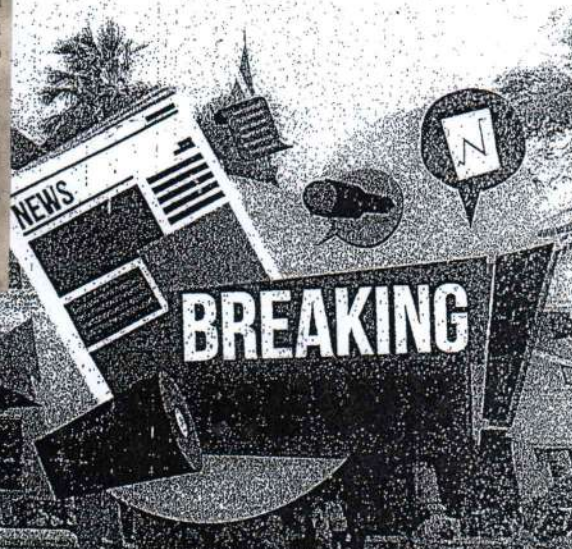
"Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 yang kami sampaikan hari ini merupakan penjabaran tahun kedua RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dan selaras dengan arah pembangunan jangka panjang daerah, sekaligus mengakomodasi kebijakan Asta Cita serta program dan kegiatan yang mendukung visi dan misi kepala daerah," ujar Mahyeldi.

Mahyeldi juga mengingatkan, sesuai ketentuan, kepala daerah wajib menyampaikan rancangan KUA-PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua Juli, kemudian dibahas dan disepakati bersama paling lambat minggu kedua Agustus.

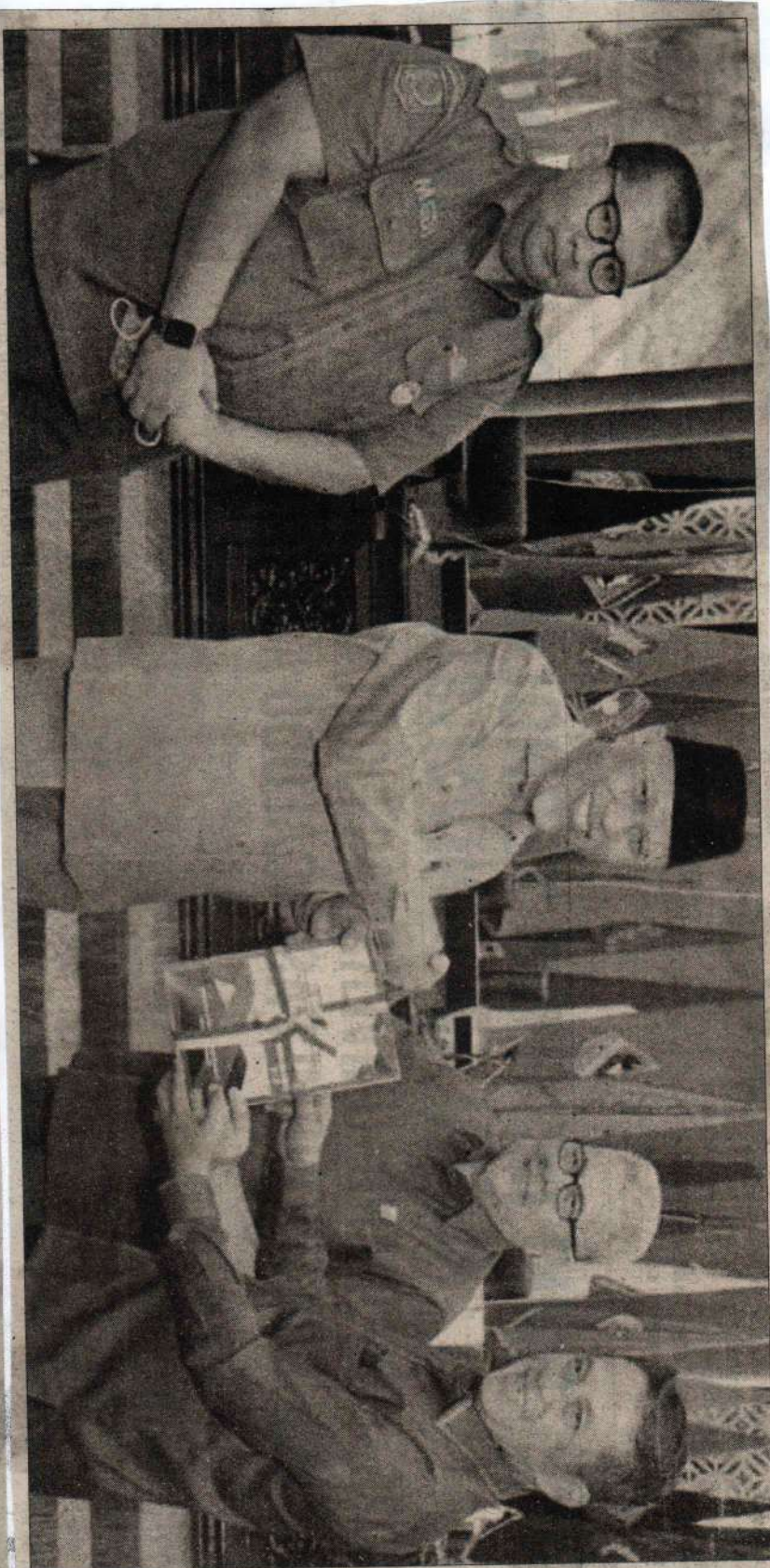
Kesepakatan atas dokumen KUA-PPAS menjadi tahapan penting karena akan menjadi fondasi penyusunan Rancangan APBD Sumbar 2027. Melalui dokumen inilah arah belanja daerah, prioritas pembangunan, hingga kemampuan pembiayaan berbagai pro-

gram strategis ditentukan.

Di tengah tekanan fiskal, pembahasan KUA-PPAS tahun depan diperkirakan tidak hanya berbicara soal besaran anggaran, tetapi juga kemampuan pemerintah daerah menyusun prioritas yang lebih adaptif terhadap risiko bencana sekaligus mampu menarik dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. Dengan kata lain, APBD 2027 akan menjadi ujian sejauh mana Sumbar mampu menyeimbangkan kebutuhan pembangunan, pemulihan pascabencana, dan keberlanjutan fiskal daerah. (*)



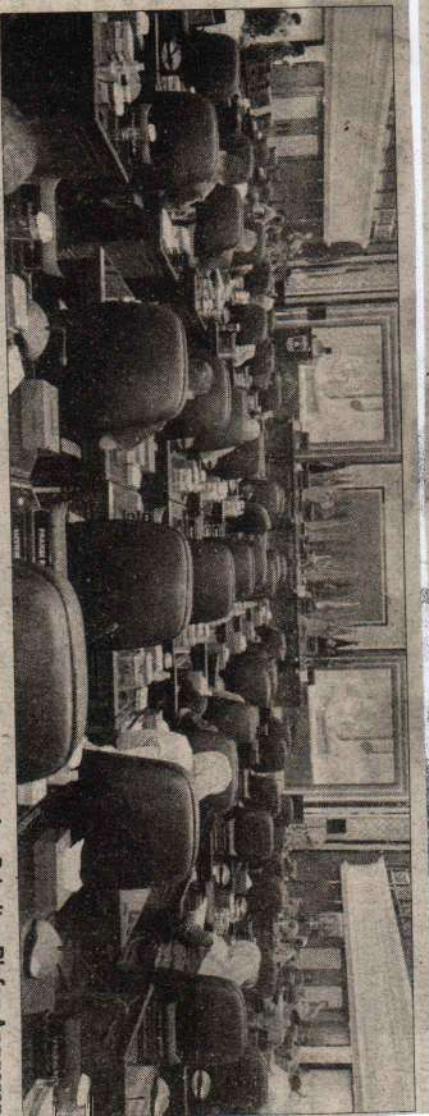
ING BERITA



KETUA DPRD Sumbang Muhibi menerima dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 yang diserahkan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah.



KETUA DPRD Sumbang Muhibi memimpin rapat paripurna membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.



SUASANA rapat paripurna membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Selasa, 7 Juli 2026 (22 Muharam 1448 H)	1

Jalur ini juga menjadi lintasan utama distribusi berbagai komoditas seperti jagung, padi, kelapa, ikan, serta hasil pertanian lainnya.

"Aktivitas lalu lintas di ruas ini jauh lebih padat dibandingkan dengan ruas Sicincin-Malalak. Oleh karena itu, perhatian pemerintah terhadap jalan ini harus menjadi prioritas utama," tegasnya.

Ia mengungkapkan, masyarakat berharap Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar dapat turun langsung meninjau lokasi tanpa pengawasan protokol agar dapat merasakan sendiri kondisi nyata yang dihadapi warga setiap hari.

"Masyarakat menyampaikan kepada kami, tolong undang Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur untuk melewati sendiri jalur Padang Luar menuju Lubuk Basung tanpa pengawasan, bersama keluarga. Rasakan bagaimana kondisi psikologis masyarakat yang setiap hari harus melintasi jalan tersebut," tutur Nofrizon.

Menurutnya, apabila akses Jalan Kelok 10 sampai terputus total, dampaknya akan sangat besar terhadap mobilitas masyarakat serta distribusi hasil pertanian dan kebutuhan pokok di wilayah Agam dan Pasaman Barat. Ia juga menilai penanganan yang dilakukan selama ini belum mampu menyelesaikan persoalan secara permanen karena kerusakan selalu berulang setiap musim hujan.

"Persoalan ini sudah tidak bisa lagi ditangani dengan penanganan biasa. Ibarat orang sakit, tidak cukup lagi diberi obat generik, tetapi sudah membutuhkan tindakan medis khusus. Jika akses ini putus, masyarakat terpaksa memutar jauh melalui Maninjau menuju Lubuk Basung," ucapnya.

Tindakan Darurat

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumbar, Armiz, mengatakan bahwa pemerintah provinsi telah melakukan tindakan darurat terhadap ruas Jalan Kelok 10 sejak dua hari terakhir. Hari ini (kemarin-Red), pihaknya juga menjadwalkan pemasangan kantong pasir (sand bag) sebagai langkah penanganan sementara guna mencegah kerusakan semakin meluas.

"Penanganan sementara sudah kami lakukan sejak dua hari lalu. Lalu dipasang sand bag untuk memperkuat bagian jalan yang terdampak longsoran," ujar Armiz.

Ia menambahkan, untuk penanganan permanen, pemerintah daerah masih menunggu ketersediaan anggaran melalui mekanisme Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) maupun sumber pendanaan lainnya. "Untuk penanganan permanen, kami masih menunggu ketersediaan anggaran melalui R3P dan usulan pendanaan lainnya," kata Armiz. (401)

Hal itu mengemuka saat Sekretaris Komisi III DPRD Sumbar, Nofrizon, menyampaikan informasi dalam Rapat Paripurna

DPRD, Senin (6/7), terkait kerusakan masyarakat seputar kondisi ruas jalan tersebut saat ini. Nofrizon menyatakan bahwa masyarakat memintanya untuk menyampaikan pesan kepada Gubernur Sumbar agar segera meninjau kondisi jalan tersebut. Katanya, kerusakan yang semakin



NOFRIZON
Sekretaris
Komisi III DPRD
Sumbar

parah dinilai kian mengancam keselamatan warga yang melintas.

"Masyarakat meminta saya menyampaikan langsung kepada Bapak Gubernur terkait kondisi Jalan Kelok 10, misalnya, yang saat ini sudah sangat parah dan nyaris ambruk," ujar Nofrizon yang berasal dari Dapil setempat.

Ia menilai, Pemprov Sumbar kurang maksimal dalam menangani kerusakan ruas Jalan Padang Luar-Simpang Manggopoh, khususnya di beberapa titik rawan seperti Kelok 8, Kelok 10, hingga Kelok 43. Namun, kondisi paling mengkhawatirkan saat ini berada di Kelok 10.

"Lebar badan jalan di Kelok 10 saat ini hanya tersisa sekitar dua meter. Pada musim hujan seperti sekarang, kondisinya sangat rawan. Kendaraan jenis tronton sudah tidak dapat melintas. Kendaraan yang masih bisa lewat hanya mobil berukuran kecil seperti L300 dengan kapasitas muatan yang terbatas," katanya.

Nofrizon menjelaskan bahwa ruas jalan Kelok 44, merupakan jalur logistik penting sekaligus urat nadi perekonomian daerah. Jalur tersebut menghubungkan Kota Padang dengan Kabupaten Agam, Tiku, Sungai Limau, Lubuk Basung, hingga Pasaman Barat.

Kelok 44 Memprihatinkan

GOVERNOR DIMINTA TINJAU KE LAPANGAN



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	SELASA, 7 JULI 2026	2

DPRD Sumbar Mulai Bahas KUA-PPAS 2027

PADANG, HALUAN – DPRD Provinsi Sumatera Barat resmi memulai pembahasan arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 melalui rapat paripurna penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Senin (6/7). Tahapan ini menjadi awal penyusunan APBD 2027 sekaligus penentu arah pembangunan daerah pada

tahun mendatang.

Rapat paripurna yang digelar di ruang sidang utama DPRD Sumbar dipimpin Ketua DPRD Sumbar Muhidi, didampingi Wakil Ketua DPRD Evi Yandri Rajo Budiman dan Nanda Satria. Hadir Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, Sekretaris DPRD Maifrizon, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Darul Idris, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), serta unsur Forum Koordinasi

Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatera Barat.

Dalam sambutannya, Muhidi menegaskan penyusunan KUA-PPAS 2027 merupakan langkah strategis untuk memastikan kebijakan pembangunan daerah tetap selaras dengan arah pembangunan nasional.

Menurutnya, dokumen tersebut disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Barat Tahun 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Kerangka Ekonomi Makro serta Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027.

Muhidi menilai sinkronisasi program pembangunan daerah dengan pemerintah pusat menjadi semakin penting di tengah keterbatasan kapasitas fiskal daerah. Kondisi tersebut juga diperberat oleh besarnya kebutuhan anggaran untuk penanganan dampak bencana di Sumatera Barat yang diperkirakan mencapai sekitar Rp33 triliun.

“APBD provinsi maupun

APBD kabupaten dan kota tentu tidak akan mampu membiayai seluruh kebutuhan tersebut tanpa dukungan pemerintah pusat. Karena itu, penyesuaian arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dengan prioritas nasional menjadi langkah strategis agar dukungan anggaran dari pemerintah pusat dapat dioptimalkan,” ujar Muhidi.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ia menjelaskan, KUA-PPAS 2027 merupakan penjabaran tahun kedua pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD 2025–2029. Dokumen tersebut juga disusun selaras dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Sumatera Barat Tahun 2025–2045 yang telah mengakomodasi kebijakan nasional Asta Cita serta mendukung visi dan misi kepala daerah.

“Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 yang kami sampaikan hari ini merupakan penjabaran tahun kedua RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029 dan selaras dengan arah pembangunan jangka panjang daerah, sekaligus mengakomodasi kebijakan Asta Cita serta program dan kegiatan yang mendukung visi dan misi kepala daerah,” kata Mahyeldi.

Mahyeldi menambahkan, sesuai ketentuan, kepala daerah wajib menyampaikan rancangan KUA dan PPAS kepada DPRD paling lambat pada minggu kedua Juli. Selanjutnya, dokumen tersebut akan dibahas bersama DPRD untuk

mencapai kesepakatan paling lambat pada minggu kedua Agustus sebelum menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.

Pembahasan KUA-PPAS 2027 menjadi momentum penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal, prioritas pembangunan, serta alokasi anggaran berbagai sektor strategis di Sumatera Barat. Melalui pembahasan tersebut, DPRD bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diharapkan mampu menghasilkan kebijakan anggaran yang efektif, adaptif terhadap tantangan pembangunan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, mulai dari percepatan pemulihan pascabencana, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi daerah, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat. (h/len)

BREAKING



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	SELASA, 7 JULI 2026	12

PEMROV SUMBAR SAMPAIKAN KUA-PPAS 2027

DPRD Sumbar Dorong Sinkronisasi Pembangunan dan Pemulihan Daerah

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD Sumbar dalam rapat paripurna, Senin (6/7).

Menanggapi penyampaian tersebut, DPRD Sumbar menegaskan agar arah kebijakan penyusunan program, kegiatan, dan anggaran 2027 selaras dengan target pembangunan dalam RPJMD Sumbar 2024-2029. DPRD juga meminta pemerintah daerah memperhatikan kebutuhan penanganan pascabencana hidrometeorologi yang melanda Sumbar pada akhir 2025.

Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, yang memimpin rapat paripurna, menyampaikan bahwa tahun 2027 merupakan tahun ketiga masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar periode 2024-2029 sekaligus tahun ketiga pelaksanaan RPJMD. Karena itu, pemerintah daerah harus mengarahkan kebijakan program, kegiatan, dan anggaran sesuai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

"Berkaitan dengan hal tersebut, arah kebijakan penyusunan program, kegiatan, dan anggaran Tahun 2027 harus disesuaikan dengan sasaran pokok dalam RPJMD Tahun 2027," ujar Muhidi.

Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak cukup hanya berpedoman pada RPJMD, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi pascabencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir 2025. Menurutnya, kebutuhan anggaran penanganan pascabencana sangat besar.

Pemulihan infrastruktur saja diperkirakan mencapai sekitar Rp33 triliun. Karena itu, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota harus menangani persoalan ini secara terpadu.

Muhidi juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara program pembangunan daerah dan nasional. Ia menyebut, penyusunan Rancangan KUA-PPAS 2027 tidak hanya mengacu pada RPJMD Sumbar 2024-2029 dan RKPD 2027, tetapi juga harus berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027.

Ia menambahkan, kapasitas fiskal Sumbar relatif terbatas, sementara kebutuhan anggaran pascabencana sangat besar. Kondisi ini membuat dukungan program dan anggaran dari pemerintah pusat menjadi kebutuhan yang tidak terhindarkan.

"APBD Provinsi Sumbar maupun APBD kabupaten dan kota tidak akan sanggup memenuhi kebutuhan anggaran penanganan pascabencana yang diperkirakan mencapai Rp33 triliun. Oleh

karena itu, sinkronisasi arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah harus selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dalam KEM-PPKF Tahun 2027," tegasnya.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Sumbar Muhidi bersama Wakil Ketua DPRD Evi Yandri dan Nanda Satria. Sekretaris DPRD Maifrizon, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Dahrul Idris, jajaran OPD, unsur Forkopimda, serta Gubernur Sumbar Mahyeldi juga hadir dalam rapat tersebut.

Dalam pemaparannya, Gubernur Mahyeldi menyatakan bahwa pemerintah daerah menyusun Rancangan KUA-PPAS 2027 di tengah keterbatasan kapasitas keuangan daerah yang belum sepenuhnya mampu mengakomodasi seluruh aspirasi masyarakat.

Meski demikian, pemerintah daerah tetap mengacu pada skala prioritas RKPD 2027 untuk memastikan setiap alokasi anggaran memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Pemerintah daerah akan membahas lebih lanjut Rancangan KUA dan PPAS ini bersama DPRD agar menghasilkan kesepakatan yang lebih akomodatif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kami berharap kesepakatan tersebut dapat dicapai sesuai batas waktu yang telah ditentukan," ujarnya. (*)

BREAKING



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Rakyat Sumbang SELASA, 7 JULI 2026		9

Perlu Sinkronisasi dalam Penyusunan KUA-PPAS 2027

DPRD Sumbang Gelar Paripurna Penyampaian KUA-PPAS

Padang, Rakyat Sumbang — Ketua DPRD Provinsi Sumbang Muhiidi mengatakan dalam penyusunan Rancangan KUA-PPAS Tahun 2027, tidak hanya berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024-2029 dan RKPD Tahun 2027.

"Tapi, juga perlu memperdoma-ni RKP dan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2027," kata Muhiidi, saat memimpin rapat paripurna Penyampaian Rancan-gan KUA-PPAS Tahun 2027, di ru-ang sidang utama, Senin, (6/7).

la melanjutkan, APBD Provin-si Sumatra Barat dan Kabupaten/ Kota tidak akan sanggup memenuhi kebutuhan anggaran penan-ganan darurat bencana yang di-perkirakan mencapai Rp33 triliun, maka sangat membutuhkan du-lingan program dan anggaran dari Pemerintah Pusat.

"Oleh sebab itu, sinkronisasi arah kebijakan, program dan kegia-tan pembangunan daerah, mutlak harus dilakukan dengan arah kebi-jakan pembangunan nasional yang terdapat dalam KEM-PPKF Tahun 2027," ucap Muhiidi.

Menurut Muhiidi, pangantar Gu-bernur terhadap Rancangan KUA-PPAS Tahun 2027 yang memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijak-an pendapatan, belanja dan pem-biayaan daerah, prioritas program

dan kegiatan masing-masing urusan sesuai dengan skala prioritas daerah.

"Dari pengantar yang disam-paikan tersebut, tentu kita sudah bisa memahami bagaimana tanta-ngan dan kondisi keuangan daerah, pada Tahun 2027. Banyak yang per-lu kita dalam nanti dalam pemba-hasan, baik pada aspek pendapa-tan, belanja maupun pembiayaan daerah," ungkapnya.

la menyebutkan, dari aspek pendapatan daerah, masih perlu melakukan optimalisasi, agar kebu-tuhan anggaran untuk pembangu-nan dan penanganan dampak ben-cana dapat kita penuhi. Demikian juga dari aspek belanja, kita perlu lihat kebutuhan prioritas, efeti-vitas dan urgensi dalam rangka pencapaian target pembangunan daerah yang sudah ditetapkan da-lam RPJMD Tahun 2024-2029 dan

RKPD Tahun 2027.

"Ini tentu bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Oleh sebab itu, dalam pembahasan nanti baik DPRD maupun Pemerintah Daer-ha dapat lebih serius dan bersung-guh-sungguh mendalami semua materi muatan yang terdapat da-lam Rancangan KUA-PPAS Tahun 2027," pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur Sum-bar Mahyeldi mengatakan penyusu-tan rancangan kebijakan umum anggaran tahun 2027 harus mencermati dinamika perekonomian serta evaluasi capaian kinerja ekonomi makro daerah yang telah berjalan.

"Dalam persepektif jangka me-nengah perekonomian Sumatera Barat dipengaruhi oleh berbagai tantangan eksternal dan kerentan-an struktur ekonomi internal," se-but Mahyeldi. (*)

BREAKING
NEWS!



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT



KETUA DPRD Sumbar Muhidi, didampingi wakil ketua Evi Yandri Rajo Budiman dan Sekretaris DPRD Mafrizon, Gubernur Sumbar Mahyeldi, berfoto bersama setelah penyerahan Rancangan KUA-PPAS Tahun 2027, saat rapat paripurna di ruang sidang utama, Senin, (6/7).



KETUA DPRD Sumbar Muhidi, didampingi wakil ketua Evi Yandri Rajo Budiman dan Gubernur Sumbar Mahyeldi, saat membuka rapat paripurna Rancangan KUA-PPAS Tahun 2027, di ruang sidang utama, Senin, (6/7).



KETUA DPRD Sumbar Muhidi, didampingi wakil ketua Evi Yandri Rajo Budiman menerima dokumen Rancangan KUA-PPAS Tahun 2027, dari Gubernur Sumbar Mahyeldi, saat rapat paripurna di ruang sidang utama, Senin, (6/7).



KETUA DPRD Sumbar Muhidi, didampingi wakil ketua Evi Yandri Rajo Budiman, Nanda Satria, Gubernur Sumbar Mahyeldi, saat memimpin rapat paripurna Penyampaian Rancangan KUA-PPAS Tahun 2027, di ruang sidang utama, Senin, (6/7).



KETUA DPRD Sumbar Muhidi, didampingi wakil ketua Evi Yandri Rajo Budiman, mendengarkan Gubernur Sumbar Mahyeldi, membacakan Rancangan KUA-PPAS Tahun 2027, di ruang sidang utama, Senin, (6/7).





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
	Rakyat Sumbar	1
	SELASA, 7 JULI 2026	

Akselerasi Transformasi Ekonomi Jadi Prioritas

Padang, Rakyat Sumbar—Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD Sumbar dalam rapat paripurna di ruang sidang utama DPRD Sumbar, Senin (6/7).

Dokumen tersebut menjadi pedoman arah kebijakan fiskal daerah yang difokuskan untuk mempercepat transformasi ekonomi, memperkuat inklusi sosial, dan menjaga ketahanan pangan.

Mahyeldi menjelaskan, penyusunan KUA-PPAS 2027 dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian yang masih menghadapi berbagai tantangan.

Pada 2025, pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumbar tercatat sebesar 3,37 persen, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4,36 persen.

"Perlambatan ini dipengaruhi oleh tekanan ekonomi makro secara global dan nasional, serta terjadinya serangkaian bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem yang secara langsung mengganggu aktivitas produksi, distribusi, serta mobilitas masyarakat, khususnya pada sektor pertanian, perdagangan, dan transportasi," ujar Mahyeldi.

Meski demikian, ia menegaskan berbagai indikator pembangunan sosial menunjukkan capaian yang menggembirakan.

Tingkat kemiskinan berhasil ditekan dari 5,97 persen menjadi

5,31 persen atau berkurang lebih dari 33 ribu jiwa. Indeks Gini Rasio membaik menjadi 0,280, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 5,52 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 77,27, tetap berada di atas rata-rata nasional.

"Program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang kita jalankan bersama telah tepat sasaran dan efektif dalam menjaga daya tahan rumah tangga," katanya.

Mahyeldi menyampaikan, tema pembangunan Sumbar tahun 2027 adalah Akselerasi Transformasi Ekonomi, Inklusi Sosial, dan Ketahanan Pangan. Tema

tersebut diwujudkan melalui percepatan transformasi ekonomi berbasis nagari dan UMKM, peningkatan akses layanan dasar, serta penguatan sektor pertanian, perikanan dan kehutanan sebagai penopang utama perekonomian daerah.

Ia menegaskan, seluruh kebijakan anggaran disusun dengan prinsip money follows program, sehingga belanja daerah benar-benar diarahkan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat, sekaligus memperkuat upaya mitigasi dan pemulihan pascabencana.

"Alokasi anggaran dan perencanaan kebijakan tahun 2027 di-

susun berdasarkan prinsip money follows program, dengan memberikan prioritas penuh pada program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta mendukung mitigasi risiko dan pemulihan pascabencana secara tangguh," tegasnya.

Dalam rancangan KUA-PPAS 2027, Pemprov Sumbar juga menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi perpajakan, penguatan kinerja BUMD, serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah. Sementara itu, belanja daerah diprioritaskan untuk pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur tangguh bencana,

pengembangan pariwisata, dan percepatan ekonomi kreatif berbasis UMKM.

Selain itu, pemerintah daerah akan terus mendorong hilirisasi sektor unggulan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan konektivitas wilayah, percepatan investasi, pengendalian inflasi, serta pengembangan ekonomi hijau guna menjaga pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Secara fiskal, rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp5,77 triliun dan belanja daerah sebesar Rp5,71 triliun. Setelah memperhitungkan komponen

pembiayaan daerah, APBD 2027 diproyeksikan mengalami defisit sekitar Rp66 miliar.

Menutup penyampaiannya, Mahyeldi berharap pembahasan KUA-PPAS bersama DPRD dapat menghasilkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan memperkuat pembangunan Sumbar.

"Kami berharap pembahasan ini dapat menghasilkan kesepakatan yang lebih akomodatif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sehingga setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Sumatera Barat," tutup Mahyeldi. (edg)



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Rabu, 8 Juli 2026 (23 Muharam 1448 H)	8

KUA PPAS Sumbar Tahun Anggaran 2027 Mulai Dibahas

Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Sumbar Tahun Anggaran 2027 mulai dibahas. Pembahasan dimulai pasca telah diteruskannya draf rancangan tersebut pada DPRD Sumbar oleh Pemprov.

Penyerahan dokumen anggaran tersebut berlangsung dalam rapat paripurna di Gedung Dewan, Senin (6/7).

Merespons penyerahan tersebut, DPRD Sumbar memberikan sejumlah catatan krusial. DPRD meminta agar arah kebijakan penyusunan program, kegiatan, dan alokasi anggaran 2027 diselaraskan dengan sasaran pembangunan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Periode 2024-2029.

Bukan itu saja, postur anggaran mendatang juga diwajibkan sensitif terhadap kebutuhan pemulihan daerah. Khususnya, penanganan pascabencana hidrometeorologi hebat yang menerjang wilayah Sumbar pada akhir tahun 2025 silam.

Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, saat memimpin jalannya

sidang paripurna menjelaskan bahwa tahun 2027 merupakan fase krusial. Tahun tersebut menjadi tahun ketiga masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar periode 2024-2029, sekaligus tahun ketiga pelaksanaan RPJMD.

Oleh sebab itu, seluruh program dan anggaran wajib berorientasi pada target pembangunan yang telah disepakati.

"Berkaitan dengan hal tersebut, arah kebijakan penyusunan program, kegiatan, dan anggaran Tahun 2027 harus disesuaikan dengan sasaran

pokok yang terdapat dalam RPJMD Tahun 2027," kata Muhidi menegaskan.

Ia menambahkan, penyusunan KUA-PPAS 2027 tidak boleh sekadar menjadi rutinitas normatif berbasis RPJMD. Pemerintah daerah harus realistis melihat kondisi riil di lapangan, terutama dampak masif bencana hidrometeorologi akhir 2025.

Berdasarkan kalkulasi data, kebutuhan dana pemulihan pascabencana tergolong sangat raksasa. Untuk rekonstruksi infrastruktur saja, estimasi biaya menembus angka Rp33 triliun. Atas dasar itu, skema penganggannya wajib diintegrasikan secara terpadu antara Pemerintah Pusat, Pemprov, hingga pemerintah kabupaten dan kota.

Muhidi juga menyoroti pentingnya keharmonisan agenda pembangunan daerah dengan kebijakan nasional. Penyusunan Rancangan KUA-PPAS 2027 tidak boleh berjalan sendiri, melainkan harus tegak lurus dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pusat, termasuk dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027.

Langkah ini dinilai mendasar mengingat keterbatasan kapasitas fiskal Sumatera Barat saat ini. Di sisi lain, ketergantungan terhadap sokongan dana dan program dari pemerintah pusat menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi demi mempercepat pemulihan daerah.

"APBD Provinsi Sumatera Barat maupun APBD kabupaten dan kota tidak akan sanggup memenuhi kebutuhan ang-

garan penanganan pascabencana yang diperkirakan mencapai Rp33 triliun. Oleh karena itu, sinkronisasi arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah mutlak harus dilakukan dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang terdapat dalam KEM-PPKF Tahun 2027," cetusnya.

Rapat paripurna strategis ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sumbar Muhidi, dengan didampingi Wakil Ketua DPRD Evi Yandri serta Nanda Satria.

Agenda ini juga dihadiri oleh Sekretaris DPRD Maifrizon, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Dahrul Idris, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), jajaran Forkopimda, serta Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi.

Saat berpidato di podium, Gubernur Mahyeldi mengakui bahwa Rancangan KUA-PPAS 2027 dirancang di tengah ruang fiskal daerah yang sangat sempit. Kondisi ini membuat Pemprov belum mampu menjangkau seluruh aspirasi dan usulan masyarakat.

Namun, dengan mengacu pada skala prioritas RKPD 2027, eksekutif berkomitmen memastikan setiap rupiah

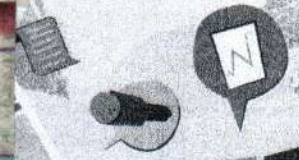
yang dibelanjakan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik.

"Rancangan KUA dan PPAS yang telah disampaikan akan dilakukan pendalaman lebih lanjut bersama DPRD sehingga nantinya mendapatkan kesepakatan yang lebih akomodatif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dalam kesempatan ini kami berharap kiranya kesepakatan tersebut dapat terlaksana sesuai batas waktu yang telah ditentukan," tutur Mahyeldi menutup penjelasannya. (*)



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

K



**BREAKING
NEWS!**



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Rabu, 8 Juli 2026 (23 Muharam 1448 H)	12

Sumbar Siapkan Anggaran Rp20 Miliar untuk Perbaiki Jalan Provinsi

PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyiapkan anggaran sebesar Rp20 miliar untuk memperbaiki ruas jalan Manggopoh-Padang Luar di Kabupaten Agam yang mengalami kerusakan.

"Proses perbaikan akan segera dimulai setelah proses tender selesai dilaksanakan," kata Gubernur Sumbar Mahyeldi di Padang, Senin.

Mahyeldi mengatakan alokasi anggaran Rp20 miliar tersebut terbagi dalam dua paket pekerjaan. Pertama Rp6 miliar untuk penanganan ruas Simpang Gudang Manggopoh hingga Lubuk Basung yang saat ini sedang dalam proses tender.

Sementara, paket kedua senilai Rp14 miliar akan difokuskan untuk penanganan jalan yang terdampak longsor dan amblas di kawasan Sungai Landia, Kecamatan IV Koto termasuk titik-titik rawan di sekitarnya.

"Anggarannya sudah terse-

dia. Setelah proses tender selesai Insya Allah pengerjaannya akan segera dimulai," ujar eks Walikota Padang tersebut.

Ia mengatakan pemerintah memahami harapan masyarakat agar perbaikan dapat segera direalisasikan. Namun, seluruh tahapan pelaksanaan harus tetap mengikuti mekanisme yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan sesuai aturan dan menghasilkan kualitas yang baik.

Penanganan dan pemeliharaan rutin ruas jalan terus dilakukan melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) III Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Provinsi Sumbar. Hal itu meliputi penambalan dan perbaikan sejumlah jembatan

tepatnya di kawasan Lubuk Basung, Kabupaten Agam.

Ruas jalan provinsi Simpang Gudang Manggopoh hingga Padang Luar memiliki panjang sekitar 69,43 kilometer dan merupakan salah satu jalur strategis di Kabupaten Agam. Jalan tersebut menghubungkan sejumlah kawasan penting seperti Lubuk Basung, Maninjau, Kelok 44, Matur, IV Koto hingga Banuhampu. Keberadaan infrastruktur ini berperan penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Ia mengatakan kerusakan jalan di ruas tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Selain usia jalan dan tingginya intensitas kendaraan bertonase besar, kawasan itu juga kerap terdampak bencana alam seperti longsor dan amblas akibat kondisi geografis yang berbukit. (ant)





SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
POSMETRO PADANG	RABU, 8 JULI 2026	8

Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan KUA-PPAS Tahun 2027

DPRD Sumbar Dorong Sinkro nisasi Program Pembangunan Daerah dan Nasional

PADANG, METRO

DPRD Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2027, Senin (6/7).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sumbar Muhidi didampingi Wakil Ketua Evi Yandri dan Nanda Satria. Turut hadir Sekretaris DPRD (Sekwan) Maifrizon, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Darul Idris, Gubernur Sumbar Mahyeldi, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumbar.

Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Sumbar, Muhidi mengatakan, penyusunan Rancangan

KUA-PPAS Tahun 2027 tidak hanya mengacu pada RPJMD Sumbar 2024-2029 dan RKPD 2027, tetapi juga harus berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027.

"Dari pengantar yang disampaikan tersebut, tentu kita sudah bisa memahami bagaimana tantangan dan kondisi keuan-

gan daerah pada Tahun 2027. Banyak yang perlu kita dalam nanti dalam pembahasan, baik pada aspek pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah," ungkapnya.

Selain itu, kata Muhidi, besarnya kebutuhan anggaran untuk penanganan pascabencana yang diperkirakan mencapai Rp33 triliun membuat dukungan pemerintah pusat

menjadi sangat penting karena kapasitas fiskal Sumbar relatif terbatas.

"APBD Provinsi Sumbar maupun APBD kabupaten dan kota tidak akan

sanggup memenuhi kebutuhan anggaran penanganan pascabencana. Karena itu, penyalarsan arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan

dengan prioritas nasional menjadi langkah strategis agar dukungan anggaran dari pemerintah pusat dapat dioptimalkan," tegasnya.

Ditambahkan Muhidi, dari aspek pendapatan daerah, masih perlu melakukan optimalisasi, agar kebutuhan anggaran untuk pembangunan dan penanganan dampak bencana dapat kita penuhi. Demikian juga dari aspek belanja, kita perlu lihat kebutuhan prioritas, efek-

tivitas dan urgensi dalam rangka pencapaian target pembangunan daerah yang sudah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2024-2029 dan RKPD Tahun 2027.

"Ini tentu bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Oleh sebab itu, dalam pembahasan nanti baik DPRD maupun Pemerintah Daerah dapat lebih serius dan bersungguh-sungguh mendalami semua materi muatan yang terdapat dalam Rancangan KUA-PPAS Tahun 2027," pungkasnya.

Sementara itu, Guber-

nur Mahyeldi mengatakan, dokumen KUA-PPAS 2027 merupakan penjabaran tahun kedua dari Peraturan Daerah Provinsi Sumbar Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD Provinsi Sumbar Tahun 2025-2029. Dokumen tersebut juga selaras dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 yang telah mengakomodasi kebijakan Asta Cita serta menjadi penjabaran visi dan misi kepala daerah.

"Pembahasan KUA-PPAS tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumbar Tahun Anggaran 2027, sekaligus menentukan arah prioritas pembangunan daerah pada tahun mendatang," tutupnya. (*)



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT



SERAHKAN DOKUMEN—Gubernur Sumbar, Mahyeldi menyerahkan dokumen Rancangan KUA-PPAS Tahun 2027 kepada Ketua DPRD Sumbar Muhidi didampingi Wakil Ketua Evi Yandri Rajo Budiman dan Sekwan Maifrizon.



GUBERNUR Sumbar Mahyeldi menyerahkan dokumen Rancangan KUA-PPAS Tahun 2027 kepada Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman.



KETUA DPRD Sumbar, Muhidi memimpin Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan KUA-PPAS Provinsi Sumbar Tahun Anggaran 2027.



KETUA DPRD Sumbar, Muhidi didampingi Wakil Ketua Evi Yandri dan Nanda Satria, bersama Gubernur Sumbar Mahyeldi saat Rapat Paripurna.



SELURUH Anggota DPRD Sumbar dan tamu undangan yang hadir menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum Rapat Paripurna dimulai.





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	RABU, 8 JULI 2026	2

FRAKSI PPP INGATKAN PEMPROV Opini WTP Harus Berdampak pada Kesejahteraan Rakyat



FRAKSI PPP mengingatkan Opini WTP Harus Berdampak pada Kesejahteraan Rakyat

PADANG, HALUAN — Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Sumatera Barat mengapresiasi capaian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar yang kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Namun demikian, Fraksi PPP mengingatkan bahwa raihan opini WTP tersebut tidak boleh dimaknai sebagai tujuan akhir dalam pengelolaan keuangan daerah, melainkan harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan memastikan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Anggota DPRD Sumbar dari Fraksi PPP, Nofrizon mengatakan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada hakikatnya merupakan manifestasi prinsip demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pertanggungjawaban tersebut tidak hanya sebatas memenuhi kewajiban administratif dan konstitusional pemerintah daerah, tetapi juga menjadi bentuk akuntabilitas kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dan pemberi mandat kepada pemerintah maupun DPRD.

“Melalui pembahasan Ranperda

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 ini, kita dapat melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran,” ujar Nofrizon saat menyampaikan pandangan umum Fraksi PPP atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar DPRD Sumbar baru-baru ini.

Nofrizon menyebut, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, laporan tersebut menjadi gambaran menyeluruh mengenai kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumbar selama Tahun Anggaran 2025 yang telah diaudit oleh BPK RI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Sumbar kembali memperoleh opini WTP untuk ke-14 kalinya secara berturut-turut. (h/len)



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan Harian Siaran Mencendaskan Kehidupan Masyarakat	RABU, 8 JULI 2026	2

Yesi Endriani Perkuat Ketahanan Keluarga Lewat Sekolah Keluarga

BUKITTINGGI, HALUAN

— Anggota Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Yesi Endriani, menggagas program Sekolah Keluarga sebagai upaya memperkuat ketahanan keluarga sekaligus mencegah berbagai persoalan sosial, mulai dari stunting, tuberkulosis (TBC), HIV/AIDS, hingga gangguan kesehatan mental pada remaja.

Menurut Yesi, keluarga merupakan fondasi utama dalam membentuk generasi yang sehat, berakarakter, dan berdaya saing. Karena itu, penguatan keluarga harus dilakukan melalui edukasi yang komprehensif, tidak hanya di bidang kesehatan, tetapi juga ekonomi, pola asuh, komunikasi dalam rumah tangga, hingga pendidikan agama.

“Melalui Sekolah Keluarga, kita ingin anak-anak terbebas dari stunting, masyarakat terhindar dari TBC maupun HIV/AIDS. Program ini juga membahas fungsi kesehatan, fungsi ekonomi, hingga bagaimana membangun keluarga yang harmonis,” kata Yesi, Rabu (1/7).

Ia menjelaskan, Sekolah Keluarga menghadirkan narasumber dari berbagai bidang, seperti tenaga kesehatan, akademisi, tokoh agama, hingga praktisi ekonomi kreatif. Materi yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat agar keluarga memiliki bekal dalam menghadapi berbagai tantangan.

Salah satu pelatihan yang telah dilaksanakan adalah pengolahan sampah organik menjadi maggot sebagai alternatif meningkatkan pendapatan keluarga.

“Kami menghadirkan ahli dari berbagai bidang karena persoalan keluarga tidak hanya menyangkut ekonomi, tetapi juga kesehatan, pendidikan anak, komunikasi suami istri, hingga bagaimana membangun keluarga yang kuat dan tangguh,” ujarnya.

Yesi menilai berbagai persoalan



YESI Endriani

sosial yang terjadi di tengah masyarakat berawal dari lemahnya ketahanan keluarga. Karena itu, ia mendorong penerapan delapan fungsi keluarga secara optimal, yakni fungsi agama, pendidikan, kesehatan, perlindungan, kasih sayang, sosial budaya, ekonomi, dan pembinaan lingkungan sebagai upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga).

Selain itu, ia juga menyoroti meningkatnya persoalan penyimpangan perilaku di kalangan remaja. Menurutnya, keluarga harus menjadi benteng pertama dalam menanamkan nilai agama, moral, dan karakter sehingga anak tidak mudah terpengaruh oleh perilaku negatif.

“Kita ingin keluarga menjadi tempat pertama memberikan pendidikan agama, nilai moral, dan karakter kepada anak. Dengan pondasi yang kuat, mereka akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan zaman,” katanya.

Untuk mendukung program

tersebut, Yesi mengalokasikan dana aspirasi sebesar Rp500 juta pada 2025 melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Anggaran itu digunakan untuk memberikan pembekalan kepada tokoh masyarakat, ulama, ketua RT dan RW, lurah, jorong, serta kader perempuan agar mampu menjadi agen edukasi di lingkungan masing-masing.

Tak hanya itu, tahun ini juga dilaksanakan bimbingan teknis bagi guru SMA guna memperkuat peran sekolah dalam pembinaan keluarga remaja, terutama dalam menghadapi persoalan kesehatan mental yang semakin banyak dialami generasi muda.

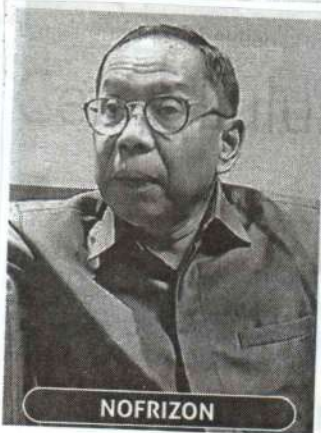
Yesi berharap Sekolah Keluarga dapat berkembang menjadi gerakan bersama dalam membangun keluarga yang berkualitas. Menurutnya, keluarga yang tangguh akan melahirkan generasi yang sehat, produktif, dan menjadi modal penting bagi pembangunan Sumatera Barat. (h/len)



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	RABU, 8 JULI 2026	5

Kelok 10 Rusak Parah, Nofrizon: Masyarakat Agam Minta Gubernur Lewat Tanpa Pengawasan



NOFRIZON

PADANG,
KP – Sekretaris
Komisi III DPRD
Provinsi Suma-
tera Barat (Sum-
bar), Nofrizon,
menyuarakan
keresahan ma-
syarakat Kabu-
paten Agam ter-
kait kondisi Ja-
lan Kelok 10 di
kawasan Kelok
44 yang mem-
prihatinkan dan

nyaris ambruk. Ia menyampaikan aspirasi terse-
but melalui interupsi dalam Rapat Paripurna
DPRD Sumbang, Senin (6/7).

Nofrizon yang juga berasal dari daerah pemi-
lihan Agam menegaskan, masyarakat meminta di-
rinya menyampaikan langsung kepada Gubernur
Sumbang agar segera meninjau kondisi jalan terse-
but karena kerusakannya semakin parah dan
mengancam keselamatan warga yang melintas.

"Masyarakat Agam meminta saya menyam-
paikan langsung kepada Bapak Gubernur terkait
kondisi Jalan Kelok 10 yang saat ini sudah sangat
parah dan nyaris ambruk," ujarnya.

Ia menilai pemerintah provinsi belum maksi-
mal menangani kerusakan ruas Jalan Padang
Luar-Simpang Manggopoh, khususnya di sejum-
lah titik rawan seperti Kelok 8, Kelok 10, hingga
Kelok 43. Namun, menurutnya, kondisi paling
mengkhawatirkan saat ini berada di Kelok 10.

"Kondisi badan jalan di Kelok 10 hanya ter-

sisia sekitar dua meter. Pada musim hujan seperti
sekarang, kondisinya sangat rawan. Kendaraan
tronton tidak bisa lagi melintas. Hanya kendaraan
kecil seperti L300 dengan kapasitas muatan ter-
batas yang masih bisa lewat," katanya.

Nofrizon menjelaskan, ruas Jalan Kelok 44,
khususnya Kelok 10, merupakan jalur vital sekal-
igus urat nadi perekonomian. Jalur ini menghu-
bungkan Padang dengan Agam, Tikau, Sungai Li-
mau, Lubuk Basung hingga Pasaman Barat, serta
menjadi lintasan distribusi berbagai komoditas
seperti jagung, padi, kelapa, ikan, dan hasil per-
tanian lainnya. "Aktivitas lalu lintas di ruas ini
jauh lebih padat dibandingkan ruas Sicincin-
Malalak. Karena itu, pemerintah harus memprior-
itaskan penanganan jalan ini," tegasnya.

Ia mengungkapkan, masyarakat berharap Gu-
bernur dan Wakil Gubernur Sumbang turun langsung
meninjau lokasi tanpa pengawasan agar dapat
merasakan kondisi yang dihadapi warga setiap hari.

"Masyarakat meminta kami mengundang

Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur mele-
wati sendiri jalur Padang Luar menuju Lubuk Ba-
sung tanpa pengawasan, bersama keluarga dan
anak-anaknya. Rasakan bagaimana kondisi psiko-
logis masyarakat yang setiap hari harus melintasi
jalan tersebut," ujarnya.

Menurut Nofrizon, jika akses Jalan Kelok 10
terputus, dampaknya akan sangat besar terhadap
mobilitas masyarakat serta distribusi hasil per-
tanian dan kebutuhan pokok di wilayah Agam dan
Pasaman Barat.

Ia juga menilai penanganan selama ini be-
lum mampu menyelesaikan persoalan secara per-
manen karena kerusakan terus berulang setiap
musim hujan.

"Persoalan ini tidak bisa lagi ditangani den-
gan cara biasa. Ibarat orang sakit, tidak cukup lagi
diberi obat generik, tetapi membutuhkan penan-
ganan khusus. Jika akses ini putus, masyarakat
terpaksa memutar jauh melalui Maninjau menuju
Lubuk Basung," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Bina
Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (BMCKTR)
Sumbang, Armiz, mengatakan pemerintah provinsi
telah melakukan penanganan darurat di ruas
Jalan Kelok 10 sejak dua hari terakhir.

Ia menjelaskan, pihaknya menjadwalkan pe-
masangan sand bag hari ini (kemarin-red) sebagai
langkah penanganan sementara untuk mencegah
kerusakan semakin meluas.

"Penanganan sementara sudah kami lakukan
sejak dua hari lalu. Hari ini kami akan memasang
sandbag untuk memperkuat bagian jalan yang
terdampak," ujar Armiz.

Ia menambahkan, pemerintah masih me-
nunggu ketersediaan anggaran untuk penanga-
nan permanen melalui mekanisme Rencana Re-
habilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)
maupun sumber pendanaan lainnya.

"Untuk penanganan permanen, kami masih
menunggu ketersediaan anggaran melalui R3P
dan usulan pendanaan lainnya," katanya. (fai)

NEWS

BREAKING
NEWS!



KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	KAMIS, 9 JULI 2026	2



KETUA DPRD Sumbar, Muhidi saat membuka kegiatan Peningkatan Kompetensi Kepala SMA, SMK, dan SLB se-Sumatera Barat di Padang, Selasa (7/7). IST

SIAPKAN SDM UNGGUL

Muhidi Dorong Kepala Sekolah Perkuat Kepemimpinan

PADANG, HALUAN — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) harus dimulai dari penguatan kepemimpinan di lingkungan sekolah. Karena itu, kepala SMA, SMK, dan SLB dituntut tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga mampu menjadi pemimpin yang visioner, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan.

Hal itu disampaikan Muhidi saat membuka kegiatan Peningkatan Kompetensi Kepala SMA, SMK, dan SLB se-Sumatera Barat yang diikuti 125 kepala sekolah dari Kabupaten Sijunjung, Kota Sawahlunto, dan Kabupaten Solok di Padang, Selasa (7/7).

Menurut Muhidi, kualitas pendidikan akan sangat ditentukan oleh kapasitas pemimpin di setiap satuan pendidikan. Ia mengingatkan bahwa bonus demografi yang akan dihadapi Indonesia harus dijawab dengan peningkatan mutu pendidikan sejak dini.

"DPRD memiliki tanggung jawab dalam mendukung lahirnya generasi

yang berkualitas. Anak-anak SMA dan SMK hari ini, 20 hingga 30 tahun mendatang akan menjadi pemimpin daerah, pemimpin bangsa, sekaligus penggerak pembangunan. Karena itu fondasi mereka harus dibangun mulai sekarang," ujarnya.

Muhidi mengajak seluruh kepala sekolah memiliki visi yang jelas dalam mengembangkan sekolah, sekaligus membangun karakter peserta didik agar mampu menghadapi tantangan masa depan.

Ia juga menekankan bahwa kepemimpinan yang efektif lahir dari kemauan untuk terus belajar, berpikir positif, beradaptasi terhadap perubahan, serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat.

Sementara itu, Kepala SMA Negeri 2 Sumatera Barat, Ratna Yulia, menilai kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat kompetensi kepala sekolah dalam menghadapi dinamika dunia pendidikan yang terus berkembang.

Menurutnya, kepala sekolah saat ini dituntut menjadi agen perubahan yang

mampu menghadirkan inovasi dan menciptakan lingkungan belajar yang semakin berkualitas.

"Kegiatan ini membuka wawasan kami terhadap arah kebijakan pendidikan sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kompetensi dan menghadirkan inovasi di sekolah," katanya.

Ratna menambahkan, materi yang disampaikan Muhidi tidak hanya membahas kebijakan pendidikan, tetapi juga memberikan penguatan mengenai kepemimpinan yang visioner dan pentingnya membangun budaya belajar di lingkungan sekolah.

Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan sebagai wadah berbagi pengalaman, memperluas wawasan, serta memperkuat kapasitas kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Sumatera Barat.

Melalui forum tersebut, para peserta juga diharapkan mampu mengimplementasikan berbagai pengetahuan yang diperoleh sehingga lahir sekolah-sekolah yang lebih inovatif, adaptif, dan mampu mencetak generasi yang unggul serta berdaya saing di masa depan. (h/len)





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan Harian Umum Menceritakan Kehidupan Masyarakat	KAMIS, 9 JULI 2026	2

Komisi IV DPRD Sumbar Matangkan Ranperda Lingkungan Hidup

PADANG, HALUAN — Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat terus memantapkan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Salah satu langkah yang dilakukan yakni menggelar *Focus Group Discussion* (FGD) bersama berbagai pemangku kepentingan di Ruang Khusus II DPRD Sumbar, Senin (6/7).

Forum tersebut menjadi bagian dari proses penyusunan Naskah Akademik (NA) dan Draf Ranperda agar regulasi yang dihasilkan mampu menjawab tantangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Sumatera Barat secara komprehensif, partisipatif, dan berkelanjutan.

FGD dihadiri Ketua dan Anggota Komisi IV DPRD Sumbar, tim perumus naskah akademik, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, perwakilan pemerintah kabupaten dan kota, akademisi, insan media, serta organisasi masyarakat sipil.

Dalam forum tersebut, peserta menyampaikan berbagai pandangan, masukan, dan rekomendasi terkait substansi Ranperda. Beragam perspektif yang berkembang akan menjadi bahan penyempurnaan Naskah Akademik maupun draf regulasi sebelum memasuki tahapan pembahasan selanjutnya.

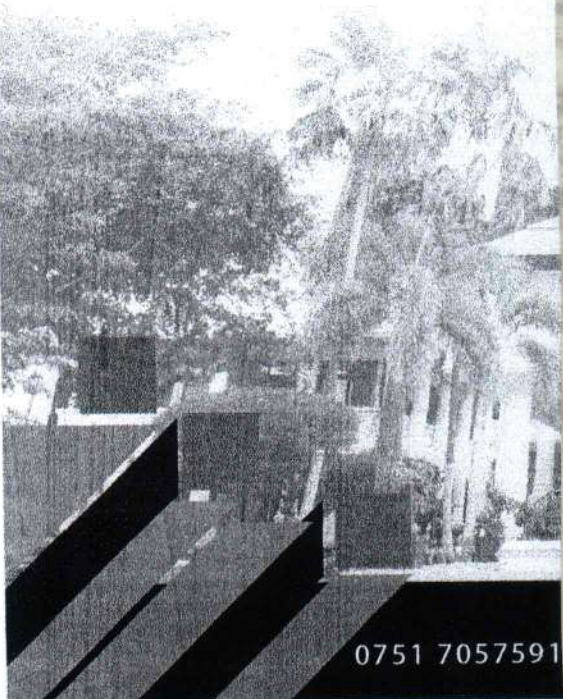
Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Doni Harsiva Yandra mengatakan, pelibatan berbagai unsur sangatlah penting dalam proses pembentukan peraturan daerah. Selain memperkaya substansi regulasi, pendekatan

partisipatif diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang lebih implementatif serta sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah.

"Ranperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini diharapkan tidak hanya memperkuat landasan hukum dalam pengelolaan lingkungan, tetapi juga menjadi instrumen untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta mendukung pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan," ulasnya.

Ditegaskannya, melalui pembahasan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, Komisi IV DPRD Sumbar berkomitmen menghadirkan regulasi yang memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

"Regulasi ini nantinya diharapkan dapat menjadi pijakan dalam mewujudkan tata kelola lingkungan yang lebih baik, sehingga keberlanjutan sumber daya alam Sumatera Barat dapat terjaga untuk kepentingan generasi sekarang maupun generasi mendatang," tukasnya. (h/len)





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	KAMIS, 9 JULI 2026	4

Ketua DPRD Sumbar Bekali UMKM Strategi Menembus Pasar Digital

PADANG, HALUAN — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, mengingatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar tidak hanya mengandalkan modal dalam mengembangkan usaha. Menurutnya, kemampuan beradaptasi, penguasaan teknologi digital, serta kemauan untuk terus belajar menjadi faktor penentu agar UMKM mampu bertahan dan naik kelas di tengah persaingan yang semakin ketat.

Pesan tersebut disampaikan Muhidi saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pengusaha UMKM yang diikuti pelaku usaha Rumah Makan Ampera dan Paguyuban Teh Talua di Kota Padang, Senin (6/7).

“Modal memang penting, tetapi tidak cukup. Yang lebih menentukan adalah ilmu, jaringan, disiplin, dan kemauan untuk terus belajar. Dunia usaha terus berubah dan pelaku UMKM harus mampu mengikuti perubahan itu,” ujar Muhidi.

Ia menilai, transformasi digital tidak lagi menjadi pilihan, melainkan kebutuhan. Pelaku UMKM harus mulai memanfaatkan website, media sosial, hingga berbagai platform digital untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk.

“Kalau orang tidak mengenal produk yang kita jual, bagaimana mereka akan membeli? Karena itu UMKM harus berani masuk ke dunia digital,” tegasnya.

Muhidi mengatakan, DPRD Sumbar terus mendorong penguatan sektor UMKM melalui tiga fungsi utamanya, yakni pembentukan regulasi yang berpihak kepada pelaku usaha, dukungan anggaran melalui APBD, serta pengawasan terhadap program pemberdayaan yang dijalankan pemerintah daerah.

Dalam kesempatan itu, Muhidi juga membagikan lima prinsip membangun usaha yang menurutnya relevan diterapkan seluruh pelaku UMKM. Kelima prinsip tersebut meliputi keberanian memulai usaha, menjaga konsistensi kualitas produk, membangun disiplin, menjadikan kegagalan sebagai proses belajar, serta membiasakan menyelesaikan setiap pekerjaan hingga tuntas.

Menurutnya, kepercayaan pelanggan merupakan aset terbesar dalam dunia usaha. Konsumen akan kembali membeli apabila kualitas produk tetap terjaga dari waktu ke waktu.

“Di dunia usaha selalu ada dua pilihan, melihat masalah atau melihat peluang. Pelaku UMKM harus memilih menjadi orang yang mampu menangkap peluang dari setiap perubahan,” katanya.

Pelaksanaan bimtek tersebut mendapat respons positif dari peserta. Salah seorang peserta, Tri Zuhri, pengusaha Rumah Makan Ampera dan rumah kos di kawasan Limau Manis, mengaku memperoleh banyak wawasan baru, terutama mengenai strategi pemasaran dan pemanfaatan media digital.

“Selama ini usaha kami lebih banyak mengandalkan pelanggan di lingkungan sekitar. Setelah mengikuti bimtek ini, kami jadi memahami pentingnya memperluas pasar melalui media digital dan menentukan target konsumen yang lebih jelas,” ujarnya.

Ia berharap kegiatan serupa terus dilaksanakan karena sangat membantu pelaku UMKM, khususnya mereka yang baru merintis usaha. Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengusaha UMKM tersebut dilaksanakan dalam dua gelombang, yakni Angkatan X dan XI. Masing-masing angkatan diikuti 50 peserta dan berlangsung selama empat hari, 6–9 Juli 2026.

Hingga pekan kedua Juli 2026, program tersebut telah memasuki angkatan ke-11 dari total 19 angkatan yang dijadwalkan terlaksana sepanjang tahun ini. Melalui kegiatan tersebut, Muhidi berharap semakin banyak UMKM di Sumatera Barat tumbuh menjadi usaha yang tangguh, inovatif, dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas. (h/len)





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	KAMIS, 9 JULI 2026	9

System' (WBS) terus dioptimalkan.

Komisi IV DPRD Sumbar Bedah Ranperda Lingkungan Bersama Akademisi dan Warga Sipil

PADANG, KP - Komisi IV DPRD Sumbar meng-
gandeng akademisi hingga organisasi masyarakat sipil untuk ikut membedah draf hukum secara ter-
buka.

Langkah ini diambil demi melahirkan regula-
si 'lingkungan yang tajam, partisipatif, serta imple-
mentatif di lapangan.

Upaya penghimpunan kritik dan masukan
mendasar tersebut diwujudkan melalui 'Focus
Group Discussion' (FGD) di Ruang Rapat II Gedung
DPRD Sumbar, Senin lalu (6/7). Diskusi ini me-
nyasar penyempurnaan Naskah Akademik (NA)
serta Draft Rancangan Peraturan Daerah (Ran-
perda) tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

Selain tim perumus dewan, forum ini dibuka

lebar dengan melibatkan organisasi perangkat
daerah (OPD) terkait, utusan pemerintah kabu-
paten/kota, akademisi perguruan tinggi, jurnalis,
hingga aktivis lingkungan hidup.

Pelibatan aktif seluruh unsur masyarakat ini
dinilai penting agar aturan yang dilahirkan mam-
pu menjawab tantangan riil di lapangan. Regulasi
ini diproyeksikan dapat mengendalikan pence-
maran, mencegah kerusakan hutan, sekaligus me-
redam konflik ruang kelola alam yang kian rumit
di ranah Minang.

"Melalui pembahasan yang terbuka ini, kami
ingin menghimpun rekomendasi kuat dari lintas
sektor. Kita membutuhkan regulasi yang tidak
hanya indah di atas kertas, tetapi juga implemen-
tatif, memberikan kepastian hukum yang tegas,

serta menjamin kelestarian sumber daya alam
Sumatera Barat," tulis pernyataan resmi Komisi IV
DPRD Sumbar usai forum tersebut.

Selain memperkuat aspek sanksi dan pene-
gakan hukum, Ranperda ini bakal menjadi lan-
dasan utama yang wajib dipatuhi oleh para pela-
ku investasi dan dunia usaha. Melalui aturan baru
ini, korporasi dituntut menerapkan konsep pem-
angunan yang berwawasan lingkungan dan
berkelanjutan, tanpa mengorbankan ruang hidup
masyarakat lokal.

Pasca-FGD, tim perumus berkomitmen lang-
sung menyisir kembali poin-poin krusial dari
naskah akademik berdasarkan catatan kritis tim
pakar demi melindungi hak lingkungan generasi
masa depan. (fai)



ANGGOTA Komisi IV DPRD Sumbar bersama per-
wakilan akademisi, organisasi perangkat daerah
(OPD), jurnalis, dan aktivis lingkungan hidup
berfoto bersama usai menggelar 'Focus Group
Discussion' (FGD) di Ruang Rapat II Gedung
DPRD Sumbar.





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Rakyat Sumbar JUMAT, 10 JULI 2026		9

Evi Yandri Dukung Peningkatan Kapasitas Wasit INKADO

Padang, Rakyat Sumbar — Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat Evi Yandri Rajo Budiman memberikan dukungan kepada wasit INKADO Sumatera Barat, Martinel Prihastuti, yang mengikuti Ujian Sertifikasi Wasit/Juri Asian Karate Federation (AKF) di Bangladesh.

Martinel Prihastuti merupakan salah satu wasit INKADO Sumatera Barat yang terus menunjukkan komitmen, dedikasi, dan profesionalisme dalam mengembangkan kemampuan di bidang perwasitan karate.

Selain aktif dalam dunia karate, beliau juga merupakan Guru Pendidikan Jasmani di SMA Negeri 2 Padang serta menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan.

Ujian Sertifikasi Wasit/Juri AKF tersebut akan dilaksanakan pada 15-17 Juli 2026 di Bangladesh. Kegiatan ini menjadi salah satu tahapan penting dalam meningkatkan kompetensi, kualitas, dan profesionalisme wasit karate menuju standar internasional.

"Kami memberikan dukungan penuh dan mendukung agar Saudari Martinel Prihastuti dapat mengikuti seluruh rangkaian ujian dengan baik serta meraih ha-



WAKIL Ketua DPRD Sumatera Barat Evi Yandri Rajo Budiman berfoto bersama saat kegiatan.

sil terbaik," kata Evi, yang juga Ketua Umum INKADO Pengurus Provinsi Sumatera Barat.

Ia menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas semangat serta komitmen Martinel Prihastuti dalam meningkatkan kapasitas dan jenjang perwasitan karate.

Keikutsertaannya pada ujian AKF diharapkan dapat membawa nama baik INKADO, Sumatera Barat, dan Indonesia di tingkat

Asia maupun internasional.

"Semoga keberhasilan ini dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan pembinaan karate, khususnya dalam pengembangan sumber daya wasit di Sumatera Barat dan Indonesia," ujar Evi.

Bendahara Umum INKADO Sumbar Yofaldi, yang menyampaikan bahwa organisasi akan terus berkomitmen mendukung kader terbaik INKADO Sumatera

Barat untuk meningkatkan kemampuan dan prestasi hingga ke tingkat nasional maupun internasional.

Sementara itu, Dewan Guru INKADO Sumbar Shihan Drs. Jaman, turut memberikan dorongan dan motivasi agar Martinel Prihastuti dapat menjalani seluruh proses ujian dengan penuh keyakinan, menjaga nama baik organisasi, serta mampu meraih hasil yang membanggakan. (tyr/rei)

BREAKING
NEWS



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Jumat, 10 Juli 2026 (25 Muharam 1448 H)	8

DILEPAS WAKIL KETUA DPRD SUMBAR

Wasit INKADO Ikuti Ujian Sertifikasi di Bangladesh

PADANG - Wakil Ketua DPRD Sumatra Barat (Sumbar) sekaligus Ketua Umum INKADO Pengprov Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman, resmi melepas Martinel Prihastuti untuk mengikuti Ujian Sertifikasi Wasit/Juri Asian Karate Federation (AKF) di Bangladesh.

Acara pelepasan tersebut dihadiri oleh Ketua Harian INKADO Sumbar Ulya, Sekretaris Umum Nofrizal, dan Bendahara Umum Yofialdi.

Martinel, yang juga guru PJOK sekaligus Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan di SMAN 2 Padang, akan mengikuti ujian pada 15-17 Juli 2026.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Pengprov INKADO Sumbar menanggung seluruh biaya transportasi, akomodasi, hingga uang saku Martinel selama di Bangladesh.

Evi Yandri menyampaikan apresiasi tinggi atas dedikasi Martinel. Ia berharap keikutsertaan ini mampu mengharumkan nama INKADO, Sumbar, dan Indonesia di tingkat internasional.

"Kami mendukung penuh dan mendoakan agar Saudari Martinel dapat mengikuti ujian dengan baik dan meraih hasil terbaik. Semoga keberhasilan ini berkontribusi positif bagi pembinaan karate, khususnya peningkatan mutu wasit di Sumbar," ujar Evi Yandri saat bertemu dengan Martinel, Kamis (9/7) di ruang kerjanya.

Senada dengan itu, Bendahara Umum INKADO Sumbar Yofialdi menegaskan, komitmen organisasi untuk terus mendukung kader terbaik meningkatkan prestasi hingga ke tingkat internasional.

Motivasi serupa juga datang dari Dewan Guru INKADO Sumbar, Shihan Jaman, yang meminta Martinel tampil percaya diri dan menjaga nama baik organisasi.

Pada kesempatan yang sama, keluarga besar INKADO Sumbar mengucapkan terima kasih kepada Ketua KONI Sumbar, Hamdanus, atas perhatiannya.

Martinel sendiri merupakan mantan karateka nasional peraih medali emas dan perak SEA Games pada masanya.

Pengprov INKADO Sumbar menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas SDM karate.

Sebab, kemajuan prestasi olahraga ini tidak hanya bertumpu pada atlet dan pelatih, tetapi juga perangkat pertandingan yang kompeten dan profesional. (401)



BERSAMA - Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman bersama Martinel Prihastuti dan Pengurus INKADO, Kamis (9/7) di gedung dewan setempat. (ist)

**BREAKING
NEWS!**



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	JUMAT, 10 JULI 2026	2

Wakil Ketua DPRD Sumbar Lepas Wasit INKADO Ikuti Sertifikasi AKF di Bangladesh

PADANG, HALUAN — Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman, melepas sekaligus memberikan dukungan penuh kepada wasit Institut Karate-Do Indonesia (INKADO) Sumatera Barat, Martinel Prihastuti, yang akan mengikuti Ujian Sertifikasi Wasit/Juri Asian Karate Federation (AKF) di Bangladesh pada 15-17 Juli 2026.

Pelepasan wasit di bawah naungan Pengurus Provinsi INKADO Sumbar itu turut dihadiri Ketua Harian INKADO Sumbar Ulya, Sekretaris Umum Nofrizal, Bendahara Umum Yofaldi, serta jajaran pengurus lainnya.

Evi Yandri yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Pengprov INKADO Sumbar mengatakan, keikutsertaan Martinel pada sertifikasi AKF merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia karate, khususnya di bidang perwasitan.

“Kami memberikan dukungan penuh dan mendorong agar Saudari Martinel Prihastuti dapat mengikuti seluruh rangkaian ujian dengan baik serta meraih hasil terbaik. Semoga keberhasilan ini memberikan kontribusi positif bagi kemajuan

pembinaan karate, khususnya dalam pengembangan sumber daya wasit di Sumatera Barat dan Indonesia,” ujar Evi.

Menurutnya, keberhasilan Martinel nantinya tidak hanya menjadi kebanggaan bagi keluarga besar INKADO, tetapi juga mengharumkan nama Sumatera Barat dan Indonesia di tingkat Asia.

Sebagai bentuk komitmen organisasi, Pengprov INKADO Sumbar memberikan dukungan berupa pembiayaan transportasi, akomodasi, serta uang saku selama Martinel mengikuti ujian sertifikasi di Bangladesh.

Martinel merupakan salah satu wasit karate asal Sumatera Barat yang terus menunjukkan dedikasi dalam mengembangkan kompetensi di bidang perwasitan. Selain aktif di dunia karate, ia juga mengabdikan diri sebagai guru Pendidikan Jasmani di SMA Negeri 2 Padang serta menjabat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Bendahara Umum Pengprov INKADO Sumbar, Yofaldi, mengatakan organisasi akan terus memberikan dukungan kepada kader-kader terbaik agar mampu meningkatkan kapasitas hingga level



WAKIL Ketua DPRD Sumbar Lepas Wasit INKADO Ikuti Sertifikasi AKF di Bangladesh. IST

nasional maupun internasional.

Sementara itu, Dewan Guru INKADO Sumbar, Shihan Drs. Jaman, M.Kes, berharap Martinel dapat menjalani seluruh proses sertifikasi dengan percaya diri serta menjaga nama baik organisasi dan daerah.

Pada kesempatan yang sama, keluarga besar INKADO Sumbar juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua KONI Sumbar, Hamdanus, atas dukungannya terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia karate di Sumatera Barat.

Martinel bukan sosok baru di

dunia karate nasional. Ia merupakan mantan karateka yang pernah mempersembahkan medali emas dan perak bagi Indonesia pada ajang SEA Games. Pengalaman tersebut menjadi bekal penting dalam meniti karier sebagai wasit karate menuju level internasional.

Evi Yandri menegaskan, Pengprov INKADO Sumbar akan terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia karate. Menurutnya, kemajuan prestasi olahraga karate tidak hanya ditentukan oleh atlet dan pelatih, tetapi juga oleh wasit dan juri yang memiliki kompetensi sesuai standar internasional. (h/len)



KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	SABTU, 11 JULI 2026	12

CEGAH KENAKALAN REMAJA

Ketua DPRD Sumbar Minta Kepala Sekolah Ajarkan Siswa Bikin Roadmap Masa Depan

KETUA DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, mendorong kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB untuk menanamkan nilai-nilai visioner kepada peserta didik sebagai upaya membentengi generasi muda dari berbagai perilaku menyimpang.

Hal tersebut disampaikan Muhidi saat memberikan arahan dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepala sekolah se-Sumatera Barat di salah satu hotel di Kota Padang, baru-baru ini.

"Kepemimpinan itu adalah visi. Masa jabatan kepala sekolah empat tahun, sehingga harus memiliki proyeksi yang jelas tentang arah dan kondisi sekolah ke depan," ujarnya di hadapan peserta.

Menurutnya, ketiadaan visi hidup menjadi salah satu faktor yang mendorong munculnya berbagai persoalan remaja. Karena itu, peran pendidik dinilai penting dalam membantu siswa merumuskan tujuan hidup sejak dini.

"Banyak remaja terjerumus karena belum memiliki gambaran masa depan. Tugas kita adalah membimbing mereka menyusun arah hidup yang jelas," katanya.

Muhidi juga membagikan pengalamannya saat menjadi guru. Ia mengaku kerap mengajak siswa menyusun rencana masa depan sejak awal tahun ajaran,

termasuk membuat peta jalan (roadmap) untuk mencapai tujuan tersebut.

Selain itu, ia memperkenalkan metode analisis SWOT untuk membantu siswa mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam meraih cita-cita.

"Kalau ingin menjadi dokter tetapi tidak memiliki kebiasaan belajar yang baik, tentu akan sulit tercapai. Di sinilah peran guru untuk membimbing dan membentuk kebiasaan positif," ujarnya.

Sementara itu, Kepala SMAN 2 Sumbar, Ratna Yulia, mengapresiasi kegiatan tersebut sebagai upaya meningkatkan kompetensi kepemimpinan kepala sekolah.

Menurutnya, penguatan kapasitas kepala sekolah menjadi kunci dalam mencetak sumber daya manusia unggul di tengah perubahan dunia pendidikan yang semakin cepat.

"Kepala sekolah tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga harus mampu menghadirkan inovasi dan kepemimpinan yang visioner," ujarnya.

Kegiatan bimtek yang diikuti 125 kepala sekolah dari Kabupaten Sijunjung, Kota Sawahlunto, dan Kabupaten Solok tersebut berlangsung dinamis serta memberikan wawasan baru bagi peserta dalam menghadapi tantangan pendidikan ke depan. (*)



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT



BIMTEK KEPALA SEKOLAH SE-SUMBAR: Ketua DPRD Provinsi Sumbar Muhidi membuka sekaligus menjadi narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kepala Sekolah SMA, SMK, dan SLB se-Sumatera Barat di salah satu hotel di Kota Padang, baru-baru ini.





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Padang Ekspres	SABTU 11 JULI 2026	12

Evi Yandri Lepas Wasit INKADO Sumbar Menuju Ujian Sertifikasi AKF

Padang, Padek—Pengurus Provinsi Institut Karate-Do Indonesia (INKADO) Sumatera Barat memberikan dukungan penuh kepada wasit karate Martinel Prihastuti, yang akan mengikuti Ujian Sertifikasi Wasit/Juri Asian Karate Federation (AKF) di Bangladesh pada 15–17 Juli 2026.

Dukungan tersebut ditandai dengan pelepasan resmi yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat yang juga Ketua Umum INKADO Pengurus Provinsi Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman.

Kegiatan itu turut dihadiri Ketua Harian INKADO Sumbar Sensei Ulya, Sekretaris Umum Sempai Nofrizal, serta Bendahara Umum INKADO Sumbar Yofialdi.

Martinel Prihastuti merupakan salah satu wasit karate asal Sumatera Barat yang dinilai memiliki komitmen dan dedikasi tinggi dalam mengembangkan kompetensi di bidang perwasitan. Selain aktif di dunia karate, ia juga berprofesi sebagai Guru Pendidikan Jasmani di SMA Negeri 2 Padang dan menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan.

Keikutsertaannya dalam ujian sertifikasi AKF menjadi langkah penting untuk meningkatkan kompetensi wasit karate menuju standar internasional. Sertifikasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kualitas sumber daya manusia bidang perwasitan sekaligus membuka peluang bagi wasit Indonesia untuk bertugas pada berbagai kejuaraan tingkat Asia.

Sebagai bentuk komitmen terhadap pembinaan karate di daerah, Pengurus Provinsi INKADO Sumatera Barat memberikan dukungan penuh kepada Martinel Prihastuti dengan menanggung seluruh biaya transportasi, akomodasi, serta uang saku selama mengikuti rangkaian ujian sertifikasi di Bangladesh.

Ketua Umum INKADO Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman, menyampaikan apresiasi atas semangat dan konsistensi Martinel Prihastuti dalam meningkatkan kapasitas sebagai wasit karate.

“Kami memberikan dukungan penuh dan mendoakan agar Saudari Martinel Prihastuti dapat mengikuti seluruh rangkaian ujian dengan baik serta meraih hasil terbaik. Semoga keberhasilan ini dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan pembinaan karate, khususnya dalam pengembangan sumber daya wasit di Sumatera Barat dan Indonesia,” ujar Evi Yandri.

Menurutnya, keberhasilan Martinel Prihastuti nantinya tidak hanya menjadi kebanggaan bagi INKADO Sumatera Barat, tetapi juga diharapkan mampu mengharumkan nama Sumatera Barat dan Indonesia di tingkat Asia maupun internasional.

Dukungan serupa juga disampaikan Bendahara Umum INKADO Sumbar, Yofialdi. Ia menegaskan organisasi akan terus berkomitmen

memfasilitasi kader-kader terbaik agar dapat meningkatkan kompetensi dan prestasi hingga level nasional maupun internasional.

Sementara itu, Dewan Guru INKADO Sumbar, Shihan Drs. Jaman, M.Kes., memberikan motivasi kepada Martinel Prihastuti agar menjalani seluruh tahapan ujian dengan penuh keyakinan, menjaga nama baik organisasi, serta mampu meraih hasil yang membanggakan.

Pada kesempatan yang sama, keluarga besar INKADO Sumatera Barat juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua KONI Sumatera Barat, Hamdanus, atas perhatian dan dukungannya ter-

hadap perjuangan Martinel Prihastuti. Martinel sendiri merupakan mantan karateka nasional yang pernah mengharumkan nama Indonesia dengan meraih medali emas dan perak pada ajang SEA Games di masanya.

Menurut Pengurus Provinsi INKADO Sumbar, dukungan tersebut menjadi wujud sinergi antara organisasi olahraga dan pemangku kepentingan dalam mendorong peningkatan prestasi serta pengembangan sumber daya manusia karate di Sumatera Barat.

Keberangkatan Martinel Prihastuti mengikuti sertifikasi AKF di Bangladesh menjadi kebanggaan bagi keluarga besar INKADO Sumatera Barat sekaligus diharapkan menjadi inspirasi bagi atlet, pelatih, maupun wasit karate untuk terus meningkatkan kualitas dan profesionalisme.

Pengurus Provinsi INKADO Sumatera Barat menegaskan akan terus mendukung pengembangan sumber daya manusia karate secara berkelanjutan. Menurut organisasi, kemajuan prestasi karate tidak hanya ditentukan oleh kualitas atlet dan pelatih, tetapi juga oleh perangkat pertandingan yang memiliki kompetensi, integritas, dan standar profesional sesuai ketentuan internasional. (rel)





SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KORAN

AMAN



DOKUMENTASI DPRD SUMBAR

PELEPASAN: Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman yang sekaligus Ketum INKADO Sumbar, melepas wasit Martinel Prihastuti untuk mengikuti Ujian Sertifikasi Wasit/Juri AKF di Bangladesh pada 15-17 Juli 2026.





KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Padang Ekspres	SABTU 11 JULI 2026	12

Penyusunan Ranperda Lingkungan Hidup Dimatangkan

Padang, Padek—Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama berbagai pemangku kepentingan sebagai bagian dari proses penyusunan Naskah Akademik (NA) dan Draf Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Khusus II DPRD Sumbar, beberapa waktu lalu.

FGD dihadiri Ketua dan Anggota Komisi IV DPRD Sumbar, tim perumus, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, perwakilan pemerin-

tan, pemangku kepentingan sangat penting agar substansi Ranperda tidak hanya memenuhi aspek normatif, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif di lapangan. Masukan dari pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, media, hingga organisasi masyarakat diharapkan memperkaya materi muatan regulasi.

Selain menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Ranperda tersebut juga diarahkan untuk memperkuat upaya pelestarian sumber daya alam, mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingku-

ngan, serta mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan di Sumatera Barat.

Dalam pembahasannya, berbagai perspektif lintas sektor disampaikan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan Naskah Akademik maupun Draf Ranperda. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan regulasi yang komprehensif, adaptif terhadap perkembangan kondisi lingkungan, serta selaras dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah.

Komisi IV DPRD Sumbar menegaskan komitmennya untuk menghadirkan regulasi yang implementatif dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup di Sumatera Barat. Ranperda tersebut juga diharapkan dapat memperkuat sinergi ant-

ara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan demi kepentingan generasi saat ini maupun generasi mendatang.

Melalui pembahasan yang terbuka dan partisipatif, DPRD Sumbar optimistis Ranperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan, sekaligus menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan di Provinsi Sumatera Barat. (rel)

tah kabupaten dan kota, akademisi, media massa, serta organisasi masyarakat sipil.

Forum tersebut menjadi ruang dialog untuk menghim-pun berbagai masukan, pandangan, dan rekomendasi dari berbagai kalangan guna menyempurnakan Naskah Akademik maupun Draf Ranperda. Melalui pendekatan partisipatif, regulasi yang tengah disusun diharapkan mampu menjawab kebutuhan daerah sekaligus menghadapi tantangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang semakin kompleks.

Komisi IV DPRD Sumbar menilai keterlibatan seluruh



FGD: Komisi IV DPRD Sumbar menggelar FGD penyusunan NA draf Ranperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup baru-baru ini.

DOKUMENTASI DPRD SUMBAR



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Sabtu, 11 Juli 2026 (26 Muharam 1448 H)	4

BANGUN GENERASI EMAS 2045

Ketua DPRD Sumbar Dorong Kepala Sekolah Perkuat Kepemimpinan Visioner

Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, mengajak seluruh kepala SMA dan SMK di wilayahnya untuk memperkuat kepemimpinan yang visioner, adaptif, dan inspiratif.

Langkah ini penting dalam menghadapi tantangan dunia pendidikan yang terus berkembang. Peran Penting Mencetak SDM Unggul dan Berdaya Saing.

Hal itu disampaikan Muhidi saat menjadi nara-sumber dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Kepala SMA/ SMK se-Sumatera Barat di Padang, Senin (6/7).

Dalam paparannya, Muhidi menegaskan bahwa kepala sekolah tidak sekadar berfungsi sebagai administrator pendidikan. Mereka adalah pemimpin perubahan yang harus mampu melahirkan generasi unggul, berkarakter, dan berdaya saing tinggi menuju Indonesia

Emas 2045.

"Generasi emas tidak lahir secara kebetulan. Mereka dibentuk melalui kepemimpinan yang kuat, budaya sekolah yang positif, serta

komitmen seluruh insan pendidikan untuk terus berinovasi," ujar Muhidi.

Menurutnya, tantangan pendidikan saat ini makin kompleks. Perkembangan

teknologi, digitalisasi, hingga perubahan karakter peserta didik menuntut kepala sekolah memiliki kecakapan memimpin yang mampu menggerakkan seluruh

potensi sekolah.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara sekolah, orang tua, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Sinergi ini

diperlukan agar proses pendidikan berjalan optimal dan menghasilkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas.

Muhidi berharap seluruh kepala sekolah di Sumbar mampu menjadi teladan, agen perubahan, sekaligus penggerak peningkatan mutu pendidikan di daerah masing-masing.

"Dunia pendidikan membutuhkan pemimpin yang menginspirasi, bukan sekadar mengelola administrasi. Kepala sekolah harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang inovatif, nyaman, dan berorientasi pada masa depan," tegasnya.

Melalui kegiatan Bimtek tersebut, Muhidi berharap lahir berbagai gagasan dan strategi baru untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Sumatera Barat. Dengan begitu, Sumbar dapat melahirkan generasi cerdas, berakhlak mulia, serta siap bersaing di tingkat nasional maupun global. (*)





SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPIING BERITA



**BREAKING
NEWS!**



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan Harian Lintas Mencondasakan Kehidupan Masyarakat	SABTU, 11 JULI 2026	9

HADAPI TANTANGAN PENDIDIKAN

Ketua DPRD Sumbar Dorong Kepala Sekolah Perkuat Kepemimpinan

PADANG, HALUAN- Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) harus dimulai dari penguatan kepemimpinan di lingkungan sekolah. Karena itu, kepala SMA, SMK, dan SLB dituntut tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga mampu menjadi pemimpin yang visioner, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan.

Hal itu disampaikan Muhidi saat membuka kegiatan Peningkatan Kompetensi Kepala SMA, SMK, dan SLB se-Sumatera Barat yang diikuti 125 kepala sekolah dari Kabupaten Sijunjung, Kota Sawahlunto, dan Ka-

bupaten Solok di Padang, Selasa (7/7).

Menurut Muhidi, kualitas pendidikan akan sangat ditentukan oleh kapasitas pemimpin di setiap satuan pendidikan. Ia mengingatkan bahwa bonus demografi yang akan dihadapi Indonesia harus dijawab dengan peningkatan mutu pendidikan sejak dini.

"DPRD memiliki tanggung jawab dalam mendukung lahirnya generasi yang berkualitas. Anak-anak SMA dan SMK hari ini, 20 hingga 30 tahun

mendatang akan menjadi pemimpin daerah, pemimpin bangsa, sekaligus penggerak pembangunan. Karena itu fondasi mereka harus dibangun mulai sekarang," ujarnya.

Muhidi mengajak seluruh kepala sekolah memiliki visi yang jelas dalam mengembangkan sekolah, sekaligus membangun karakter peserta didik agar mampu menghadapi tantangan masa depan.

Ia juga menekankan bahwa kepemimpinan yang efektif lahir dari kemauan untuk terus belajar, berpikir positif, beradaptasi terhadap perubahan, serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat.

Sementara itu, Kepala SMA Negeri 2 Sumatera Barat, Ratna Yulia, menilai kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat kompetensi kepala sekolah dalam menghadapi dinamika dunia pendidikan yang terus berkembang.

Menurutnya, kepala sekolah saat ini dituntut menjadi agen perubahan yang mampu menghadirkan inovasi dan menciptakan lingkungan belajar yang semakin berkualitas.

"Kegiatan ini membuka wawasan kami terhadap arah kebijakan pendidikan sekaligus menjadi motivasi untuk terus me-

ningkatkan kompetensi dan menghadirkan inovasi di sekolah," katanya.

Ratna menambahkan, materi yang disampaikan Muhidi tidak hanya membahas kebijakan pendidikan, tetapi juga memberikan penguatan mengenai kepemimpinan yang visioner dan pentingnya membangun budaya belajar di lingkungan sekolah.

Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan sebagai wadah berbagi pengalaman, memperluas wawasan, serta memperkuat kapasitas kepala sekolah

dalam meningkatkan mutu pendidikan di Sumatera Barat.

Melalui forum tersebut, para peserta juga diharapkan mampu mengimplementasikan ber-

bagai pengetahuan yang diperoleh sehingga lahir sekolah-sekolah yang lebih inovatif, adaptif, dan mampu mencetak generasi yang unggul serta berdaya saing di masa depan. (*)

**BREAKING
NEWS!**



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

KOR



Ketua DPRD Sumbar, Muhidi saat membuka kegiatan Peningkatan Kompetensi Kepala SMA, SMK, dan SLB se-Sumatera Barat



Peningkatan Kompetensi Kepala SMA, SMK, dan SLB se-Sumatera Barat



Kegiatan Peningkatan Kompetensi Kepala SMA, SMK, dan SLB se-Sumatera Barat





KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	SENIN, 13 JULI 2026	2

RANPERDA TERGANJAL DI KEMENDAGRI

KPID Sumbar Dorong Lahirnya Pergub Penyiaran Lokal

PADANG, KP - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat melakukan terobosan strategis demi mengatasi mandeknya regulasi penyiaran di tingkat daerah. Hal tersebut mengemuka saat jajaran komisioner KPID Sumbar menggelar forum silaturahmi bersama Ketua DPRD Sumbar Muhidi di rumah dinas Ketua DPRD, Jumat malam (10/7).

Dalam pertemuan tersebut, Ketua KPID Sumbar, Yusrin Tri Nanda memaparkan, usulan Ranperda Penyiaran Sumbar resmi terganjal dan tidak bisa dilanjutkan di tingkat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pihak Kemendagri menilai, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan langsung dalam mengelola urusan penyiaran, sehingga produk hukum berbentuk Perda tidak dapat diterbitkan.

Sebagai jalan keluar, KPID Sumbar mendorong lahirnya Peraturan Gubernur (Pergub) Penyiaran sebagai payung hukum alternatif untuk memayungi operasional TV dan radio lokal di

ranah Minang.

Usulan tersebut mendapat respons positif dari Ketua DPRD Sumbar Muhidi. Ia menegaskan komitmennya untuk melakukan pembahasan mendalam guna melahirkan regulasi penyiaran lokal yang diselaraskan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumbar.

Di samping persoalan regulasi, pertemuan ini juga mematangkan sinergi dalam penguatan sumber daya manusia melalui gerakan melek literasi media yang menysar kelompok remaja dan ibu rumah tangga.

Kendati diterpa keterbatasan anggaran operasional yang dilaporkan kosong hingga Oktober 2026 mendatang, jajaran komisioner yang turut dihadiri Nofal Wiska, Riki Chandra, Yogi Afriandi, dan Oldsan Bayu Pradipta ini memastikan capaian 100 hari kerja pertama tetap berjalan progresif lewat kolaborasi bersama berbagai mitra strategis dan sekolah-sekolah. (fai)



KETUA KPID Sumbar Yusrin Tri Nanda (kiri) berdiskusi serius dengan Ketua DPRD Sumbar Muhidi (kanan), dalam pertemuan silaturahmi di Rumah Dinas Ketua DPRD Sumbar, Padang, Jumat malam (10/7).



KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	SENIN, 13 JULI 2026	2

Evi Yandri Gelar Festival Sipak Rago se-Sumbar Kelima



WAKIL Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman, memberikan sambutan saat membuka Festival Sipak Rago di Gedung Rohana Kudus, Kota Padang, Sabtu (11/7).

PADANG, KP - Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman, kembali menggelar Festival Sipak Rago se-Sumbar sebagai ikhtiar melestarikan permainan tradisional anak nagari yang sarat nilai sejarah. Pergelaran yang memperebutkan Piala Bergilir Evi Yandri ini dipusatkan di Gedung Rohana Kudus, Kota Padang, Sabtu-Minggu (11-12/7).

Sebanyak 28 tim perwakilan dari berbagai kabupaten dan kota se-Sumbar ikut ambil bagian dalam kompetisi yang mengusung tema 'Lestari-kan Budaya dengan Permainan Anak Nagari Sipak Rago' ini.

Evi Yandri mengungkapkan, ajang tahun ini menandai pelaksanaan kelima kalinya yang difasilitasi penuh oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui dana pokok-pokok pikiran (pokir) miliknya, setelah konsisten dirintis dengan dana swadaya sejak tahun 2015 silam.

Menurutnya, sipak rago bukan sekadar permainan tradisional biasa, melainkan warisan budaya yang telah sah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Indonesia.

"Jika olahraga sepak takraw berorientasi pa

da kompetisi untuk saling menjatuhkan lawan, sipak rago justru sebaliknya. Filosofi dasarnya mengajarkan bagaimana menjaga bola tetap bertahan di udara selama mungkin melalui kerja sama, kekompakan, gotong royong, dan ketangkasan antarpemain," terang Evi Yandri saat membuka acara.

Di samping bernilai filosofis tinggi, sipak rago memiliki rekam jejak historis yang mendalam sebagai 'media terselubung' para pemuda Minangkabau untuk melatih ketangkasan fisik dan gerakan silat di tengah ketatnya larangan bela diri pada masa penjajahan Belanda.

Langkah pelestarian ini mendapat apresiasi tinggi dari Pemerintah Provinsi Sumbar melalui Kepala Museum Adityawarman, Tuti Alawiyah yang mewakili Kepala Dinas Kebudayaan Sumbar. Pihaknya memuji konsistensi DPRD Sumbar dalam pemajuan kebudayaan lokal.

Senada, Camat Kuranji Rozaldi Rosman menilai festival dengan total hadiah Rp29,5 juta ini menjadi ruang edukasi krusial bagi generasi muda agar tetap mengenali dan menjiwai identitas adat di tengah gempuran modernisasi zaman. (fai)





KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	SENIN, 13 JULI 2026	3

TARGET KONSTRUKSI 2028

DPRD Sumbar Dorong Pembebasan Lahan Taplau Dipercepat

PADANG, KP - Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Iqra Chissa Putra, mendorong percepatan pembebasan lahan untuk mendukung proyek penataan kawasan Pantai Padang (Taplau). Penyelesaian persoalan tanah dinilai menjadi kunci utama agar pembangunan fisik kawasan wisata tersebut dapat dimulai pada 2028.

Hal itu disampaikan Iqra saat melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah ATR/BPN Sumbar, baru-baru ini, guna membahas kendala teknis yang masih menghambat proses pengadaan lahan di kawasan Jalan Samudera dan area belakang Hotel Pangeran, Kota Padang.

Menurut Iqra, sinergi antara pemerintah daerah dan ATR/BPN sangat penting untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan administrasi maupun teknis di lapangan. "Semangat kita sama, yaitu mempercantik dan memperindah Kota Padang. Itu tujuan utama yang ingin kita capai bersama," ujarnya.

Ia menjelaskan, terdapat dua titik utama yang menjadi fokus penyelesaian, yakni ruas Jalan Samudera di kawasan Hang Tuah serta lahan di belakang Hotel Pangeran. Untuk kawasan belakang hotel, proses masih memerlukan kajian akademis terkait mekanisme pergantian tanah, sehingga harus dilakukan secara cermat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Kami meminta solusi dan langkah percepatan bersama. Untuk persoalan di belakang

Hotel Pangeran, kita ingin semua berjalan sesuai aturan yang berlaku," katanya.

Sementara itu, untuk pembebasan lahan di ruas Hang Tuah, Iqra menyebutkan prosesnya mulai menunjukkan perkembangan positif. Dalam waktu dekat, pemerintah bersama instansi terkait akan membentuk tim percepatan guna menyelesaikan kendala yang masih tersisa. "Alhamdulillah untuk ruas Hang Tuah sudah mulai ada titik terang. Yang penting sekarang ada progres dan jangan sampai proses ini terhenti," jelasnya.

Iqra menegaskan, penyelesaian pembebasan lahan merupakan tahapan paling krusial sebelum proyek penataan kawasan dapat memasuki tahap konstruksi. Ia optimistis, jika proses tersebut dapat segera dituntaskan, pembangunan fisik Taplau bisa dimulai pada 2028. "Kami optimistis pembangunan dapat dimulai pada 2028. Ini tentu membutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah provinsi dan pemerintah kota," ujarnya.

Ia juga mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Sumbar, Pemerintah Kota Padang, ATR/BPN, serta Dinas PUPR duduk bersama dalam satu forum koordinasi untuk menyamakan persepsi dan mempercepat penyelesaian persoalan yang ada. "Koordinasi ini sangat krusial agar proyek penataan kota berjalan lancar. Ini merupakan komitmen bersama untuk meningkatkan infrastruktur sekaligus mempercantik Kota Padang," tutupnya. (fai)



WAKIL Ketua DPRD Provinsi Sumbar, Iqra Chissa Putra saat melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah ATR/BPN Sumbar, baru-baru ini. Pertemuan itu membahas kendala teknis yang masih menghambat proses pengadaan lahan di kawasan Jalan Samudera dan area belakang Hotel Pangeran, Kota Padang.



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Senin, 13 Juli 2026 (28 Muharam 1448 H)	2

TARGET PEMBANGUNAN FISIK 2028

Iqra Chissa Dorong Percepatan Pembebasan Lahan Taplau

Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, M.Iqra Chissa Putra, mendorong percepatan pembebasan lahan untuk penataan kawasan Pantai Padang (Taplau). Fokus utama penataan berada di ruas Jalan Samudera dan area belakang Hotel Pangeran Beach, Kota Padang.

Komitmen tersebut disampaikan Iqra saat berkoordinasi dengan Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sumatera Barat, baru-baru ini. Pertemuan tersebut bertujuan mengurai kendala teknis pengadaan tanah di dua lokasi tersebut.

Menurut Iqra, koordinasi lintas instansi sangat krusial agar penataan kawasan wisata dan infrastruktur ibu kota provinsi ini berjalan sesuai rencana.

"Semangat kita sama, yaitu mempercantik Kota Padang. Itu tujuan utama yang ingin kita capai bersama," ujar Iqra.

Ia menjelaskan, pembebasan lahan berfokus pada kawasan Jalan Samudera di ruas Hang Tuah dan area belakang Hotel Pangeran Beach.

Untuk area belakang Hotel Pangeran Beach, Iqra menyebutkan perlunya telaah lebih lanjut terhadap kajian akademis terkait mekanisme ganti rugi tanah. Seluruh proses wajib mengacu pada regulasi

yang berlaku.

"Kami meminta solusi dan langkah percepatan bersama. Untuk persoalan di belakang Hotel Pangeran, kami mendapat informasi adanya kajian akademis terkait pergantian tanah. Tentu kita ingin semua berjalan sesuai aturan," katanya.

Sementara untuk ruas Hang Tuah, Iqra menilai sudah ada perkembangan positif. Pemerintah daerah bersama instansi terkait berencana membentuk tim khusus guna mempercepat penyelesaian kendala administrasi dan teknis.

"Alhamdulillah, untuk ruas Hang Tuah sudah mulai ada titik terang. Yang penting sekarang ada progres dan jangan sampai mandek. Dalam waktu dekat dibentuk tim percepatan," jelas Iqra.

Ia menegaskan, ganti rugi lahan menjadi kunci keberhasilan proyek. Kecepatan penyelesaian lahan akan menentukan dimulainya tahapan konstruksi. Iqra pun mengharapkan dukungan penuh Pemprov Sumbar, Pemkot Padang, ATR/BPN, dan seluruh pemangku kepentingan.

"Kami optimistis jika per-

soalan lahan selesai, pembangunan fisik dapat dimulai pada 2028. Saya yakin program ini didukung Gubernur dan Wali Kota demi kemajuan Padang," tambahnya.

Iqra juga mengusulkan agar Dinas PUPR Sumbar dan Pemkot Padang duduk bersama dalam satu forum koordinasi untuk menyamakan persepsi.

"Koordinasi ini krusial agar proyek berjalan lancar. Ini wujud komitmen bersama untuk meningkatkan infrastruktur dan mempercantik Kota Padang," pungkasnya.

(401)





SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

KOR



Wakil Ketua DPRD Sumbar, M. Iqra Chissa Putra saat saat berkoordinasi dengan Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sumatera Barat, baru-baru ini. (ist)





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Senin, 13 Juli 2026 (28 Muharam 1448 H)	12

LESTARIKAN BUDAYA MINANGKABAU

Festival Sipak Rago Piala Bergilir Evi Yandri Kembali Digelar

Upaya melestarikan warisan tradisi masyarakat Minangkabau terus digalakkan. Festival Sipak Rago se-Sumatera Barat yang memperebutkan Piala Bergilir Wakil Ketua DPRD Sumbang, Evi Yandri Rajo Budiman, kembali digelar pada Sabtu-Minggu (11-12/7).

Sebanyak 28 tim dari berbagai daerah turut ambil bagian dalam festival yang mengusung tema "Lestarikan Budaya dengan Permainan Anak Nagari Sipak Rago" ini. Acara dibuka langsung oleh Evi Yandri Rajo Budiman di Gedung Rohana Kudus, Kota Padang, Sabtu (11/7).

Penyelenggaraan tahun 2026 merupakan kali kelima festival ini digelar menggunakan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui dana pokok pikiran (pokir) Evi Yandri.

"Sebenarnya sejak 2015 sudah kita gelar dengan dana seadanya. Namun, dengan sokongan APBD, ini menjadi tahun kelima pelaksanaannya secara resmi," ujar Evi Yandri saat membuka festival.

Ia menekankan pentingnya

menjaga eksistensi sipak rago yang telah diakui sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTb) secara nasional sejak beberapa tahun lalu agar tidak punah dan tetap diwariskan ke generasi muda.

Evi menjelaskan bahwa sipak rago merupakan cikal bakal sepak takraw, tetapi memiliki filosofi permainan yang sangat berbeda. Berbeda dengan sepak takraw yang mengutamakan kompetisi untuk mengalahkan lawan, sipak

rago justru menonjolkan kerja sama dan kolaborasi antarpeMAIN.

"Jika sepak takraw dimainkan berhadapan untuk saling mengalahkan, sipak rago justru menuntut kerja sama agar bola tetap bertahan di udara selama mungkin. Di sini tercermin nilai kekompakan, ketangkasan, gotong royong, dan tidak ada rasa ingin balas dendam," jelasnya.

Nilai luhur tersebut mengajarkan setiap pemain untuk selalu memberikan umpan terbaik kepada rekannya, meskipun mereka menerima bola dalam posisi yang sulit atau kurang ideal.

Selain nilai budaya, sipak rago memiliki catatan sejarah yang unik. Pada masa penjajahan Belanda, permainan ini menjadi kedok bagi pemuda Minangkabau untuk melatih ketangkasan fisik dan bela diri secara sembunyi-sembunyi.

"Dulu Belanda melarang orang Minang latihan bela diri. Melalui permainan ini mereka terkecoh, dikira kita sekadar bermain bola, padahal sekaligus berlatih bela diri (silat),"

ungkap Evi.

Upaya pelestarian ini mendapat apresiasi positif dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kepala Dinas Kebudayaan Sumbang yang diwakili Kepala Museum Adityawarman, Tuti Alawiyah, menyatakan sipak rago bukan sekadar olahraga tradisional, melainkan identitas budaya yang kaya akan nilai sejarah, sportivitas, dan disiplin.

"Penyelenggaraan festival ini

sangat penting agar permainan tradisional tetap dikenal dan diminati generasi muda," tutur Tuti. Pihaknya juga berterima kasih atas komitmen pengalokasian dana pokir dari DPRD untuk pemajuan kebudayaan lokal.

Apresiasi senada disampaikan Camat Kuranji, Rozaldi Rosman. Ia menilai festival ini memberikan ruang representatif bagi anak nagari untuk menjaga nilai-nilai adat Minangkabau di tengah gempuran modernisasi.

Festival Sipak Rago se-Sumatera Barat ini memperebutkan total hadiah uang tunai sebesar Rp29,5 juta. Prosesi pembukaan acara ditandai dengan tendangan bola pertama oleh Evi Yandri Rajo Budiman, didampingi oleh unsur Forkopimda, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Babinsa, serta para tamu undangan. (*)



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT



REAKING
NEWS!



KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	SENIN, 13 JULI 2026	2

Wakil Ketua DPRD Sumbar Dorong Percepatan Penataan Kawasan Pantai Padang

PADANG, HALUAN — Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Iqra Chissa Putra, mendorong percepatan penyelesaian pembebasan lahan untuk mendukung proyek penataan kawasan Pantai Padang (Taplau), khususnya di ruas Jalan Samudera dan area belakang Hotel Pangeran, Kota Padang.

Komitmen tersebut disampaikan Iqra saat melakukan kunjungan dan koordinasi dengan Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sumatera Barat pada Kamis, (9/7/2026), guna menindaklanjuti berbagai kendala teknis yang masih menghambat proses pengadaan tanah di lokasi tersebut.

Menurut Iqra, koordinasi lintas instansi sangat penting untuk mengurai berbagai persoalan yang muncul di lapangan agar program penataan kawasan wisata dan infrastruktur Kota Padang dapat berjalan sesuai rencana.

"Semangat kita sama, yaitu mempercantik dan memperindah Kota Padang. Itu tujuan utama yang ingin kita capai bersama," kata Iqra dalam pertemuan tersebut.

Ia menjelaskan, terdapat dua titik yang menjadi perhatian utama dalam proses pembebasan lahan, yakni kawasan Jalan Samudera di ruas Hang Tuah serta area di belakang Hotel Pangeran.

Untuk lokasi belakang Hotel Pangeran, Iqra mengungkapkan adanya kajian akademis terkait mekanisme pergantian

tanah yang perlu ditelaah lebih lanjut. Karena itu, seluruh proses harus mengacu pada kajian yang komprehensif dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Kami meminta solusi dan langkah percepatan bersama. Untuk persoalan di belakang Hotel Pangeran, kami juga mendapat informasi adanya kajian akademis terkait pergantian tanah. Tentu kita ingin semua berjalan sesuai aturan yang berlaku," ujarnya.

Sementara itu, untuk persoalan lahan di ruas Hang Tuah, Iqra menyebut sudah mulai terlihat perkembangan positif. Pemerintah daerah bersama pihak terkait juga berencana membentuk tim percepatan guna mempercepat penyelesaian berbagai kendala administrasi dan teknis.

"Alhamdulillah untuk ruas Hang Tuah sudah mulai ada titik terang. Yang penting sekarang ada progres dan jangan sampai proses ini stuck. Dalam waktu dekat akan dibentuk tim percepatan dengan melibatkan pihak-pihak ter-

kait," jelasnya.

Iqra menegaskan bahwa penyelesaian persoalan ganti rugi lahan menjadi faktor kunci keberhasilan proyek penataan kawasan tersebut. Semakin cepat persoalan lahan diselesaikan, semakin cepat pula tahapan pembangunan dapat dilaksanakan.

Ia berharap dukungan pe-

nun dari Pemerintah Provinsi Sumbar, Pemerintah Kota Padang, ATR/BPN, serta seluruh pemangku kepentingan agar proses percepatan dapat berjalan efektif.

"Kami optimistis apabila persoalan lahan bisa segera diselesaikan, pembangunan fisik dapat mulai dilaksanakan pada tahun 2028. Saya yakin ini akan

mendapat dukungan dari Pak Gubernur maupun Pak Wali Kota demi kemajuan Kota Padang," katanya.

Iqra juga mengusulkan agar seluruh pihak terkait, termasuk Dinas PUPR Provinsi Sumbar dan Pemerintah Kota Padang, duduk bersama dalam satu forum koordinasi untuk menyamakan persepsi dan men-



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

cari solusi terbaik terhadap seluruh kendala yang masih tersisa.

“Koordinasi ini sangat krusial agar proyek penataan kota berjalan lancar. Ini merupakan wujud komitmen bersama untuk meningkatkan infrastruktur dan mempercantik Kota Padang tercinta,” tukasnya. (h/len)

HARI/TANGGAL	HALAMAN



LAKUKAN KOORDINASI— Wakil Ketua DPRD Sumbar, Iqra Chissa Putra saat melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sumatera Barat terkait percepatan penyelesaian pembebasan lahan untuk mendukung proyek penataan kawasan Pantai Padang. IST





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	SENIN, 13 JULI 2026	2

Ketua Fraksi Gerindra Salurkan Bantuan Rp52 Juta untuk SMPIT Cahaya Madani

PASAMAN, HALUAN — Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang juga Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbang, Khairuddin Simanjuntak, menghadiri kegiatan Penyambutan Siswa Baru Angkatan VI sekaligus Seminar Parenting SMPIT Cahaya Madani Pasaman, Minggu (12/7).

Kehadiran Khairuddin disambut hangat oleh pengurus Yayasan Al-Madani, majelis guru, orang tua siswa, serta tamu undangan yang memadati lokasi kegiatan. Acara tersebut menjadi momentum mempercepat sinergi antara sekolah, orang tua, dan pemerintah dalam membangun pendidikan yang berkualitas.

Pada kesempatan itu, Khairuddin menyerahkan bantuan dana Pokok Pikiran (Pokir) sebesar Rp50 juta yang dipertukarkan bagi pembangunan masjid di lingkungan SMPIT Cahaya Madani.

Selain bantuan Pokir, Khairuddin juga menyerahkan bantuan pribadi sebesar Rp2 juta sebagai bentuk kepedulian terhadap kemajuan pendidikan dan pengembangan karakter peserta didik di sekolah tersebut.

Dalam sambutannya, Khairuddin mengatakan pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang harus didukung dengan fasilitas yang memadai, termasuk tersedianya sarana ibadah sebagai pusat pembinaan karakter dan ahlak peserta didik.

Menurutnya, masjid bukan hanya tempat beribadah, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran nilai-nilai keislaman, kedisiplinan, serta pembentukan generasi yang beriman dan berakhlak mulia.

La berharap bantuan yang diberikan dapat mempercepat pembangunan masjid sehingga dapat segera dimanfaatkan oleh siswa, guru, maupun masyarakat sekitar.

Khairuddin juga mengapresiasi pelaksanaan Seminar Parenting yang mengangkat tema "Melindungi Anak Remaja Dari Perlaku Buruk dan Menyimpang". Menurutnya, keterlibatan orang tua dalam pendidikan merupakan kunci utama dalam membentuk generasi yang tangguh menghadapi tantangan zaman.

Sementara itu, Ketua KONI Kabupaten Pasaman, Ade Herman, yang turut mendampingi



ANGGOTA DPRD Provinsi Sumatera Barat yang juga Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbang, Khairuddin Simanjuntak, menghadiri kegiatan Penyambutan Siswa Baru Angkatan VI sekaligus Seminar Parenting SMPIT Cahaya Madani Pasaman, Minggu (12/7). IST

Khairuddin Simanjuntak dalam kegiatan tersebut, menyampaikan apresiasi terhadap perhatian Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbang itu terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Pasaman.

Ade Herman mengatakan, kepedulian Khairuddin tidak hanya terlihat dalam bidang olahraga sebagai Ketua Pengurus Provinsi FORKI Sumatera Barat, tetapi juga melalui dukungan nyata

terhadap pembangunan sarana pendidikan dan keagamaan.

"Beliau selalu memberikan perhatian terhadap kemajuan daerah, baik di sektor olahraga, pendidikan maupun pembinaan generasi muda. Bantuan pembangunan masjid ini menjadi bukti nyata komitmen beliau dalam mendukung lahirnya generasi yang unggul dan berkarakter," ujar Ade Herman. (h/kie)



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan Martua Liman Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat	SELASA, 14 JULI 2026	6

CEGAH KENAKALAN REMAJA

Ketua DPRD Sumbar Minta Sekolah Ajarkan Siswa Susun Roadmap Masa Depan

PADANG, HALUAN — Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menilai maraknya kenakalan remaja tidak terlepas dari minimnya arah dan tujuan hidup yang dimiliki sebagian generasi muda.

Karena itu, ia meminta kepala SMA, SMK, dan SLB di Sumbar tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga membimbing siswa menyusun *roadmap* atau peta jalan masa depan sejak di bangku sekolah.

Pesan tersebut disampaikan Muhidi saat memberikan arahan pada Bimbingan Teknis (Bimtek) Kepala SMA, SMK, dan SLB se-Sumbar di Padang, baru-baru ini.

"Kepemimpinan itu adalah visi. Karena itu saya bertanya kepada para kepala sekolah, berapa lama masa jabatan Anda? Empat tahun. Artinya, Bapak dan Ibu harus memiliki proyeksi yang jelas tentang seperti apa sekolah yang dipimpin empat tahun ke depan," ujarnya.

Muhidi mengatakan, setiap pemimpin harus memiliki arah yang jelas. Hal yang sama juga harus ditanamkan kepada peserta didik agar mereka memiliki cita-cita dan target hidup yang terukur.

Mengutip sebuah teori kepemimpinan, Muhidi menyebut orang yang tidak merencanakan masa depan pada hakikatnya sedang merencanakan kegagalan sendiri.

"Persoalan remaja yang kita hadapi hari ini salah satunya karena banyak anak yang belum memiliki visi hidup. Mereka tidak

tahu ingin menjadi apa dan hendak ke mana. Di sinilah peran guru membimbing mereka menyusun masa depan," katanya.

Politisi PKS itu mengaku telah menerapkan pendekatan

tersebut sejak masih menjadi guru. Pada awal tahun ajaran, khususnya saat mengajar siswa kelas III, ia tidak langsung menyampaikan materi pelajaran, tetapi lebih dahulu mengajak siswa merancang masa depan mereka.

"Saya meminta setiap siswa menuliskan tujuan setelah lulus, apakah ingin kuliah atau memiliki cita-cita tertentu. Dari situ kami berdiskusi, lalu saya mengajarkan bagaimana menyusun *roadmap* untuk mencapai tujuan tersebut," tuturnya.

Menurut Muhidi, penyusunan peta jalan masa depan perlu dibarengi dengan kemampuan mengenali potensi diri. Karena itu, ia juga mengenalkan analisis SWOT kepada para siswa untuk memetakan kekuatan (*strengths*), kelemahan

(*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*).

"Kalau seorang anak bercita-cita menjadi dokter tetapi malas membaca, tentu cita-cita itu sulit tercapai. Tugas guru adalah membantu mereka mengenali kelemahan, memperbaikinya, dan membangun kebiasaan yang mendukung tercapainya tujuan hidup," ujarnya.

Sementara itu, Kepala SMAN 2 Sumatera Barat, Ratna Yulia, mengapresiasi inisiatif Ketua DPRD Sumbar yang menggelar forum peningkatan kompetensi kepala sekolah. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi ruang bagi para kepala sekolah untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan sekaligus memperluas wawasan menghadapi tantangan pendidikan yang

terus berkembang.

"Penguatan kompetensi kepala sekolah menjadi kunci dalam mencetak sumber daya manusia unggul. Kepala sekolah tidak cukup hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga harus menjadi pemimpin yang mampu melahirkan inovasi di sekolah," katanya.

Bimtek yang diikuti 125 kepala SMA, SMK, dan SLB dari Kabupaten Sijunjung, Kota Sawahlunto, dan Kabupaten Solok itu berlangsung dinamis. Ratna menilai materi yang disampaikan Muhidi tidak hanya memperkuat pemahaman terhadap arah kebijakan pendidikan, tetapi juga memotivasi para kepala sekolah menjadi pemimpin yang visioner di satuan pendidikan masing-masing.



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT



BERFOTO bersama



PESERTA kegiatan Bimtek



PESERTA yang mengikuti Bimtek

**BREAKING
NEWS!**



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	SELASA, 14 JULI 2026	2

KEJUARNAS GRASSTRACK PASBAR BERAKHIR Evi Yandri Dorong Lahirnya Pembalap Berprestasi

PASBAR, HALUAN — Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman, menutup Kejuaraan Nasional (Kejuarnas) Grasstrack Peridon Siap Maju Grand Final Region di Sumatera 2026 di Sirkuit Permanen Peridon Siap Maju, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), Minggu (12/7).

Kejuaraan yang berlangsung selama dua hari, 11-12 Juli 2026, itu diikuti puluhan tim dari berbagai provinsi di Pulau Sumatera. Penuhunan turut dihadiri anggota DPRD Sumbar, Ade Putra dan Hanapi Lubis, sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan olahraga otomotif.

Evi Yandri mengapresiasi penyelenggaraan kejuaraan yang dinilainya bertelan sukses berkat kerja sama panitia, sponsor, dan seluruh pihak yang terlibat. Menurutnya, ajang tersebut tidak hanya

menjadi arena kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan bagi pembalap muda.

"Kami berharap ajang ini mampu melahirkan pembalap-pembalap berprestasi yang dapat membawa nama daerah hingga ke tingkat nasional maupun internasional. Semoga kejuaraan seperti ini terus berlanjut sebagai ruang positif bagi generasi muda untuk mengembangkan bakatnya," ujarnya.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta dan tim yang datang dari berbagai daerah di Sumatera. Menurutnya, kehadiran mereka menjadi bagian penting dalam kesuksesan pelaksanaan Kejuarnas di Pasaman Barat.

"Terima kasih kepada seluruh tim dan pendamping yang telah datang. Semoga pelayanan dan sambutan yang diberikan memberikan kesan baik, dan kami berharap dapat kembali menyambut kehadiran mereka pada ajang-ajang

berikutnya di Sumatera Barat, khususnya di Koto Balingka," katanya.

Evi Yandri menilai penyelenggaraan kejuaraan otomotif berskala nasional juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Aktivitas sport tourism, kata dia, mampu menggerakkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perhotelan, transportasi, hingga sektor pariwisata di Pasaman Barat.

Antusias ribuan penonton yang memadati Sirkuit Permanen Peridon Siap Maju selama akhir pekan menjadi bukti tingginya minat masyarakat terhadap olahraga otomotif. Keberhasilan penyelenggaraan Kejuarnas tersebut sekaligus memperkuat posisi Kabupaten Pasaman Barat sebagai salah satu daerah yang siap menjadi tuan rumah berbagai ajang otomotif berskala nasional. (h/len)

**BREAKING
NEWS!**



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan Harian Umum Memperdakan Kehidupan Masyarakat	SELASA, 14 JULI 2026	2

Sekretariat DPRD Sumbar Perkuat Budaya Kerja Disiplin

PADANG, HALUAN — Disiplin kerja dinilai menjadi fondasi utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung optimalisasi kinerja lembaga legislatif.

Karena itu, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat terus menanamkan budaya kerja yang disiplin dan profesional melalui pelaksanaan apel pagi rutin.

Komitmen tersebut terlihat dalam apel pagi yang digelar di halaman parkir Kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat, Senin (13/7). Kegiatan itu dipimpin Sekretaris DPRD Sumbar, Maifrizon, serta diikuti seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Sumbar.

Bagi Sekretariat DPRD Sumbar, apel pagi tidak sekadar menjadi agenda rutin, melainkan sarana memperkuat koordinasi, menyatukan langkah, sekaligus membangun semangat kerja seluruh pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Dalam arahnya, Maifrizon menegaskan bahwa budaya disiplin harus menjadi karakter setiap aparatur. Menurutnya, pelayanan publik yang berkualitas hanya dapat diwujudkan melalui aparatur yang memiliki integritas, tanggung jawab, dan

komitmen terhadap tugas.

"Apel pagi menjadi momentum untuk memperkuat disiplin, koordinasi, serta komitmen bersama dalam memberikan pelayanan terbaik demi mendukung kinerja DPRD Provinsi Sumatera Barat," ujarnya.

Ia mengatakan, sinergi antarseluruh pegawai perlu terus diperkuat agar setiap tugas kesekretariatan dapat berjalan efektif, sehingga mampu memberikan dukungan maksimal terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD Sumbar.

Pelaksanaan apel berlangsung tertib dan diikuti dengan penuh khidmat oleh seluruh peserta. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi pengingat pentingnya menjaga etos kerja, kekompakan, serta profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai pelayan publik.

Melalui kegiatan rutin tersebut, Sekretariat DPRD Sumbar berharap budaya kerja yang disiplin dan berintegritas semakin mengakar di lingkungan kerja. Dengan demikian, kualitas pelayanan kepada masyarakat maupun dukungan administrasi terhadap DPRD dapat terus ditingkatkan sejalan dengan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan profesional. (h/len)



Apel pagi yang diikuti pegawai di Sekretariat DPRD Sumbar. IST

**BREAKING
NEWS!**



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	SELASA, 14 JULI 2026	2

DPRD Sumbar Dukung Pasaman Barat Jadi Tuan Rumah Porprov 2026

PASBAR, HALUAN- Anggota DPRD Sumbar, Ade Putra, menyatakan dukungannya terhadap kesiapan Kabupaten Pasaman Barat menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumbar 2026.

Menurutnya, keberadaan Sirkuit Peridon Siap Maju di Nagari Pamatang Panjang, Kecamatan Koto Balingka, menjadi modal penting dalam menyukseskan ajang olahraga terbesar di Sumatera Barat tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Ade Putra saat menghadiri Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Grasstrack Peridon Siap Maju Grand Final Regional 1A Sumatera 2026 yang digelar di Sirkuit Peridon Siap Maju, Sabtu (11/7).

Ade Putra menilai penyelenggaraan kejuaraan grasstrack tersebut membuktikan bahwa Pasaman Barat memiliki fasilitas olahraga otomotif yang memadai dan siap digunakan untuk event berskala besar, termasuk Porprov Sumbar 2026.

"Keberadaan Sirkuit Peridon Siap Maju merupakan aset penting bagi Pasaman Barat. Sirkuit ini tidak hanya menjadi sarana pembinaan atlet otomotif, tetapi juga menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat dan minat mereka," kata Ade Putra.

Menurutnya, kehadiran sirkuit tersebut juga memberikan dampak sosial yang positif. Selain mendukung pembinaan olahraga, sirkuit dapat menjadi solusi untuk menekan aksi balap liar yang kerap melibatkan kalangan remaja.

Ade Putra bahkan menyebut Sirkuit Peridon Siap Maju sebagai salah satu sirkuit terbaik yang dimiliki Sumatera Barat saat ini. Karena itu, ia menilai fasilitas tersebut sangat layak menjadi venue cabang olahraga motocross pada Porprov Sumbar 2026.

"Kami mendukung penuh pembangunan olahraga di Pasaman Barat. Kehadiran sirkuit ini menjadi aset berharga bagi daerah dan sangat layak

digunakan sebagai venue Porprov Sumbar 2026," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Pasaman Barat, Doddy San Ismail, menegaskan pemerintah daerah siap mendukung seluruh persiapan pelaksanaan Porprov Sumbar 2026. Ia menyebut Sirkuit Peridon Siap Maju akan menjadi salah satu venue yang digunakan untuk cabang olahraga motocross dan arung jeram.

"Insya Allah pada Oktober 2026 Kabupaten Pasaman Barat menjadi tuan rumah Porprov Sumbar. Salah satu cabang yang akan dipertandingkan adalah motocross dan arung jeram di Sirkuit Peridon Siap Maju ini. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat siap mendukung dan bersinergi agar pelaksanaannya berjalan sukses," ujar Doddy.

Selain menyiapkan sarana dan prasarana, Pemkab Pasaman Barat juga terus melakukan pembinaan atlet yang akan berlaga pada Porprov mendatang. Pemerintah daerah berharap para atlet mampu meraih prestasi terbaik sekaligus mengharumkan nama Pasaman Barat di tingkat provinsi.

Doddy menambahkan, pelaksanaan kejuaraan grasstrack tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga berperan dalam mencetak atlet-atlet potensial serta membangun aktivitas positif bagi generasi muda sehingga terhindar dari balap liar, penyalahgunaan narkoba, dan berbagai perilaku negatif lainnya.

Dengan dukungan berbagai pihak, termasuk DPRD Sumbar, Pasaman Barat optimistis mampu menjadi tuan rumah yang sukses sekaligus melahirkan prestasi membanggakan pada Porprov Sumbar 2026 mendatang. (h/len)

**BREAKING
NEWS!**



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA



HADIRI KEGIATAN—Anggota DPRD Sumbar, Ade Putra saat menghadiri Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Grasstrack Peridon Siap Maju Grand Final Regional 1A Sumatera 2026 yang digelar di Sirkuit Peridon Siap Maju, Sabtu (11/7). IST





SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Rakyat Sumbar SELASA, 14 JULI 2026		9

Tingkatkan Koordinasi dan Pelayanan Publik

Padang, Rakyat Sumbar — Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat menggelar apel pagi rutin yang berlangsung khidmat dan penuh semangat di Lapangan Parkir Kantor DPRD Provinsi Sumatra Barat, Senin (13/7).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat Maifrizon, diikuti seluruh aparatur sipil negara (ASN), serta pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Sumbar.

Apel pagi rutin ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kedisiplinan dan meningkatkan koordinasi antarpegawai dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi sarana untuk menyatukan komitmen seluruh jajaran



SEKRETARIS DPRD Provinsi Sumatera Barat Maifrizon, saat apel pagi di Lapangan Parkir Kantor DPRD Provinsi Sumatra Barat, Senin (13/7).

sekretariat dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Dalam pelaksanaannya, apel

berlangsung tertib dan penuh semangat. Seluruh peserta mengikuti rangkaian kegiatan dengan khidmat sebagai bentuk tanggung jawab dan dedikasi terhadap tugas

yang diemban.

Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat Maifrizon menegaskan bahwa apel pagi bukan sekadar rutinitas, tetapi juga momentum penting untuk membangun budaya kerja yang disiplin, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.

"Apel pagi menjadi momentum untuk memperkuat disiplin, koordinasi, serta komitmen bersama dalam memberikan pelayanan terbaik demi mendukung kinerja DPRD Provinsi Sumatera Barat," ujar Maifrizon.

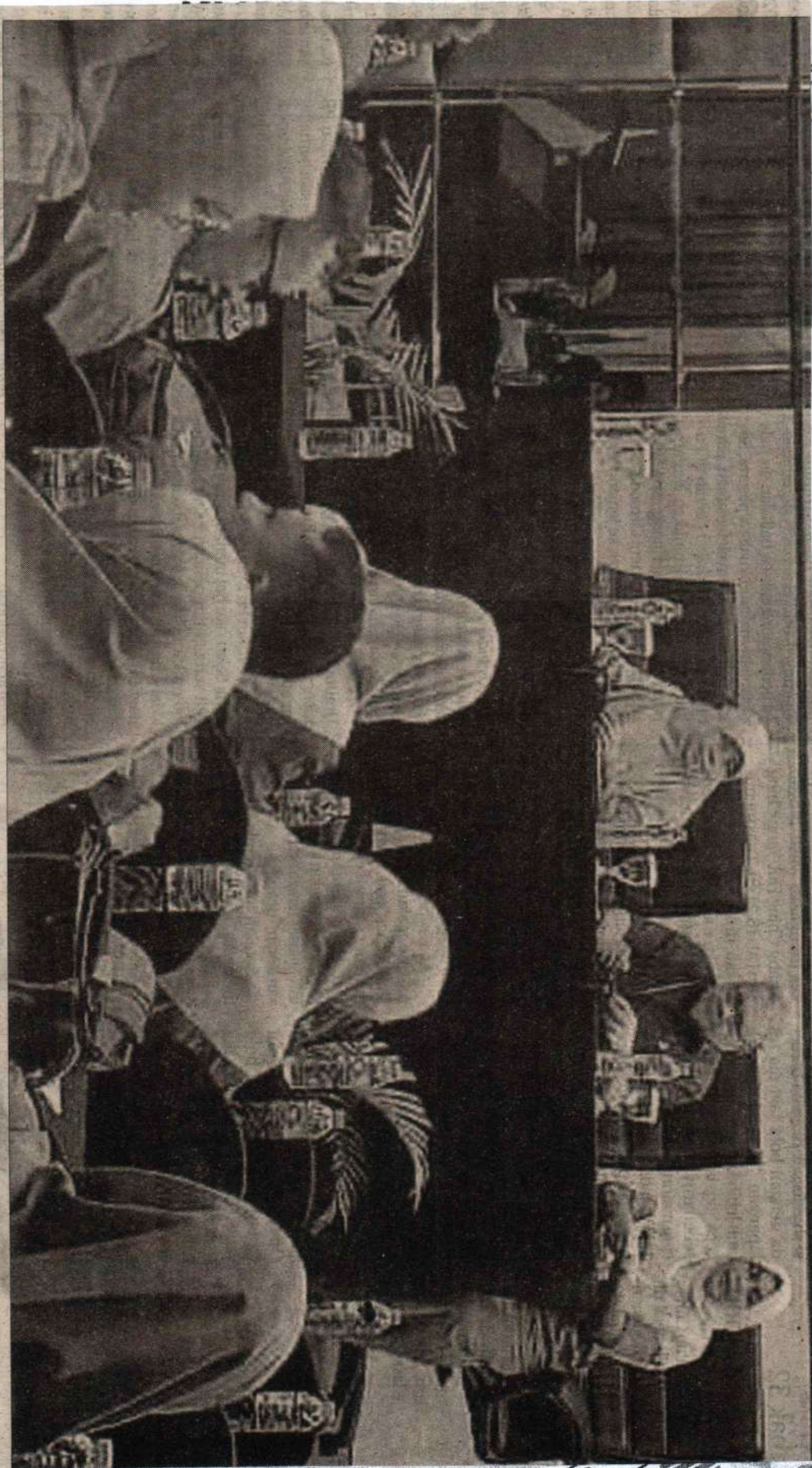
Sekretariat DPRD Sumbar berharap seluruh pegawai dapat terus meningkatkan integritas, semangat kerja, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan profesional. (byr/rel)





SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

SUASANA bimbingan teknis (bimtek) Kepala SMA/SMK se-Sumbar di Padang, Senin (6/7) lalu. Kesempatan itu, Ketua DPRD Sumbar Muhiidi menjadi narasumber.



NEWS

**BREAKING
NEWS!**



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	KAMIS, 16 JULI 2026	12

DPRD Sumbar Siapkan Rekomendasi Pembenaan Tata Kelola Aset Daerah

DPRD Sumatera Barat menyoroti serius persoalan aset daerah yang belum tuntas, mulai dari belum bersertifikat hingga masih dikuasai pihak lain. Melalui Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Aset, DPRD mendesak pemerintah daerah segera membuka data dan mempercepat penyelesaian agar tidak menghambat pemanfaatan aset untuk kepentingan publik.

Langkah pembenahan itu diawali dengan konsultasi Pansus ke Direktorat BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah Kementerian Dalam Negeri serta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan melalui Lembaga Manajemen Aset Negara, pada 13-16 Juli.

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman, mengatakan konsultasi tersebut menjadi bagian dari upaya menyusun rekomendasi komprehensif terkait pengelolaan aset daerah.

"Melalui konsultasi ini kami ingin memastikan rekomendasi yang disusun selaras dengan regulasi pemerintah pusat, sehingga dapat menjadi dasar pembenahan tata kelola aset daerah yang lebih profesional, efektif, dan akuntabel," ujarnya.

Ia menjelaskan, pengelolaan aset tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga harus mampu meningkatkan manfaat bagi pelayanan publik dan mendukung pembangunan daerah. Pansus, kata dia, juga menerima berbagai masukan terkait pengelolaan Barang Milik Daerah, pemanfaatan aset, serta penguatan nilai ekonomi aset.

Hasil konsultasi tersebut akan digunakan untuk menyempurnakan pembahasan sebelum Pansus menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Sumbar.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Sumbar, Indra Dt Rajo Lelo, mendesak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) segera menyelesaikan berbagai persoalan aset yang masih menggantung.

"Kalau realisasi anggaran kami yakin tidak menjadi persoalan yang berarti. Namun yang paling rumit saat ini adalah masalah aset. Karena itu kami meminta BPKAD memaparkan secara terbuka berbagai persoalan aset yang masih dihadapi," ujarnya.

Ia mengungkapkan, persoalan aset mencakup aset

yang belum bersertifikat, masih dikuasai pihak lain, hingga pendataan yang belum tertib. Bahkan, terdapat aset yang telah memiliki putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, namun belum dapat dieksekusi.

Karena itu, ia meminta BPKAD menjelaskan secara rinci kendala yang dihadapi, baik dari aspek hukum, administrasi, teknis, maupun keterbatasan anggaran. Selain itu, DPRD juga meminta data lengkap seluruh aset bermasalah sebagai dasar pengawasan dan penyusunan langkah penyelesaian.

"Kami ingin mengetahui secara jelas aset mana saja yang bermasalah. Dengan data tersebut, DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan dan, bila diperlukan, mendukung penyelesaiannya melalui kebijakan maupun penganggaran," tegasnya.

Anggota Komisi III DPRD Sumbar, Yogi, menilai kepastian status hukum menjadi syarat utama agar aset daerah dapat dimanfaatkan secara produktif melalui kerja sama dengan pihak ketiga maupun investor.

"Aset yang memiliki kepastian hukum akan lebih mudah dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau investor. Ini menjadi peluang untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah sekaligus meningkatkan PAD di tengah kondisi anggaran yang terbatas," katanya.

Senada, anggota Komisi III DPRD Sumbar, Yusuf Abid, menilai kinerja Pansus Aset selama ini belum optimal karena membahas terlalu banyak persoalan sekaligus.

Ia mengusulkan agar Pansus memfokuskan pembahasan pada satu atau dua kasus prioritas hingga tuntas dan memiliki kepastian hukum sebelum beralih ke persoalan lain.

Menanggapi hal tersebut, BPKAD Sumbar mengakui pengelolaan aset daerah masih menghadapi kendala, terutama dalam pengamanan dan legalitas.

"Kami mengakui pengelolaan aset daerah belum sepenuhnya optimal. Masih banyak aset yang perlu diperkuat pengamanannya, terutama melalui proses sertifikasi," ujarnya.

BPKAD mencatat, dari 1.124 bidang tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sekitar 400 bidang belum bersertifikat dan masih dalam proses penyelesaian administrasi. Seluruh data aset bermasalah, kata BPKAD, telah disampaikan kepada Pansus DPRD sebagai bahan pembahasan dan penyusunan langkah penyelesaian. (*)

BREAKING
NEWS!



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA



KONSULTASI TATA KELOLA ASET: Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman bersama jajaran Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Aset DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan diskusi dan konsultasi intensif di Direktorat BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	KAMIS, 16 JULI 2026	2

OPTIMALISASI PEMANFAATAN ASET

Pansus Aset DPRD Sumbar Lakukan Kon sultasi ke Kemendagri

PADANG, HALUAN- Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Aset DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan konsultasi awal terkait pengelolaan aset daerah ke Direktorat BUMD, BLUD dan BMD Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) di Jakarta, Selasa (14/7).

Konsultasi ini bertujuan untuk memperoleh masukan, memperkuat pemahaman, serta menyelaraskan kebijakan dan regulasi mengenai pengelolaan aset daerah agar lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

“Melalui konsultasi ini, Pansus Pengelolaan Aset diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang komprehensif dalam mendukung optimalisasi pemanfaatan aset daerah demi peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat,” ujar Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman saat memimpin konsultasi tersebut.

Dikatakan Evi Yandri, sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola aset yang profesional, bernilai guna, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan daerah.

Sebelumnya Ketua Komisi III DPRD Sumbar, Indra Dt Rajo Lelo juga mengatakan,

persoalan aset menjadi pekerjaan rumah terbesar yang harus segera diselesaikan pemerintah daerah.

“Saat ini masih banyak aset pemerintah yang telah memiliki sertifikat tetapi masih dikuasai pihak lain. Sebaliknya, terdapat pula aset milik pemerintah yang hingga kini belum dapat dikuasai, bahkan ada yang telah memiliki putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap namun belum dapat dieksekusi,” ulasnya.

Karena itu, sambung Indra,

pihaknya meminta BPKAD menyampaikan secara rinci kepada DPRD berbagai kendala yang dihadapi, baik yang berkaitan dengan aspek hukum, administrasi, teknis, maupun keterbatasan anggaran.

Selain itu, Komisi III juga meminta BPKAD menyerahkan data lengkap seluruh aset bermasalah sebagai dasar bagi DPRD menjalankan fungsi pengawasan sekaligus menyusun langkah penyelesaian bersama pemerintah daerah.

“Kami ingin mengetahui secara jelas aset mana saja yang

bermasalah. Dengan data tersebut, DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan dan, bila diperlukan, mendukung penyelesaiannya melalui kebijakan maupun penganggaran,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Sumbar, Yogi, menilai kepastian status hukum aset merupakan syarat utama agar aset daerah dapat dimanfaatkan secara produktif melalui kerja sama dengan pihak ketiga maupun investor.

Menurutnya, penataan aset yang baik akan membuka peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama di tengah keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah daerah.

“Aset yang memiliki kepastian hukum akan lebih mudah dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau investor. Ini menjadi peluang untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah sekaligus meningkatkan PAD di tengah kondisi anggaran yang terbatas,” katanya. (h/len)

AKING
WS!

68



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

LAKUKAN KONSULTASI— Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Aset DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan konsultasi awal terkait pengelolaan aset daerah ke Direktorat BUMD, BLUD dan BMD Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), IST

KO



NEWS

**BREAKING
NEWS!**

69



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	JUMAT, 17 JULI 2026	3

Kasus Bullying Disorot, Nanda Satria Desak Satgas Diperkuat



NANDA SATRIA

PADANG, KP - Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Nanda Satria, meminta penguatan satuan tugas (satgas) pencegahan perundungan menyusul dugaan kasus bom rakitan di lingkungan MAN 3 Padang.

Ia menilai perundungan tidak hanya menimbulkan luka psikologis, tetapi juga berpotensi mengarahkan kecerdasan anak ke tindakan negatif jika tidak ditangani dengan baik.

"Kalau sampai membuat bom, berarti pada dasarnya anak ini adalah anak yang cerdas dan pintar. Tetapi karena tekanan dari lingkungan yang kurang sehat akibat ulah sebagian oknum, kecerdasannya justru diarahkan kepada hal yang negatif," kata Nanda saat diwawancarai di Padang, Kamis (16/7).

Menurutnya, banyak anak memiliki potensi besar yang membutuhkan perhatian dan pendampingan agar berkembang ke arah positif.

"Kita yakin masih banyak anak seperti anak

tersebut yang harus kita perhatikan. Mereka memiliki potensi besar yang seharusnya bisa dioptimalkan untuk mendukung terwujudnya Generasi Emas Indonesia, bukan justru kehilangan arah karena lingkungan yang tidak sehat," ujarnya.

Ia mengungkapkan, DPRD Sumbar sebelumnya telah mendorong program pencegahan bullying dan penguatan kesehatan mental remaja dengan melibatkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru bimbingan dan konseling, serta siswa penggerak di tingkat SMA sederajat se-Sumatera Barat (Sumbar).

Ia menjelaskan, program tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan Youth Health Care dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah. "Tahun lalu, atas usulan kami, telah dilaksanakan kegiatan yang melibatkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru BK, serta siswa penggerak. Salah satu pembahasan utamanya memang terkait bullying dan kesehatan mental remaja," katanya.

Dari kegiatan itu, lanjutnya, lahir rekomendasi pembentukan satgas untuk menerima laporan perundungan sekaligus melakukan pembinaan terhadap siswa yang terlibat.

"Salah satu rekomendasi kami adalah membentuk semacam satgas untuk menangani laporan-laporan terkait bullying dan melakukan pembinaan terhadap siswa. Jangan sampai ada lagi siswa yang menjadi korban perundungan dalam bentuk apa pun," ujarnya.

Ia menambahkan, berdasarkan informasi dari dinas terkait, satgas tersebut telah mulai dibentuk, namun perlu diperkuat agar bekerja lebih efektif.

"Kami berharap satgas ini benar-benar diperkuat sehingga peristiwa yang sangat kita sesalkan seperti ini tidak terulang lagi. Sekolah harus menjadi tempat yang aman bagi setiap anak untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya," tutupnya. (fai)

NEWS

BREAKING
NEWS!



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	JUMAT, 17 JULI 2026	2

DPRD Sumbar Desak Pengelolaan Stadion Utama Diserahkan ke Dispora



Ketua Komisi V DPRD Sumbar,
Lazuardi Erman

PADANG, KP — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar mendesak pemerintah provinsi segera memindahkan kewenangan pengelolaan Stadion Utama Sumatera Barat yang berlokasi di Padang Pariaman. Aset bernilai ratusan miliar rupiah tersebut dinilai harus segera diserahkan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga agar tidak terbengkalai.

Saat ini, proyek olahraga yang pembangunannya tersendat sejak 2014 itu masih berada di bawah kewenangan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Sumbar. Pengalihan pengelola secara teknis dinilai menjadi kunci utama untuk menyelamatkan investasi besar daerah

tersebut.

Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Lazuardi Erman menegaskan, penyerahan aset kepada instansi pemuda dan olahraga akan membuka peluang pelaksanaan berbagai kejuaraan. Menurutnya, infrastruktur olahraga ini harus segera dihidupkan demi kepentingan publik dan pembinaan atlet daerah.

"Aktivitas di Stadion Utama Sumatera Barat harus terus dihidupkan agar kawasan tersebut tidak terbengkalai," ujarnya, Kamis (16/7).

Ia menilai, alokasi biaya pemeliharaan berkisar Rp1,8 miliar per tahun masih sangat rasional untuk dipenuhi oleh anggaran daerah. Besaran biaya rawat tersebut jauh lebih kecil dibandingkan risiko kerusakan total jika bangunan dibiarkan tanpa aktivitas.

Untuk itu, pihaknya meminta dinas terkait bergerak cepat menyusun skema aktivasi kawasan setelah proses serah terima administrasi tuntas. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebagai pemilik wilayah juga diharapkan ikut memanfaatkan stadion untuk berbagai kegiatan olahraga lokal.

"Jangan sampai ratusan miliar rupiah yang telah diinvestasikan justru terbengkalai," katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy menyatakan pemerintah provinsi tengah menjajaki terobosan anggaran penuntasan fisik lewat kementerian terkait. Salah satu opsi yang disiapkan adalah mengintegrasikan pembangunan Sekolah Rakyat di dalam kawasan stadion agar mendapat kucuran dana pusat. (fai)





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat	JUMAT, 17 JULI 2026	2

Irsyad Syafar Ajak Semua Pihak Dukung Pembinaan Tenis Meja Sumbar



IRSYAD Syafar saat menghadiri pembukaan Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Tenis Meja se-Sumatera Barat 2026 yang digelar di Hall SMKN 2 Payakumbuh, 10-12 Juli 2026 lalu. IST

PAYAKUMBUH, HALUAN — Anggota DPRD Sumatera Barat, Irsyad Syafar, menegaskan pentingnya memperluas partisipasi masyarakat dalam olahraga tenis meja sebagai langkah strategis untuk mencetak atlet berprestasi. Menurutnya, pembinaan yang berkelanjutan serta kompetisi yang rutin akan membuka peluang lebih besar bagi Sumatera Barat melahirkan atlet yang mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional.

Hal itu disampaikan Irsyad Syafar saat menghadiri pembukaan Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Tenis Meja se-Sumatera Barat 2026 yang digelar di Hall SMKN 2 Payakumbuh, 10-12 Juli 2026 lalu.

Kejurprov mengusung tema “Berlatih

Membentuk Kemampuan, Sportivitas Membentuk Karakter, Pertandingan Melahirkan Juara Sejati” dan menjadi ajang pembinaan sekaligus penjarangan bibit atlet potensial dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

Pembukaan kejuaraan turut dihadiri Ketua Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Sumbar Gustami Hidayat, Ketua Umum KONI Sumbar Hamdanus, Ketua KONI Kota Payakumbuh Khairul Mufti, Tim Humas KONI Sumbar Agusmanto, jajaran pengurus PTMSI, serta perwakilan daerah peserta.

Irsyad menilai kejuaraan olahraga tidak hanya menjadi arena untuk menentukan juara, tetapi juga sarana membentuk karakter, meningkatkan

kemampuan teknik, dan memperkuat mental bertanding para atlet.

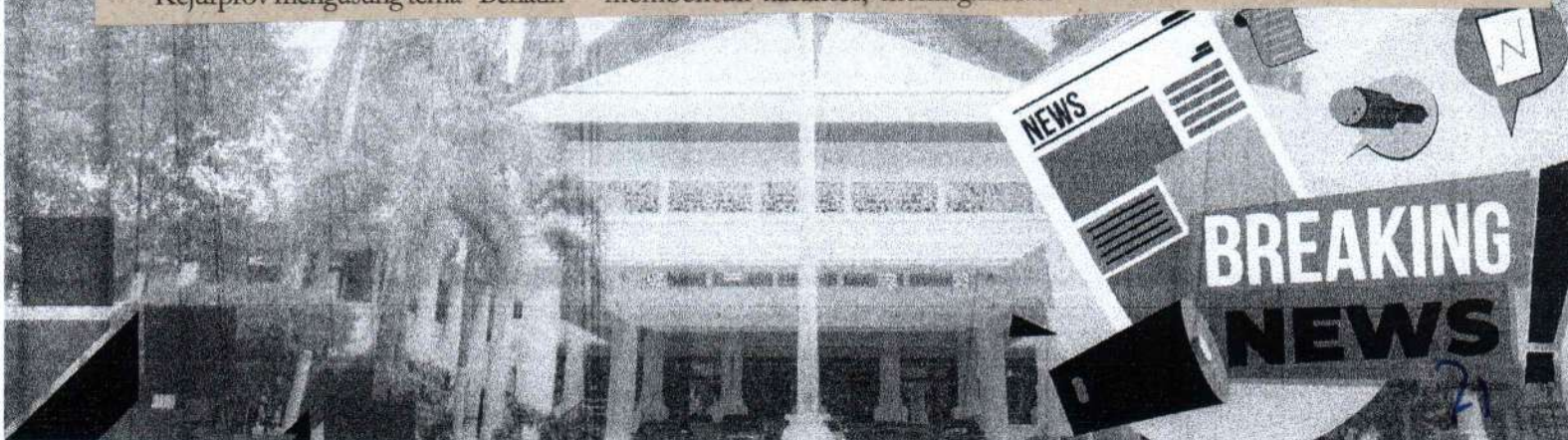
“Semakin sering atlet mendapatkan kesempatan bertanding, semakin besar pula peluang mereka berkembang dan meraih prestasi yang lebih tinggi,” ujarnya.

Ia mengajak seluruh pihak untuk terus mendukung perkembangan tenis meja di Sumatera Barat agar semakin memasyarakat dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Melalui event-event seperti ini, saya mengajak seluruh pihak untuk berpartisipasi dan mendukung

perkembangan tenis meja di Sumatera Barat. Seperti yang disampaikan Ketua Umum PTMSI, olahraga tenis meja harus semakin memasyarakat dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan pembinaan yang berkelanjutan dan kompetisi yang rutin, kita optimis akan lahir atlet-atlet berkualitas yang mampu berprestasi di tingkat nasional maupun internasional,” kata Irsyad.

Ia juga mengapresiasi PTMSI Sumbar, KONI, panitia pelaksana, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi menyukseskan Kejurprov Tenis Meja Sumbar 2026. Menurutnya, kolaborasi dan komitmen bersama merupakan kunci dalam membangun ekosistem olahraga yang sehat dan berprestasi. (h/len)





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	JUMAT, 17 JULI 2026	2

TINGKATKAN KEPATUHAN MASYARAKAT BAYAR PAJAK

Komisi III DPRD Sumbar Dorong Pem prov Perkuat Inovasi

PADANG, HALUAN — Komisi III DPRD Sumatera Barat (Sumbar) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar memperkuat inovasi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Upaya tersebut dinilai penting mengingat tingkat kepatuhan wajib pajak di Sumbar masih tergolong rendah.

Anggota Komisi III DPRD Sumbar, Daswanto, menyebutkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan pada 2025 baru mencapai sekitar 56 persen. Angka ini menunjukkan masih besarnya potensi penerimaan daerah yang belum tergarap secara optimal.

"Kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan di Sumatera Barat tahun lalu masih sekitar 56 persen. Kami meminta Pemprov melalui OPD terkait menghadirkan terobosan yang mampu mendorong masyarakat lebih patuh memenuhi kewajibannya," kata Daswanto kepada *Haluan* baru-baru ini.

Menurutnya, sejumlah kebijakan yang telah diterapkan, seperti penghapusan pajak progresif dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB II), program pemutihan pajak, digitalisasi layanan, serta pengoperasian Samsat Keliling, perlu terus

diperkuat agar memberikan hasil yang lebih optimal.

Selain inovasi layanan, Daswanto menilai sosialisasi juga harus dilakukan secara lebih masif. Edukasi yang berkelanjutan dinilai penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pajak kendaraan merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan daerah.

"Kemudahan layanan harus dibarengi dengan sosialisasi yang efektif agar masyarakat semakin memahami pentingnya membayar pajak tepat waktu," ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan kendala yang masih dihadapi di lapangan, terutama keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan di sejumlah kantor Samsat.

Berdasarkan temuan pihaknya di lapangan, masih terdapat Samsat yang hanya memiliki satu kendaraan operasional.

Bahkan, di beberapa daerah, kendaraan tersebut harus digunakan secara bergantian untuk melayani lebih dari satu wilayah. "Kondisi ini tentu memengaruhi efektivitas pelayanan.

Sulit mengoptimalkan penerimaan pajak jika fasilitas pendukungnya belum memadai. Persoalan ini harus menjadi perhatian serius Pemprov," tegasnya.

Daswanto berharap penguatan inovasi pelayanan yang didukung penyediaan sarana dan prasarana memadai mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak

kendaraan. Dengan demikian, potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan di Sumatera Barat. (h/len)

NEWS

BREAKING
NEWS!



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA



RAPAT KERJA—Rapat Kerja yang digelar Komisi III dengan mitra baru-baru ini. IST





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	SABTU, 18 JULI 2026	2

Komisi II DPRD Sumbar Dorong Program Khusus Jaga Nilai Tukar Petani

KOMISI II DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mendorong pemerintah daerah menyiapkan program khusus untuk menjaga stabilitas Nilai Tukar Petani (NTP) agar harga hasil pertanian tetap sebanding dengan biaya produksi.

Hal itu mengemuka saat Komisi II DPRD Sumbar melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada 15 Juli 2026, dalam memperkaya muatan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Ketua Tim Pembahas Ranperda, Ilson Cong, mengatakan kunjungan tersebut menghasilkan sejumlah masukan penting yang akan diadopsi dalam substansi Ranperda, terutama terkait perlunya program konkret menjaga stabilitas NTP.

Menurutnya, Pemerintah DIY telah memiliki pasar lelang resmi sebagai instrumen untuk mengantisipasi anjloknya harga hasil pertanian saat panen raya.

"Program seperti ini patut menjadi perhatian dalam penyusunan Ranperda karena dapat melindungi petani dari penurunan harga komoditas," ujarnya, didampingi Wakil Ketua Tim Ridwan Dt Tumbijo dan Sekretaris Ali Muda.

Selain itu, Komisi II menilai keberhasilan perlindungan dan pemberdayaan petani sangat bergantung pada dukungan anggaran yang memadai. Karena itu, Ranperda diharapkan menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk berbagai program perlindungan petani, termasuk menjaga stabilitas NTP.

Sementara itu, Kepala DPKP DIY Aris Eko Nugroho menegaskan implementasi perda sangat ditentukan oleh ketersediaan anggaran hingga ke tingkat kabupaten dan kelurahan.

"Jika tidak ada anggaran yang dapat diturunkan

ke daerah, perda akan sulit dijalankan karena setiap daerah memiliki kepentingan sektoral masing-masing," katanya.

Ia juga mengingatkan agar substansi perda bersifat mengikat, namun tetap fleksibel sehingga memberi ruang bagi pemerintah provinsi untuk berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Sumbar perlu segera menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama seluruh pemerintah kabupaten dan kota guna menyamakan persepsi terkait pembagian kewenangan dalam pelaksanaan perda.

Ia menambahkan, perda serupa di DIY bersifat mandatori dan relatif mudah diterapkan karena sistem

pemerintahan yang terintegrasi hingga tingkat kelurahan. Kondisi tersebut berbeda dengan Sumbar yang memiliki dinamika kewenangan antardaerah.

Usai pertemuan, rombongan Komisi II DPRD Sumbar meninjau Jogja Agro Park dan Agro Market DIY untuk melihat langsung program pemberdayaan petani.

Selain pasar lelang, Pemerintah DIY juga memfasilitasi pemasaran hasil pertanian melalui program gratis ongkos kirim (free ongkir) bekerja sama dengan pelaku pemasaran guna memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing produk pertanian lokal. (*)





SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

KC



KOMISI II DPRD Sumbar melakukan kunjungan kerja ke DPKP Daerah Istimewa Yogyakarta, guna memperkaya muatan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

NEWS

**BREAKING
NEWS!**

75



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat	SABTU, 18 JULI 2026	5

OPTIMALISASI PEMANFAATAN ASET

Pansus Aset DPRD Sumbar Lakukan Kon sultasi ke Kemendagri

PADANG, HALUAN-Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Aset DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan konsultasi awal terkait pengelolaan aset daerah ke Direktorat BUMD, BLUD dan BMD Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) di Jakarta.

Kegiatan yang berlangsung 13-16 Juli ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman, memperkuat pemahaman, serta menyalurkan kebijakan dan regulasi mengenai pengelolaan aset daerah agar lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

"Melalui konsultasi ini,

Pansus Pengelolaan Aset diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang komprehensif dalam mendukung optimalisasi pemanfaatan aset daerah demi peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat," ujar Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman saat memimpin kegiatan konsultasi tersebut.

Dikatakan Evi Yandri, sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola aset yang profesional, bernilai guna, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan daerah.

Sebelumnya Ketua Komisi III DPRD Sumbar, Indra Dt. Rajo Lelo juga

mengatakan, persoalan aset menjadi pekerjaan rumah terbesar yang harus segera diselesaikan pemerintah daerah.

"Saat ini masih banyak aset pemerintah yang telah memiliki sertifikat tetapi masih dikuasai pihak lain. Sebaliknya, terdapat pula aset milik pemerintah yang hingga kini belum dapat dikuasai, bahkan ada yang telah memiliki putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap namun belum dapat dieksekusi," ulasnya.

Karena itu, sambung Indra, pihaknya meminta BPKAD telah menyampaikannya secara rinci kepada DPRD berbagai kendala yang dihadapi, baik yang berkaitan dengan aspek hukum, administrasi, teknis, maupun keterbatasan

anggaran.

Selain itu, Komisi III juga meminta BPKAD menyerahkan data lengkap seluruh aset bermasalah sebagai dasar bagi DPRD menjalankan fungsi pengawasan sekaligus menyusun langkah penyelesaian bersama pemerintah daerah.

"Kami ingin mengetahui secara jelas aset mana saja yang bermasalah. Dengan data tersebut, DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan dan, bila diperlukan, mendukung penyelesaiannya melalui kebijakan maupun penganggaran," tegasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Sumbar, Yogi, menilai kepastian status hukum aset merupakan syarat utama agar aset daerah dapat dimanfaatkan secara

produktif melalui kerja sama dengan pihak ketiga maupun investor.

Menurutnya, penataan aset yang baik akan membuka peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah

(PAD), terutama di tengah keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah daerah.

"Aset yang memiliki kepastian hukum akan lebih mudah dikerjasamakan dengan pihak ketiga

atau investor. Ini menjadi peluang untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah sekaligus meningkatkan PAD di tengah kondisi anggaran yang terbatas," katanya. (h/adv)

NEWS

BREAKING
NEWS!



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA



Berfoto bersama



Berdiskusi dengan pihak kementerian



Anggota Pansus Aset DPRD Sumbar dalam kegiatan konsultasi yang dilaksanakan



Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Aset DPRD Sumbar melaksanakan konsultasi awal terkait pengelolaan aset daerah ke kementerian terkait di Jakarta





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Padang Ekspres	SABTU 18 JULI 2026	12

Perkuat Disiplin dan Komitmen Pelayanan Publik

Padang, Padek—Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat menggelar apel pagi rutin di Lapangan Parkir Kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat beberapa waktu lalu.

Kegiatan yang berlangsung khidmat dan penuh semangat tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat, Maifrizon.

Apel diikuti oleh seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Sumbar sebagai bagian dari upaya memperkuat disiplin, meningkatkan koordinasi, serta mempererat komitmen bersama dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga legislatif daerah.

Pelaksanaan apel pagi rutin tersebut juga menjadi sarana untuk membangun sinergi antarseluruh pegawai agar pelayanan administrasi dan dukungan terhadap kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat berjalan secara optimal.

Dalam pelaksanaannya, seluruh peserta mengikuti rangkaian apel dengan terib dan penuh khidmat. Kehadiran para ASN dan pegawai mencerminkan komitmen terhadap peningkatan bu-

daya kerja yang disiplin dan profesional di lingkungan Sekretariat DPRD Sumbar.

Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat, Maifrizon, mengatakan apel pagi bukan sekadar agenda rutin, melainkan momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan dalam menjalankan tugas sebagai aparatur pemerintah.

Menurutnya, disiplin dan koordinasi yang terbangun melalui apel pagi akan memberikan dampak positif terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas DPRD.

"Apel pagi menjadi momentum untuk memperkuat disiplin, koordinasi, serta komitmen bersama dalam



DOCUMENTASI DPRD SUMBAR

APEL PAGI: Sekretariat DPRD Provinsi Sumbar saat menggelar apel pagi beberapa waktu lalu.

memberikan pelayanan terbaik demi mendukung kinerja DPRD Provinsi Sumatera Barat," ujar Maifrizon.

Ia menambahkan, peningkatan kualitas sumber daya aparatur harus terus dilakukan seiring dengan tun-

integritas, meningkatkan etos kerja, serta memperkuat koordinasi dalam setiap pelaksanaan tugas.

Komitmen tersebut diharapkan mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan profesional, sekaligus memberikan pelayanan administrasi yang optimal bagi DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Kegiatan apel pagi rutin menjadi salah satu langkah pembinaan internal yang terus dilaksanakan Sekretariat DPRD Sumbar sebagai bagian dari upaya membangun budaya kerja yang produktif, disiplin, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (rel)

BREAKING
NEWS!



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	SELASA, 21 JULI 2026	3

Ketua DPRD Sumbar Ajak Guru Perketat Pencegahan Bullying di Sekolah



KETUA DPRD Sumbar, Muhidi saat menjadi narasumber pada Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kompetensi Guru Vokasi SMK Negeri dan Swasta Kota Padang, Senin (20/7).

PADANG, KP - Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, mengajak seluruh tenaga pendidik untuk memperketat pencegahan perundungan (bullying) di lingkungan sekolah demi menciptakan ruang belajar yang aman dan sehat bagi peserta didik.

Hal itu disampaikan Muhidi saat menjadi narasumber pada Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan

Kompetensi Guru Vokasi SMK Negeri dan Swasta Kota Padang, Senin (20/7).

Menurut Muhidi, guru tidak hanya bertugas mengajar, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam membangun karakter siswa serta menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif.

"Guru bukan sekadar pengajar,

tetapi juga pembentuk karakter, pembimbing, sekaligus agen perubahan yang melahirkan generasi berdaya saing dan berakhlak," ujarnya.

Ia menegaskan, upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 sangat bergantung pada kualitas pendidikan, termasuk kemampuan sekolah dalam mencegah berbagai persoalan seperti bullying yang dapat me-

ngganggu perkembangan mental peserta didik.

Muhidi menyebut, Indonesia saat ini tengah menikmati bonus demografi dengan dominasi Generasi Z, yang menjadi peluang besar untuk mendorong kemajuan bangsa melalui pendidikan berkualitas.

"Generasi muda saat ini adalah investasi bangsa. Mereka harus dipersiapkan dengan ilmu, keterampilan, karakter, dan etos kerja agar mampu menjadi penggerak kemajuan Indonesia," katanya.

Lebih lanjut, ia menilai guru harus mampu menjadi teladan, menjaga amanah ilmu, serta membangun komunikasi yang baik dengan siswa. Selain itu, guru juga dituntut peka dalam mendeteksi persoalan yang dihadapi peserta didik sejak dini agar tidak berkembang menjadi masalah serius.

Di sisi lain, Muhidi mendorong tenaga pendidik untuk terus meningkatkan kompetensi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk memanfaatkan teknologi dan kecerdasan buatan (AI) dalam proses pembelajaran.

"Guru harus terbuka terhadap perubahan, terus belajar, dan memanfaatkan teknologi untuk menciptakan pembelajaran yang kreatif tanpa meninggalkan nilai etika," ujarnya.

Ia berharap peningkatan kompetensi guru vokasi tidak hanya menghasilkan lulusan yang siap kerja, tetapi juga mampu menciptakan lingkungan sekolah yang aman, bebas dari bullying, serta membentuk karakter generasi menuju Indonesia Emas 2045. (fai)





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
POSMETRO PADANG	SELASA, 21 JULI 2026	8

DPRD Sumbar Setujui Rancangan Pertanggungjawaban APBD 2025 jadi Perda

Kinerja Pemprov Mengelola Keuangan Daerah Diapresiasi

PADANG, METRO

DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Keputusan itu diambil dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang utama, Senin (20/7), yang dipimpin Ketua DPRD Sumbar Muhidi didampingi Wakil Ketua Evi Yandri Rajo Budiman, M Iqra Chisa, Nanda Satria. Sedangkan dari pihak Pemprov, dihadiri langsung Gubernur Sumbar, Mahyeldi bersama para kepala OPD dan Forkompimda Sumbar.

"Semua Fraksi di DPRD Sumbar menyetujui hasil pembahasan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelak-

sanaan APBD tahun 2025, dilanjutkan pada tahap pengambilan keputusan pada rapat paripurna. Fraksi-fraksi juga memberikan catatan dan masukan yang perlu menjadi perhatian dan ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah, agar kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat menjadi lebih baik," kata Muhidi.

Muhidi menerangkan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan sarana evaluasi

yang menyeluruh terhadap pelaksanaan APBD, maka dalam pembahasannya tidak hanya menyangkut pada realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah atau SILPA. Akan tetapi juga mencakup aspek efektivitas, efisien, akuntabilitas serta capaian target kinerja program dan kegiatan yang dicapai.

"DPRD menilai secara umum pengelolaan keuangan daerah Tahun 2025 berjalan cukup maksimal. Di tengah kondisi APBD yang mengalami kontrak-

si akibat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 serta dampak banjir hidrometeorologi yang menyebabkan kerusakan infrastruktur, ekonomi,

dan sosial, Pemerintah Provinsi Sumbar tetap mampu menjaga kinerja keuangan daerah dengan baik," ujar Muhidi.

Menurut Muhidi, realisasi pendapatan daerah pada Tahun 2025 mencapai 99,03 persen, sementara realisasi belanja berhasil mencapai 94,59 persen. Dari sisi tata kelola, Pemerintah Provinsi Sumbar juga kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025.

"Atas capaian tersebut, DPRD memberikan apresiasi kepada Pemprov Sumbar yang dinilai mampu menjaga stabilitas pengelolaan APBD di tengah situasi yang tidak mudah. Meski demikian, kami juga mengingatkan masih terdapat sejumlah kelemahan yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama dalam peningkatan pengelolaan pendapatan dan penyempurnaan pe-

laksanaan program pembangunan agar lebih efektif pada tahun-tahun mendatang," tegas dia.

Sementara itu, Gubernur Sumbar, Mahyeldi mengatakan, seluruh masukan, kritik, dan rekomendasi yang disampaikan DPRD Sumbar akan menjadi bahan evaluasi penting bagi Pemerintah Provinsi Sumbar dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, serta pelaksanaan pembangunan di masa mendatang.

"Dengan adanya sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan DPRD, kami optimistis kualitas pelayanan publik, pembangunan, serta pengelolaan keuangan daerah akan semakin baik dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Sumbar," tutupnya. (*)

**BREAKING
NEWS!**



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

KORAN



SETUJUI—Ketua DPRD Sumbar Muhidi didampingi Wakil Ketua Evi Yandri Rajo Budiman, M Iqra Chisa, Nanda Satria, bersama Gubernur Sumbar, Mahyeldi usai menandatangani persetujuan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 untuk ditetapkan menjadi Perda.



SUASANA rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sumbar tahun 2025.



GOVERNUR Sumbar, Mahyeldi menandatangani kesepakatan bersama Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025.



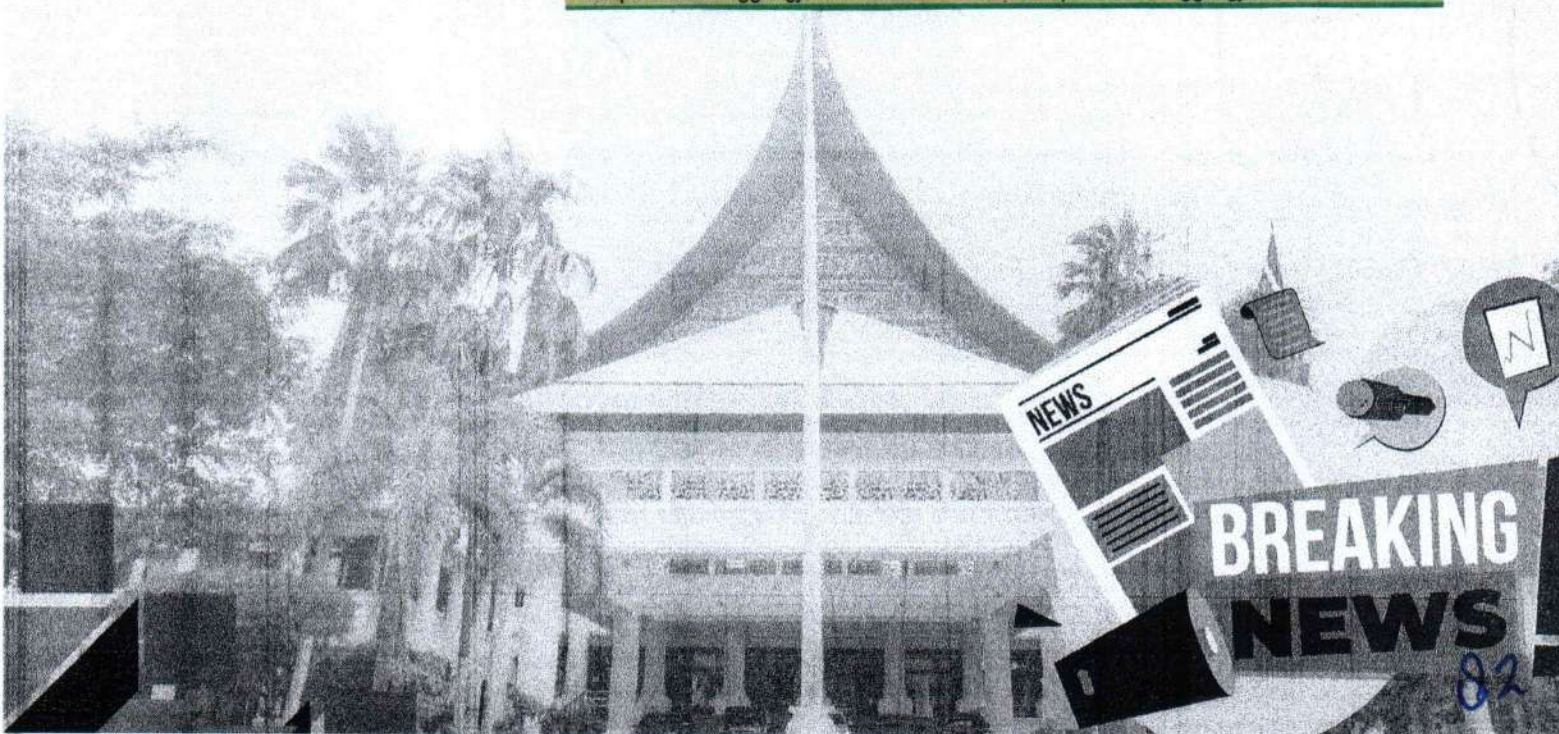
KETUA DPRD Sumbar, Muhidi menandatangani kesepakatan bersama Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025.



WAKIL Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri menandatangani kesepakatan bersama Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025.



WAKIL Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria menandatangani kesepakatan bersama Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025.





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG - A	Selasa, 21 Juli 2026 (6 Syafar 1448 H)	8

OPTIMALISASI PEMANFAATAN ASET

Pansus Aset Konsultasi ke Kemendagri

JAKARTA - SINGGALANG

Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Aset DPRD Provinsi Sumatera Barat menggelar konsultasi awal terkait tata kelola aset daerah ke Direktorat BUMD, BLUD, dan BMD Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Selain itu, koordinasi juga dilakukan bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) di Jakarta, baru-baru ini.

Agenda tersebut bertujuan menghimpun masukan, memperdalam pemahaman, sekaligus menyelaraskan regulasi mengenai pengelolaan aset daerah. Upaya ini dilakukan agar pemanfaatan aset ke depan berjalan lebih efektif, efisien, transparan, serta akuntabel.

"Melalui konsultasi ini, Pansus Pengelolaan Aset diharapkan mampu melahirkan rekomendasi komprehensif. Tujuannya mendukung optimalisasi aset daerah demi mendukung pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat," ujar Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman, saat memimpin jalannya konsultasi.

Evi Yandri menambahkan,



kolaborasi kuat antara pemerintah daerah dan pusat menjadi langkah strategis demi mewujudkan tata kelola aset yang profesional, bernilai guna, serta memberi manfaat maksimal bagi pembangunan daerah.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Sumbar, Indra Dt Rajo Lelo, menggarisbawahi bahwa persoalan aset merupakan pekerjaan rumah terbesar yang mendesak untuk dituntaskan oleh pemerintah daerah.

"Saat ini, banyak aset pemerintah yang sudah bersertifikat tetapi masih dikuasai pihak lain. Sebaliknya, ada juga aset daerah yang hingga kini belum bisa dikuasai. Bahkan, beberapa aset sudah memiliki putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, namun eksekusinya belum berjalan," ungkap Indra.

Melihat kondisi tersebut, Indra meminta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memaparkan secara rinci kepada DPRD mengenai berbagai kendala di lapangan, baik dari ranah hukum, administrasi, teknis, hingga keterbatasan anggaran.

Komisi III juga mendesak BPKAD menyerahkan data menyeluruh terkait aset-aset bermasalah tersebut. Data ini akan menjadi basis bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, sekaligus merumuskan solusi bersama pemerintah daerah.

"Kami butuh kejelasan mengenai aset mana saja yang bermasalah. Berbekal data valid itu, DPRD bisa mengoptimalkan fungsi pengawasan dan siap memberikan dukungan, baik lewat intervensi kebijakan maupun penganggaran," kata

Indra menegaskan.

Di sisi lain, Anggota Komisi III DPRD Sumbar, Yogi, menilai kepastian status hukum merupakan syarat mutlak agar aset daerah bisa dikelola secara produktif melalui kemitraan dengan pihak ketiga maupun investor.

Menurut Yogi, penataan aset yang rapi akan membuka peluang besar dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD), terlebih di tengah keterbatasan kapasitas fiskal yang dihadapi pemerintah daerah saat ini.

"Aset yang status hukumnya jelas akan jauh lebih mudah dikerjasamakan dengan investor atau pihak ketiga. Ini peluang besar untuk mengoptimalkan kekayaan daerah sekaligus menambah PAD saat kondisi anggaran sedang terbatas," tutur Yogi. (*)

BREAKING
NEWS!



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KORAN

AN





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	SELASA, 21 JULI 2026	2

Fraksi NasDem Minta Pemprov Sumbar Serius Tindaklanjuti Temuan BPK

PADANG, HALUAN- Fraksi Partai NasDem DPRD Sumatera Barat meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar serius menindaklanjuti seluruh temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.

Hal tersebut ditekankan Juru Bicara Fraksi Partai NasDem DPRD Sumbar, Irwan Zuldani saat menyampaikan pendapat akhir fraksinya terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sumbar Tahun Anggaran 2025, dalam rapat kerja pembahasan akhir atas ranperda terkait di ruang rapat paripurna, DPRD Senin (20/7).

Irwan mengatakan, capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemprov Sumbar merupakan sebuah prestasi, namun tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan berbagai catatan yang masih diberikan BPK.

"Opini WTP bukan berarti seluruh persoalan dalam pengelolaan keuangan daerah telah selesai. Masih terdapat sejumlah catatan penting yang harus menjadi perhatian dan segera ditindaklanjuti," ujar Irwan.

Menurutnya, Fraksi NasDem mencermati masih adanya beberapa temuan BPK yang bersifat berulang dari tahun-tahun sebelumnya. Temuan tersebut di antaranya berkaitan dengan kelemahan sistem pengendalian intern, ketidaktepatan pelaksanaan

belanja, kekurangan volume pekerjaan, hingga pengelolaan aset yang belum tertib secara administrasi.

"Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan belum sepenuhnya dilakukan secara sistemik dan menyeluruh. Pemerintah daerah perlu memperkuat komitmen agar per-

soalan yang sama tidak terus berulang setiap tahun," katanya.

Fraksi NasDem, lanjut Irwan, mendorong seluruh perangkat daerah yang menjadi objek temuan BPK untuk segera menyusun rencana aksi tindak lanjut yang jelas dan terukur. Rencana tersebut harus dilengkapi dengan target waktu penyelesaian serta mekanisme pelaporan yang transparan kepada DPRD maupun masyarakat.

Ia menegaskan, penyelesaian temuan BPK tidak boleh hanya sebatas pemenuhan administrasi, tetapi harus menjadi bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas dan kedisiplinan dalam pengelolaan anggaran daerah.

"Setiap rekomendasi BPK harus ditindaklanjuti secara serius, karena menyangkut tata kelola pemerintahan dan penggunaan uang rakyat," tegasnya.

Selain itu, Fraksi NasDem juga mendorong penguatan peran Inspektorat Daerah sebagai pengawas internal pemerintah. Inspektorat dinilai perlu lebih aktif melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap perangkat daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari APBD.

"Pengawasan harus dilakukan sejak awal, bukan hanya setelah ditemukan persoalan. Ketegasan terhadap pelanggaran pengelolaan keuangan daerah juga harus ditegakkan agar tidak muncul toleransi terhadap praktik yang dapat merugikan keuangan daerah," tutup Irwan. (h/len)





SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA



RAPAT KERJA— Juru Bicara Fraksi Partai NasDem DPRD Sumbar, Irwan Zuldani saat menyampaikan pendapat akhirnya fraksinya terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sumbar Tahun Anggaran 2025, dalam rapat kerja pembahasan akhir ranperda terkait, Senin (20/7). IST





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	SELASA, 21 JULI 2026	5

Ketua DPRD Sumbar Dorong Guru Vokasi Cetak SDM Berdaya Saing Global

PADANG, HALUAN — Ketua DP-
RD Sumatera Barat, Muhidi menegaskan
keberhasilan mewujudkan visi Indonesia
Emas 2045 sangat ditentukan oleh
kualitas sumber daya manusia (SDM) yang
dipersiapkan sejak dini. Menurutnya,
peran strategis tersebut berada di tangan
para pendidik, terutama guru sekolah
menengah kejuruan (SMK) yang mencetak
tenaga kerja terampil, kompeten, dan
berdaya saing.

Hal itu disampaikan Muhidi saat menjadi
narasumber pada kegiatan Peningkatan
Kompetensi Guru Vokasi SMK Negeri dan
Swasta se-Kota Padang, Senin (20/7).

Dalam pemaparannya, Muhidi me-
ngatakan Indonesia saat ini tengah
memasuki era bonus demografi yang
didominasi Generasi Z. Kondisi tersebut
menjadi peluang besar yang harus

dimanfaatkan melalui pendidikan ber-
kualitas agar Indonesia mampu menjadi
negara maju pada 2045.

“Generasi muda yang jumlahnya
sangat besar saat ini merupakan investasi
bangsa. Mereka harus dipersiapkan
dengan ilmu pengetahuan, keterampilan,
karakter, dan etos kerja agar mampu
menjadi penggerak kemajuan Indonesia
di masa depan,” ujarnya.

Muhidi menjelaskan, visi Indonesia
Emas 2045 ditopang sejumlah sasaran
strategis, di antaranya peningkatan
pendapatan per kapita hingga setara
negara maju, penurunan angka ke-
miskinan dan kesenjangan sosial, pening-
katan daya saing SDM, penguatan posisi
Indonesia di tingkat global, serta terca-
painya target pembangunan rendah emisi
menuju *net zero emission*. (h/len)



Ketua DPRD Sumbar, Muhidi saat menjadi narasumber pada kegiatan Peningkatan Kompetensi Guru Vokasi SMK Negeri dan Swasta se-Kota Padang, Senin (20/7). IST





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	RABU, 22 JULI 2026	3

DPRD SUMBAR SAHKAN RANPERDA PPA 2025

Di Tengah Efisiensi dan Bencana, APBD Sumbar Terserap 94,59 Persen

PADANG, KP - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi Sumbar dalam pengelolaan APBD 2025 yang dinilai tetap solid di tengah tekanan fiskal dan dampak bencana hidrometeorologi.

Apresiasi tersebut disampaikan saat rapat paripurna DPRD Sumbar dengan agenda pengambilan keputusan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, baru-baru ini.

Muhidi mengungkapkan, realisasi pendapatan daerah mencapai 99,03 persen, sementara realisasi belanja daerah sebesar 94,59 persen.

"Dalam kondisi APBD yang tertekan akibat kebijakan efisiensi dan bencana hidrometeorologi, capaian ini patut diapresiasi," ujarnya.

Ia menjelaskan, tekanan terhadap APBD terjadi akibat kebijakan efisiensi melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, serta dampak banjir hidrometeorologi yang melanda Sumatera Barat pada akhir November 2025.

Selain itu, DPRD juga mengapresiasi raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sumbar 2025.

"Opini WTP menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah berjalan transparan dan akuntabel," katanya.

Meski demikian, Muhidi mengingatkan masih terdapat sejumlah catatan dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah yang harus menjadi perhatian Pemprov Sumbar.

Ia menegaskan, seluruh rekomendasi DPRD perlu ditindaklanjuti agar kualitas APBD ke depan semakin efektif, efisien, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

"Kita berharap APBD Sumbar ke depan semakin berkualitas dan memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan daerah," tegasnya.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Muhidi didampingi Wakil Ketua DPRD Evi Yandri, Nanda Satria, dan M. Iqra Chissa Putra, serta dihadiri Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah bersama jajaran.

Sementara itu, Gubernur Mahyeldi menyampaikan persetujuan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 menandai selesainya salah satu siklus pengelolaan keuangan daerah.

"Sesuai ketentuan, Ranperda ini akan segera disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi paling lambat tiga hari setelah persetujuan bersama," ujarnya. (fai)





SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

KOR.



KETUA DPRD Sumbar Muhidi bersama Gubernur Mahyeldi Ansharullah dan para Wakil Ketua DPRD Sumbar dalam rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025.





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
POSMETRO PADANG	RABU, 22 JULI 2026	8

DPRD Sumbar Setujui Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pembangunan APBD 2025

Kinerja Pemprov Mengelola Keuangan Daerah Diapresiasi

PADANG, METRO

DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Keputusan itu diambil dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang utama, Senin (20/7), yang dipimpin Ketua DPRD Sumbar Muhidi didampingi Wakil Ketua Evi Yandri Rajo Budiman, M Iqra Chisa, Nanda Satria. Sedangkan dari pihak Pemprov dihadiri langsung Gubernur Sumbar, Mahyeldi bersama para kepala OPD dan Forkompimda Sumbar.

"Semua Fraksi di DPRD Sumbar menyetujui hasil pembahasan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelak-

sanaan APBD tahun 2025, dilanjutkan pada tahap pengambilan keputusan pada rapat paripurna. Fraksi-fraksi juga memberikan catatan dan masukan yang perlu menjadi perhatian dan tindak lanjut oleh pemerintah daerah, agar kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat menjadi lebih baik," kata Muhidi.

Muhidi menerangkan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan sarana evaluasi yang menyeluruh terhadap pelaksanaan APBD, maka dalam pembahasannya tidak hanya menyangkut pada realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah atau SILPA. Akan tetapi juga mencakup aspek efektivitas, efisien, akuntabilitas serta capaian target kinerja program dan kegiatan yang dicapai.

"DPRD menilai secara umum pengelolaan keuangan daerah Tahun 2025 berjalan cukup maksimal. Di tengah kondisi APBD yang mengalami kontrak-

si akibat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 serta dampak banjir hidrometeorologi yang menyebabkan kerusakan infrastruktur, ekonomi,

dan sosial, Pemerintah Provinsi Sumbar tetap mampu menjaga kinerja keuangan daerah dengan baik," ujar Muhidi.

Menurut Muhidi, realisasi pendapatan daerah pada Tahun 2025 mencapai 99,03 persen, sementara realisasi belanja berhasil mencapai 94,59 persen. Dari sisi tata kelola, Pemerintah Provinsi Sumbar juga kembali memperoleh opini Wajar Tan-

pa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025.

"Atas capaian tersebut, DPRD memberikan apresiasi kepada Pemprov Sumbar yang dinilai mampu menjaga stabilitas pengelolaan APBD di tengah situasi yang tidak mudah. Meski demikian, kami juga mengingatkan masih terdapat sejumlah kelemahan yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama dalam peningkatan pengelolaan pendapatan dan penyempurnaan pe-

laksanaan program pembangunan agar lebih efektif pada tahun-tahun mendatang," tegas dia.

Sementara itu, Gubernur Sumbar, Mahyeldi mengatakan, seluruh masukan, kritik, dan rekomendasi yang disampaikan DPRD Sumbar akan menjadi bahan evaluasi penting bagi Pemerintah Provinsi Sumbar dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, serta pelaksanaan pembangunan di masa mendatang.

"Dengan adanya sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan DPRD, kami optimistis kualitas pelayanan publik, pembangunan, serta pengelolaan keuangan daerah akan semakin baik dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Sumbar," tutupnya. (*)

**BREAKING
NEWS!**



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

KURUNG BERITA



SUASANA rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sumbar tahun 2025.



GOVERNUR Sumbar, Mahyeldi menandatangani kesepakatan bersama Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025.



KETUA DPRD Sumbar, Muhidi menandatangani kesepakatan bersama Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025.



WAKIL Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri menandatangani kesepakatan bersama Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025.



WAKIL Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria menandatangani kesepakatan bersama Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025.



SETUJUI—Ketua DPRD Sumbar Muhidi didampingi Wakil Ketua Evi Yandri Rajo Budiman, M Iqra Chisa, Nanda Satria, bersama Gubernur Sumbar, Mahyeldi usai menandatangani persetujuan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 untuk ditetapkan menjadi Perda.





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	KAMIS, 23 JULI 2026	4

SDA TAK LAGI JAMIN KEMAJUAN BANGSA

Muhidi Dorong Guru Siapkan SDM Unggul

PADANG, KP - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi mengingatkan para tenaga pendidik bahwa kekayaan sumber daya alam tidak lagi menjamin kemajuan suatu bangsa. Modal utama untuk memenangi persaingan global terletak pada kualitas sumber daya manusia yang dicetak di sekolah.

Pesan tajam tersebut disampaikan Muhidi saat memberikan materi pada Bimbingan Teknis Guru di salah satu hotel di Kota Padang, Rabu (22/7).

Ia menegaskan bahwa kemajuan negara-negara besar di dunia saat ini murni ditopang oleh keunggulan kapasitas SDM yang adaptif. Guru ditempatkan sebagai pilar utama dalam menen-

tukan arah masa depan bangsa. Peran pendidik di ruang kelas jauh melebihi tugas orang tua dalam membimbing anak di rumah.

"Negara maju tidak lagi bergantung pada sumber daya alam, tetapi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusianya. Kalau di rumah kita mendidik anak kita sendiri, maka di sekolah kita mendidik anak bangsa," kata Muhidi.

Ia meminta para guru tidak hanya terpaku pada penuntasan kurikulum, melainkan juga mengasah kemampuan berpikir kritis dan karakter peserta didik. Guru harus berada di garis depan agar generasi muda siap menghadapi arus perubahan zaman. (fai)



KETUA DPRD Sumbar Muhidi, saat memberikan paparan dalam Bimbingan Teknis Guru di salah satu hotel di Kota Padang, Rabu (22/7).





SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan Harisan Laman Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat	KAMIS, 23 JULI 2026	2

Peningkatan Kompetensi Guru Harus Jadi Perhatian Bersama

PADANG, HALUAN — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menegaskan bahwa guru memegang peran strategis dalam membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu, peningkatan kompetensi tenaga pendidik harus menjadi perhatian bersama.

Hal tersebut disampaikan Muhidi saat memberikan pembekalan pada Bimbingan Teknis (Bimtek) Guru Vokasi yang diikuti guru dari 32 SMK di Kota Padang, Rabu (22/7).

Menurutnya, tantangan dunia pendidikan terus berkembang seiring pesatnya perubahan teknologi dan dinamika global. Kondisi itu menuntut

guru tidak hanya menguasai materi pelajaran, tetapi juga mampu membentuk karakter, kreativitas, dan kepemimpinan peserta didik.

"Guru yang hebat bukan sekadar mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membangun karakter, kreativitas, kepemimpinan, serta membentuk peserta didik yang siap menghadapi perubahan zaman," ujar Muhidi.

Ia menambahkan, generasi yang dipersiapkan menuju Indonesia Emas 2045 harus memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Selain itu, peserta didik juga perlu dibekali literasi digital, literasi finansial, serta kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tantangan global.

Materi yang disampaikan Muhidi mendapat apresiasi dari para peserta. Salah seorang guru SMAK Padang, Yulfitri, mengaku memperoleh banyak wawasan baru mengenai peran guru sebagai pendidik sekaligus

pembimbing dan teladan bagi siswa.

"Kegiatan ini sangat luar biasa. Kami diarahkan menjadi guru yang tidak hanya fokus mengajar, tetapi juga mampu membentuk karakter siswa dan menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan," katanya.

Yulfitri berharap seluruh peserta dapat mengimplementasikan materi yang diperoleh di sekolah masing-masing. Dengan demikian, proses pendidikan tidak hanya melahirkan lulusan yang unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, etika, dan jiwa kepemimpinan yang kuat.

Bimtek Guru Vokasi tersebut menjadi salah satu upaya meningkatkan kapasitas tenaga pendidik di Kota Padang. Melalui penguatan kompetensi guru, diharapkan SMK mampu menghasilkan lulusan yang unggul, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan masa depan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045. (h/len)



Ketua DPRD Sumbar, Muhidi saat memberikan pembekalan pada Bimbingan Teknis (Bimtek) Guru Vokasi yang diikuti guru dari 32 SMK di Kota Padang, Rabu (22/7). IST





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	KAMIS, 23 JULI 2026	2

FRAKSI PPP SOROTI PENURUNAN REALISASI PAD 2025

Minta Pemprov Perkuat Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah

PADANG, HALUAN — Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Provinsi Sumatera Barat menilai Pemerintah Provinsi Sumbar perlu memperkuat berbagai langkah strategis untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu menyusul realisasi PAD Tahun Anggaran 2025 yang secara nominal mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Hal ini ditegaskan Juru Bicara Fraksi PPP DPRD Sumbar, Nofrizon saat rapat kerja pembahasan akhir atas Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025, Senin (20/7).

Nofrizon menyampaikan, target PAD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp2,807 triliun dengan realisasi mencapai Rp2,763 triliun atau 98,45 persen. Meski capaian terhadap target tergolong tinggi, realisasi tersebut masih lebih rendah dibandingkan PAD Tahun Anggaran 2024 yang mencapai Rp2,942 triliun.

"Hal ini menunjukkan bahwa upaya optimalisasi sumber-sumber PAD masih perlu diperkuat agar kemampuan fiskal daerah semakin mandiri dan berkelanjutan," ujar Nofrizon.

Menurutnya, Fraksi PPP meminta Pemerintah Provinsi Sumbar mengambil langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan PAD, khususnya dari sektor pajak daerah. Upaya tersebut antara lain melalui penyempurnaan sarana dan

prasarana pelayanan perpajakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta penyederhanaan sistem pelayanan.

Ia menegaskan, perbaikan pelayanan perpajakan diperlukan agar masyarakat memperoleh kemudahan, kepastian, dan kenyamanan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan wajib pajak dapat terus meningkat.

Selain itu, Fraksi PPP juga mendorong pemerintah daerah

menyiapkan regulasi yang lebih efektif terhadap kendaraan bermotor berpelat nomor luar Provinsi Sumatera Barat (non-BA) yang beroperasi secara tetap dan memperoleh manfaat ekonomi di wilayah Sumbar.

Menurut Nofrizon, kebijakan tersebut perlu diarahkan untuk mendorong pemilik kendaraan melakukan mutasi ke nomor polisi BA, terutama bagi kendaraan yang telah berpindah kepemilikan melalui transaksi jual beli. Dengan demikian, potensi penerimaan

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) maupun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dapat dioptimalkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sektor retribusi daerah, Fraksi PPP juga meminta Pemerintah Provinsi Sumbar segera melakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Evaluasi tersebut, kata Nofrizon, perlu mencakup penambahan objek retribusi yang hingga kini belum memiliki mekanisme pemungutan, sekaligus melakukan penyesuaian tarif retribusi yang sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan kondisi ekonomi, biaya penyelenggaraan layanan, maupun dinamika masyarakat.

"Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah tanpa mengabaikan prinsip keadilan, kepastian hukum, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta tetap menjaga iklim investasi yang kondusif di Sumatera Barat," tutupnya. (*)

AKING
NEWS!



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

KUJUNG BERITA



PENDAPAT AKHIR— Juru Bicara Fraksi PPP DPRD Sumbar, Nofrizon saat menyerahkan dokumen pendapat akhir fraksinya terkait Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025 kepada Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria sebagai pimpinan rapat. IST





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Kamis, 9 Juli 2026 (24 Muharam 1448 H)	8

BANGUN GENERASI EMAS 2045

Ketua DPRD Sumbar Dorong Kepsek Perkuat Kepemimpinan Visioner

PADANG - SINGGALANG

Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi mengajak seluruh kepala SMA dan SMK di wilayahnya untuk memperkuat kepemimpinan yang visioner, adaptif dan inspiratif.

Langkah ini penting dalam menghadapi tantangan dunia pendidikan yang terus berkembang dan mencetak SDM unggul dan berdaya saing.

Hal itu disampaikan Muhidi saat menjadi narasumber dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Kepala SMA/SMK se-Sumatera Barat di Padang, Senin (6/7). (Ist)

Dalam paparannya, Muhidi menegaskan bahwa kepala sekolah (Kepsek) tidak sekadar berfungsi sebagai administrator pendidikan. Mereka adalah pemimpin perubahan yang harus mampu melahirkan generasi unggul, berkarakter dan berdaya saing tinggi menuju Indonesia Emas 2045.

"Generasi emas tidak lahir secara kebetulan. Mereka dibentuk melalui kepemimpinan yang kuat, budaya sekolah yang positif serta komitmen



BIMTEK - Ketua DPRD Sumbar, Muhidi dan moderator saat Bimtek Kepala SMA/SMK se-Sumatera Barat di Padang, Senin (6/7). (Ist)

seluruh insan pendidikan untuk terus berinovasi," ujar Muhidi.

Menurutnya, tantangan pendidikan saat ini makin kompleks. Perkembangan teknologi, digitalisasi hingga perubahan karakter peserta didik menuntut kepala sekolah memiliki kecakapan memimpin yang mampu menggerakkan seluruh potensi sekolah.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara sekolah, orang tua, pemerin-

tah, dunia usaha, dan masyarakat. Sinergi ini diperlukan agar proses pendidikan berjalan optimal dan menghasilkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas.

Muhidi berharap seluruh kepala sekolah di Sumbar mampu menjadi teladan, agen perubahan, sekaligus penggerak peningkatan mutu pendidikan di daerah masing-masing.

"Dunia pendidikan membutuhkan pemimpin yang menginspirasi, bukan sekadar mengelola administrasi. Kepa-

la sekolah harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang inovatif, nyaman, dan berorientasi pada masa depan," tegasnya.

Melalui kegiatan Bimtek tersebut, Muhidi berharap lahir berbagai gagasan dan strategi baru untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Sumatera Barat.

Dengan begitu, Sumbar dapat melahirkan generasi cerdas, berakhlak mulia, serta siap bersaing di tingkat nasional maupun global. (401)





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan Berita Lahan Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat	SABTU, 25 JULI 2026 /	9

PERTANGGUNGJAWABAN APBD 2025 DISETUJUI

DPRD Sumbar Minta Pemprov Benahi Kelema- han Pengelolaan Keuangan

PADANG, HALUAN- DPRD Sumbar menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna yang digelar, Senin (20/7).

Seiring ditetapkannya Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025, DPRD Sumbar mengingatkan sejumlah kelemahan yang masih terdapat dalam pengelolaan pendapatan dan belanja agar mendapat perhatian dari pemerintah pemerintah daerah.

"Agar pengelolaan APBD ke depan semakin berkualitas, efektif, efisien serta dapat

memberikan kontribusi yang maksimal untuk pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, kelemahan yang masih terjadi dalam pengelolaan pendapatan dan belanja agar mendapat perhatian dari pemerintah daerah," ujar Ketua DPRD Sumbar, Muhidi saat memimpin rapat tersebut.

Muhidi menuturkan, secara umum kinerja pengelolaan keuangan daerah pada tahun

2025 sudah cukup maksimal di tengah kondisi APBD yang terkonsentrasi cukup dalam seiring berlakunya Inpres tentang kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat ditambah lagi dengan adanya bencana hidrometeorologi yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur yang memengaruhi ekonomi, dan kondisi sosial.

Ia menyebutkan, dalam kondisi di mana terjadi kontraksi APBD yang cukup dalam tersebut, realisasi pendapatan daerah masih bisa diwujudkan 99,03 persen. Demikian juga belanja daerah masih bisa direalisasikan sebesar 94,59 persen.

"Dari sisi akuntabilitas dan transparansi, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 juga mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan," terangnya.

Muhidi menambahkan, capaian realisasi pendapatan dan belanja dalam pelaksanaan APBD Tahun 2025 tersebut, tentu bukan pekerjaan mudah di tengah kondisi yang tidak menguntungkan.

"Untuk itu, DPRD Provinsi Sumatera Barat memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD Tahun 2025 tersebut," ujarnya.

Dipaparkannya juga, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sendiri merupakan sarana evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan APBD. Setelah disampaikan oleh gubernur pada 18 Juni 2026 lalu, Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD telah dibahas secara mendalam oleh DPRD.

Pembahasan tidak hanya menyangkut pada realisasi

pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah atau SILPA, akan tetapi juga mencakup aspek efektivitas, efisien, akuntabilitas serta capaian target kinerja program dan kegiatan yang telah dijalankan.

Selain itu fraksi-fraksi DPRD Sumatera Barat melalui pandangan umum dan pendapat akhir juga telah memberikan berbagai catatan dan masukan untuk Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025.

"Dari pendapat akhir yang sudah disampaikan, semua fraksi dapat menyetujui hasil pembahasan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025. Kami mengingatkan, berbagai catatan dan masukan dari fraksi-fraksi tersebut agar mendapat perhatian dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, sehingga kualitas pengelolaan keuangan daerah ke depan dapat menjadi lebih baik," tukas Muhidi.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menyampaikan teri-

**AKING
NEWS!**



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

ma kasih kepada DPRD atas masukan dan saran yang telah diberikan terkait Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025. Ia menegaskan, saran dan masukan yang disampaikan akan menjadi perhatian serius untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah ke depan.

"Hingga sampai kepada titik pengambilan keputusan ini, kami yakin DPRD telah bekerja keras melakukan pembahasan yang mendalam terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025. Dari hasil pembahasan tersebut tentunya ada saran dan masukan yang akan menjadi perhatian serius dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah ke depan," ujar Mahyeldi.

Mahyeldi menambahkan, penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan amanat undang-undang. Di sisi lain, hal itu sekaligus sebagai wujud

akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.

Disepakatinya Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tersebut menurut Mahyeldi memberikan gambaran bahwa pemerintah daerah dan DPRD mempunyai pemikiran yang sama dalam pengelolaan keuangan daerah. Saran dan masukan untuk perbaikan menggambarkan keinginan yang sama untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah di masa yang akan datang untuk bisa lebih baik dan bisa meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat.

Dengan telah disepakatinya Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025, tahap selanjutnya adalah pemerintah daerah akan menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Ia berharap, tahapan evaluasi di Kemendagri akan berjalan lancar tanpa kendala. (*)

Berfoto bersama



Ketua DPRD Sumbar, Muhidi memimpin jalannya rapat paripurna



Anggota DPRD Sumbar mengikuti jalannya rapat paripurna



Anggota DPRD Sumbar dalam rapat paripurna yang digelar



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

KLUBING BERITA

Rapat paripurna DPRD Sumbar dengan agenda pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025

KORAN





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
POSMETRO PADANG	SABTU, 25 JULI 2026	8



APEL—Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Sumbar, Dahrul Idris memimpin apel pagi rutin.

Kabag Persidangan Sekretariat DPRD Sumbar Ajak ASN Tingkatkan Kompetensi dan Integritas

PADANG, METRO

Semangat disiplin dan peningkatan kualitas aparatur kembali ditegaskan di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Sumbar, Dahrul Idris, S.STP., M.Si., memimpin apel pagi rutin yang digelar pada Kamis, (23/7), dengan suasana tertib dan penuh semangat pengabdian.

Dalam amanatnya, Dahrul Idris menekankan pentingnya menjaga integritas, etika, serta tanggung jawab dalam menjalankan setiap tugas dan fungsi sebagai aparatur sipil negara. Menurutnya, pelayanan publik yang berkualitas hanya dapat diwujudkan melalui kedisiplinan, profesionalisme, dan komitmen tinggi dari seluruh pegawai.

Ia juga mengajak seluruh ASN dan pegawai untuk terus meningkatkan kapasitas diri dengan mengembangkan kompetensi, memperluas wawasan, serta mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan tuntutan pelayanan publik yang terus berubah.

"Setiap aparatur harus memiliki semangat belajar sepanjang hayat agar mampu memberikan pelayanan yang semakin efektif, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat," pesannya di hadapan peserta apel.

Apel pagi rutin tersebut menjadi momentum untuk memperkuat budaya kerja yang disiplin, produktif, dan inovatif di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Melalui komitmen bersama, diharapkan kualitas pelayanan kepada masyarakat terus meningkat seiring dengan peningkatan kompetensi dan integritas seluruh aparatur. (*)

**BREAKING
NEWS!**



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	SABTU, 25 JULI 2026	2

Pengelolaan APBD 2025, DPRD Sumbar Beri Catatan Strategis

DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) memberikan sejumlah catatan strategis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Meski secara umum menyetujui Ranperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Perda, seluruh fraksi meminta Pemprov Sumbar segera melakukan pembenahan terhadap berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah, mulai dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga kualitas perencanaan anggaran.

Pandangan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025, Senin (20/7).

GERINDRA: PAD MENURUN, ASET DAN BUMD BELUM OPTIMAL

Fraksi Gerindra melalui juru bicara Nurkhalis Dt Bijo menilai pengelolaan fiskal daerah secara umum telah berjalan cukup baik dengan realisasi pendapatan mencapai sekitar 99 persen dan belanja lebih dari 94 persen.

Namun, fraksi Gerindra menyoroti masih menurunnya PAD dibanding tahun sebelumnya, rendahnya kepatuhan wajib pajak kendaraan, serta belum optimalnya pengelolaan berbagai potensi pajak daerah. Karena itu, fraksi Gerindra mendorong reformasi pelayanan perpajakan melalui digitalisasi, perluasan layanan hingga ke pelosok, serta optimalisasi penerimaan dari pajak air permukaan, mineral bukan logam dan batuan (MBLB), serta kendaraan berpelat luar daerah yang beroperasi di Sumbar.

Fraksi ini juga menilai banyak aset daerah dan BUMD belum mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap PAD. Pemerintah diminta mengevaluasi pengelolaan aset dan melakukan restrukturisasi terhadap BUMD yang terus merugi.

Selain itu, tingginya SILPA dan surplus anggaran dinilai menunjukkan masih perlunya perbaikan kualitas perencanaan, pengadaan, dan pengendalian program agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.

PPP: MINTA PAD LEBIH MANDIRI

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui juru bicaranya, Nofrizon menyoroti realisasi PAD Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp2,76 triliun atau 98,45 persen dari target.

Meski persentasenya tinggi, secara nominal capaian tersebut masih lebih rendah dibanding realisasi PAD Tahun 2024 yang mencapai Rp2,94 triliun. Kondisi ini dinilai menunjukkan kapasitas fiskal daerah masih perlu diperkuat. PPP meminta pemerintah meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui penyempurnaan pelayanan perpa-

jakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta penyederhanaan layanan kepada masyarakat.

Fraksi ini juga meminta pemerintah menyiapkan kebijakan khusus terhadap kendaraan bermotor berpelat luar Sumbar (non-BA) yang beroperasi secara tetap di wilayah Sumbar agar dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah.

PDI PERJUANGAN-PKB: SILPA HARUS DIEVALUASI

Fraksi PDI Perjuangan-PKB melalui juru bicara Sri Kumala Dewi menilai pelaksanaan APBD 2025 secara umum telah berjalan baik. Namun, besarnya surplus anggaran dan SILPA tidak boleh dipandang sebagai indikator keberhasilan semata.

Menurut fraksi, kondisi tersebut justru perlu dievaluasi karena diduga dipengaruhi oleh sejumlah program dan kegiatan yang tidak terlaksana secara optimal.

Fraksi meminta pemerintah meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan akuntabilitas pengelolaan APBD agar setiap rupiah anggaran benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga didorong memperkuat kapasitas fiskal melalui optimalisasi PAD, peningkatan kinerja BUMD, pengembangan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, kelautan dan perikanan, serta penataan pengelolaan piutang daerah.

Fraksi PDI Perjuangan-PKB menyatakan menyetujui Ranperda tersebut menjadi Perda, dengan catatan seluruh rekomendasi Badan Anggaran DPRD dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus ditindaklanjuti secara nyata.





SEKRETARIAT DEWA PROVIN KLIP

GOLKAR: EVALUASI EFEKTIVITAS APBD

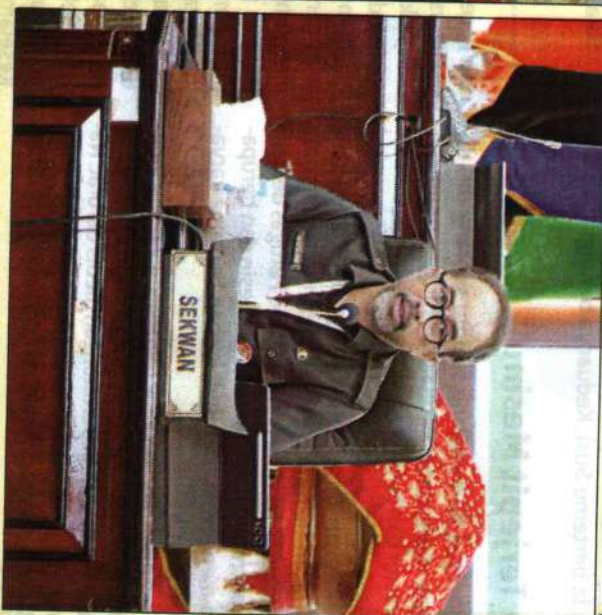
Sementara itu, Fraksi Partai Golkar melalui juru bicara Zakki Zasai menegaskan, pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD bertujuan mengevaluasi realisasi pendapatan, belanja, SILPA, serta efektivitas penggunaan anggaran dalam mencapai target pembangunan.

Fraksi mencatat realisasi pendapatan daerah mencapai Rp6,21 triliun atau 99,03 persen, sedangkan belanja daerah terealisasi sebesar Rp6,04 triliun atau 94,59 persen.

Menurut Golkar, capaian tersebut perlu menjadi bahan evaluasi agar penggunaan APBD tidak hanya memenuhi target serapan anggaran, tetapi juga benar-benar efektif, efisien, dan mampu menjawab berbagai persoalan pembangunan daerah.

Golkar juga menekankan pentingnya menjadikan hasil evaluasi APBD 2025 sebagai dasar penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah pada tahun-tahun berikutnya, sehingga anggaran dapat semakin berkualitas, tepat sasaran, serta memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat Sumbar. (*)

WANGLI, Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria menerima pendapat akhir fraksi - fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar. Sejumlah fraksi memberikan catatan strategis terhadap pengelolaan APBD 2025.



H



ING
VS!



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	SABTU, 25 JULI 2026	9

Tajamkan Renja, Bamus DPRD Tanah Datar 'Berguru' ke DPRD Sumbar

PADANG, KP - Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kabupaten Tanah Datar menyambangi DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk mendalami mekanisme penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan. Kunjungan ini difokuskan untuk memperkuat fondasi pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, hingga pengawasan agar lebih tepat sasaran.

Dalam pertemuan tersebut, kedua lembaga membedah teknis perencanaan program, penyusunan agenda kerja, serta penyelarasan kegiatan DPRD dengan dokumen pembangunan daerah. Langkah ini diambil agar tiap agenda yang dirancang DPRD Tanah Datar benar-benar berdampak langsung pada masyarakat.

"Renja yang disusun secara baik akan menjadi pedoman dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara optimal," kata Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan DPRD Sumbar, Dahrul Idris.

Ia menekankan bahwa kualitas penyusunan Renja sangat menentukan efektivitas kinerja dewan sepanjang tahun. Penyusunan agenda tersebut harus terukur, selaras dengan kebutuhan daerah, serta mampu menjawab aspirasi warga di lapangan.

Pertemuan ini sekaligus menjadi wadah bagi pengalaman dan praktik terbaik antar lembaga legislatif di Sumatera Barat. Melalui pertukaran gagasan ini, diharapkan tercipta inovasi baru dalam mewujudkan tata kelola kelembagaan yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

Rombongan Bamus DPRD Tanah Datar menyambut baik keterbukaan DPRD Sumbar selama diskusi berlangsung. Masukan serta poin penting yang diperoleh dari studi banding ini akan dijadikan patokan dalam merumuskan program kerja yang lebih adaptif dan menjawab kebutuhan publik. (fai)



KABAG Persidangan dan Perundang-undangan DPRD Sumbar Dahrul Idris memberikan penjelasan saat menerima kunjungan Bamus DPRD Tanah Datar di Padang.





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Padang Ekspres	SABTU 25 JULI 2026	2

DPRD Kawal Perbaiki APBD Sumbar

Di tengah tekanan fiskal dan dampak bencana hidrometeorologi, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dinilai mampu menjaga kinerja pengelolaan keuangan daerah sepanjang 2025. Namun, di balik apresiasi tersebut, DPRD Sumbar mengingatkan agar pemerintah tidak berpuas diri dan segera membenahi kualitas belanja serta pengelolaan pendapatan daerah.

Penegasan itu disampaikan Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, saat memimpin rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Sumbar.

Menurut Muhidi, APBD 2025 menghadapi tantangan berat akibat kebijakan efisiensi fiskal pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres) yang menyebabkan kontraksi anggaran. Kondisi tersebut semakin diperberat oleh bencana hidrometeorologi yang merusak berbagai infrastruktur vital dan berdampak pada aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat.

"Secara umum, kinerja pengelolaan keuangan daerah sudah cukup maksimal di tengah kondisi APBD yang berkontraksi cukup dalam. Situasi ini juga diperberat oleh bencana hidrometeorologi yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan memengaruhi stabilitas ekonomi maupun kondisi sosial masyarakat," kata Muhidi.

Di tengah tekanan tersebut, realisasi pendapatan daerah mencapai 99,03 persen dari target, sedangkan realisasi belanja menyentuh 94,59 persen. Dari sisi akuntabilitas, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sumbar Tahun 2025 kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Muhidi menilai capaian tersebut layak diapresiasi karena diraih dalam situasi fiskal yang tidak mudah. Menurutnya, mempertahankan opini WTP sekaligus menjaga serapan anggaran di atas 90 persen merupakan indikator bahwa tata kelola keuangan daerah

tetap berjalan baik.

Meski demikian, DPRD menegaskan masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Evaluasi tidak hanya menasar besaran realisasi anggaran, tetapi juga kualitas belanja, efektivitas program, hingga optimalisasi pendapatan daerah.

"Pembahasan tidak hanya menyangkut angka realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan, maupun SILPA, tetapi juga efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, serta sejauh mana target kinerja program dan kegiatan benar-benar tercapai," ujar Muhidi.

Ia menekankan APBD ke depan

harus lebih diarahkan pada program-program yang memberikan dampak langsung terhadap percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, setiap alokasi belanja perlu dipastikan tepat sasaran dan memiliki manfaat nyata.

Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 sendiri dibahas sejak diserahkan Gubernur Sumbar pada 18 Juni 2026. Pembahasan dilakukan secara mendalam oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), disertai masukan dari seluruh fraksi melalui pandangan

umum dan pendapat akhir.

Menanggapi berbagai catatan tersebut, Gubernur Sumbar Mahyeldi memastikan seluruh rekomendasi DPRD akan menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.

"Hasil pembahasan DPRD tentu melahirkan berbagai saran dan masukan yang menjadi perhatian serius kami untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah," kata Mahyeldi.

Ia menegaskan laporan pertanggungjawaban APBD bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif,

tetapi merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat atas penggunaan anggaran publik.

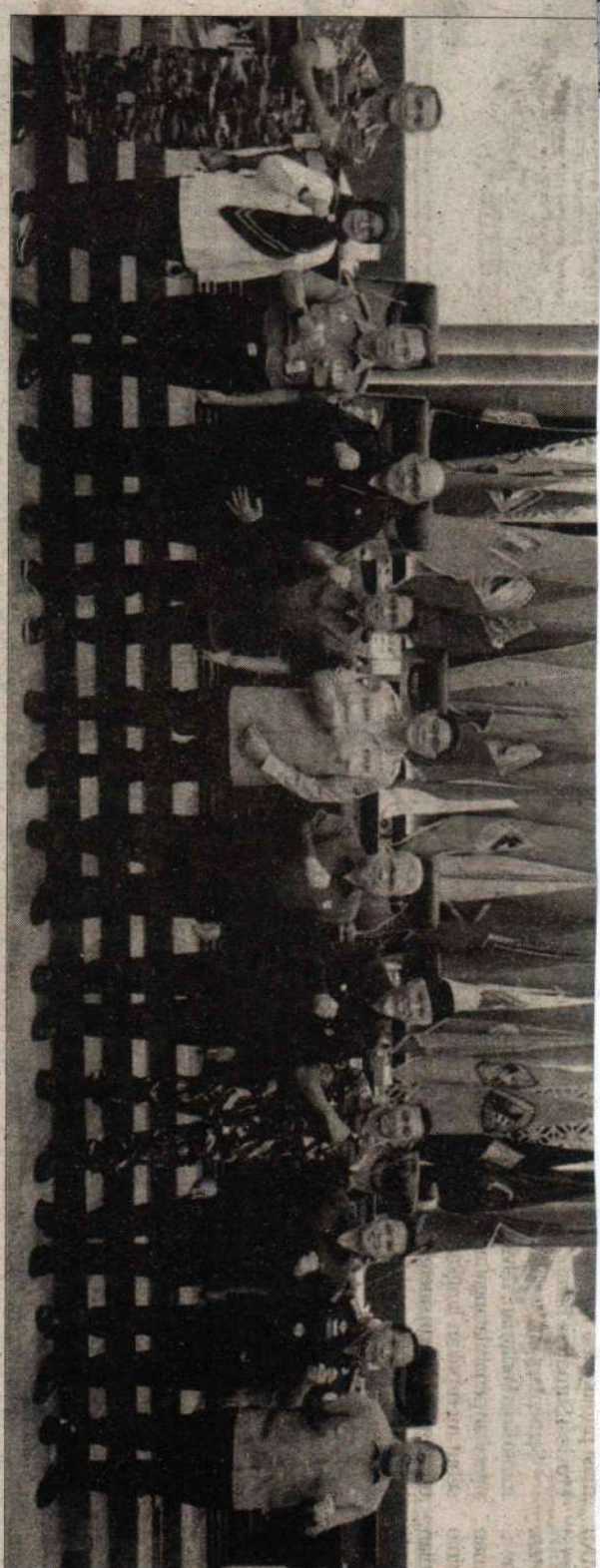
Setelah disetujui dalam rapat paripurna, Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 selanjutnya akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk menjalani proses evaluasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. Pemerintah Provinsi Sumbar optimis tahapan evaluasi tersebut dapat berjalan lancar sehingga hasilnya dapat menjadi pijakan memperkuat kualitas tata kelola keuangan daerah pada tahun-tahun berikutnya. (*)

NEWS

BREAKING
NEWS!

103

AKILAN RAKYAT DAERAH ERA BARAT



KETUA DPRD Sumbar Muhiidi bersama unsur forkopimda dalam rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Sumbar.



DISAKSIKAN Ketua DPRD Sumbar, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menandatangani berita acara penetapan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Sumbar.



KETUA DPRD Sumbar menandatangani berita acara penetapan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Sumbar.



KETUA DPRD Sumbar Muhiidi menyerahkan plakat kepada Kapolda Sumbar Ijen Poi Djati Wiyoto Abadhy di sela-sela rapat paripurna.



SEKRETARIAT

KO

BREAKING NEWS!



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Sabtu, 25 Juli 2026 (10 Syafar 1448 H)	2

BERHASIL ATASI KONTRAKSI ANGGARAN

DPRD Beri Catatan Strategis untuk APBD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar dalam mengelola keuangan daerah sepanjang tahun anggaran 2025.

Kendati postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengalami tekanan dan kontraksi yang cukup dalam, jajaran eksekutif dinilai tetap mampu menorehkan capaian kinerja yang baik.

Pernyataan apresiasi tersebut ditegaskan oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, saat memimpin rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Sumbar baru-baru ini.

Menurut Muhidi, kondisi pengelolaan keuangan daerah sepanjang tahun lalu berada dalam situasi yang penuh tantangan ekonomi dan sosial. Kontraksi anggaran dipicu oleh kebijakan efisiensi fiskal dari pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres). Situasi tersebut diperparah oleh serangkaian bencana hidro-meteorologi yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat, hingga mengakibatkan kerusakan masif pada infrastruktur vital daerah.

"Secara umum, kinerja pengelolaan keuangan daerah

sudah cukup maksimal di tengah kondisi APBD yang terkontraksi cukup dalam seiring berlakunya Inpres tentang kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat. Kondisi ini kian berat dengan adanya bencana hidro-meteorologi yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur yang secara langsung memengaruhi stabilitas ekonomi dan kondisi sosial masyarakat," ujar Muhidi di hadapan peserta rapat paripurna.

Realisasi Fiskal dan Opini WTP

Kendati dibayangi dinamika fiskal yang fluktuatif, Pemprov Sumbar mencatatkan realisasi pendapatan daerah yang sangat positif, yakni mencapai 99,03 persen dari target yang ditetapkan. Sementara itu, dari sisi serapan anggaran, belanja daerah berhasil direalisasikan sebesar 94,59 persen.

Keberhasilan pengelolaan keuangan ini kian paripurna karena didukung oleh aspek

transparansi yang kuat. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

"Dari sisi akuntabilitas dan transparansi, LKPD Tahun 2025 juga mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK," terang Muhidi.

Ia menambahkan bahwa mempertahankan predikat WTP dan menjaga rasio realisasi anggaran di atas 90

persen di tengah situasi krisis bukanlah perkara yang mudah. Oleh karena itu, lembaga legislatif sepakat memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada mitra kerja mereka di eksekutif.

Catatan Strategis untuk Evaluasi Belanja

Meski menghujani Pemprov Sumbar dengan pujian, DPRD tetap menjalankan fungsi pengawasannya dengan memberikan sejumlah catatan kritis. Muhidi mengingatkan bahwa pemerintah daerah tidak boleh berpuas diri, sebab masih ditemukan beberapa kelemahan substantif yang memerlukan evaluasi mendalam, baik pada pos pengelolaan pendapatan maupun ketepatan sasaran belanja daerah.

Langkah ini diperlukan agar struktur APBD ke depan semakin berkualitas, efektif,

dan efisien. Penajaman anggaran belanja harus diprioritaskan pada program-program stimulus yang memberikan kontribusi nyata bagi percepatan pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat umum.

Rangkaian pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 ini berlangsung secara maraton dan dinamis setelah resmi diserahkan oleh Gubernur Sumbar pada 18 Juni 2026 lalu. Proses bedah anggaran dilakukan secara mendalam oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

KING
NEWS!



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

"Pembahasan tidak hanya menyangkut pada angka-angka realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Lebih dari itu, kami mencakup aspek efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, serta sejauh mana capaian target kinerja dari program dan kegiatan yang telah direncanakan," tegas politisi tersebut.

Selain melalui pembahasan di tingkat komisi dan Banggar, fraksi-fraksi di DPRD Sumbar juga menyuarakan catatan strategis dan rekomendasi melalui pemaparan Pandangan Umum serta Pendapat Akhir Fraksi. Masukan-masukan tersebut wajib ditindaklanjuti secara konkret oleh pemerintah

daerah demi perbaikan tata kelola keuangan pada masa mendatang.

Komitmen Eksekutif dan Tahapan Evaluasi Mendagri

Merespons pandangan legislatif, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menyampaikan rasa terima kasih dan penghormatan yang mendalam atas kerja keras seluruh anggota dewan. Ia memastikan bahwa seluruh catatan, saran, dan kritik konstruktif yang tertuang dalam dokumen pandangan fraksi akan menjadi perhatian serius dan bahan rujukan utama bagi perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan.

"Hingga sampai kepada titik pengambilan keputusan ini, kami yakin DPRD telah bekerja keras melakukan pembahasan yang komprehensif terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelak-

sanaan APBD Tahun 2025.

Dari hasil pembahasan tersebut, tentunya ada saran dan masukan yang akan menjadi perhatian serius kami dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah," tutur Mahyeldi.

Mahyeldi menekankan bahwa penyampaian laporan pertanggungjawaban ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban formal atas amanat undang-undang. Dokumen ini merupakan wujud nyata kepatuhan moral dan akuntabilitas publik dari pemprov kepada seluruh lapisan masyarakat Sumatera Barat atas penggunaan uang negara.

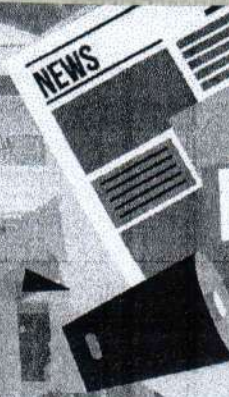
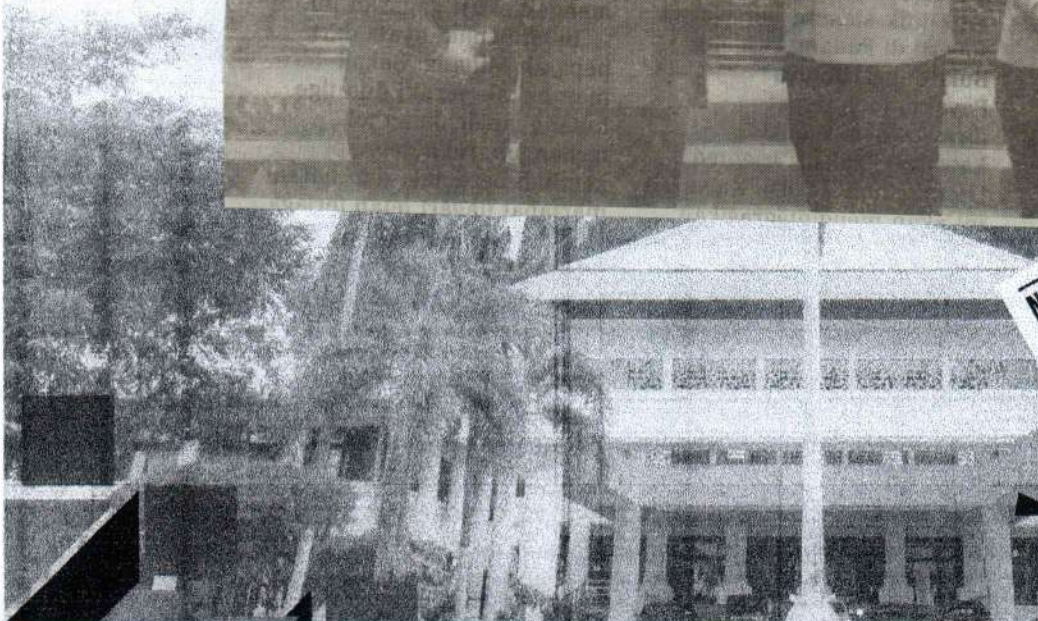
Disetujuinya Ranperda ini menjadi bukti solidnya sinergisitas tata kelola pemerintahan (good governance) antara eksekutif dan legislatif di Sumbar. Kesamaan visi ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan ekonomi daerah pascabencana.

Pascapenandatanganan persetujuan bersama dalam rapat paripurna tersebut, Pemprov Sumbar akan langsung bergerak cepat meneruskan dokumen Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) di Jakarta untuk menjalani proses evaluasi akhir. Mahyeldi optimistis tahapan fasilitasi dan evaluasi di Kemendagri dapat berjalan lancar tanpa kendala administratif yang berarti. (*)





SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT



**BREAKING
NEWS!**

107



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT



**BREAKING
NEWS!**

100



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	SENIN, 27 JULI 2026	2

SOSIALISASIKAN PERDA NO. 5/2020 Ketua DPRD Sumbar Soroti Tawuran, Narkoba, hingga LGBT



Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kota Padang. IST

PADANG, HALUAN

— DPRD Provinsi Sumatera Barat terus memperkuat upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di tengah meningkatnya berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat.

Sekaitan dengan ini pada Sabtu (25/7), Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kota Padang.

Kegiatan tersebut dihadiri unsur pemerintah daerah, Satpol PP, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta berbagai elemen masyarakat. Sosialisasi itu bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya menaati aturan guna menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif.

Camat Padang Timur, Aidil Zulham, mengapresiasi inisiatif Ketua DPRD Sumbar menggelar sosialisasi perda yang dinilai relevan dengan kondisi saat ini. Menurutnya, berbagai persoalan yang berkaitan dengan ketertiban

umum semakin sering terjadi sehingga diperlukan pemahaman yang sama di tengah masyarakat.

“Belakangan ini banyak persoalan yang berkaitan dengan ketertiban masyarakat. Karena itu, sosialisasi seperti ini sangat penting agar masyarakat memahami aturan yang berlaku. Kami berharap para peserta, terutama tokoh masyarakat, dapat menyampaikan kembali informasi ini kepada warga di lingkungan masing-masing sehingga manfaatnya semakin luas,” ujarnya.

Dalam paparannya, Muhidi menegaskan bahwa kehidupan yang aman dan damai hanya dapat terwujud apabila seluruh masyarakat mematuhi aturan yang berlaku.

“Kalau ingin hidup tenang, maka kita harus mengikuti aturan. Dalam kehidupan bernegara ada aturan yang harus dipatuhi, mulai dari undang-undang di tingkat nasional hingga peraturan daerah di tingkat provinsi. Perda ini hadir untuk menjaga ketenteraman dan memberikan kepastian hukum di tengah masyarakat,” katanya.

Muhidi mengaitkan

pentingnya ketertiban umum dengan upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia yang unggul tidak akan tercapai tanpa terciptanya rasa aman di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

“Anak-anak tumbuh di tiga lingkungan, yakni keluarga, masyarakat, dan pendidikan. Semua itu membutuhkan rasa aman. Kalau masih terjadi tawuran, bagaimana anak-anak bisa nyaman berangkat sekolah dan masyarakat dapat bekerja dengan tenang. Karena itu, menjaga ketertiban merupakan tanggung jawab bersama,” ujarnya.

Ia juga menyoroti sejumlah tantangan sosial, seperti penyalahgunaan narkoba dan persoalan LGBT, yang menurutnya memerlukan perhatian seluruh elemen masyarakat.

“Maksiat sering berkembang karena orang-orang baik memilih diam. Kalau masyarakat yang peduli berani mengingatkan dan mengambil peran, tentu berbagai penyimpangan sosial dapat dimini-

malisasi,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sumatera Barat, Irwan, menjelaskan bahwa Perda Nomor 5 Tahun 2020 saat ini tengah dipersiapkan untuk direvisi agar selaras dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.

Menurutnya, salah satu perubahan mendasar berkaitan dengan mekanisme penanganan tindak pidana ringan (tipiring).

“Jika sebelumnya terdapat kewenangan tertentu dalam proses penegakan, kini mekanisme tersebut disesuaikan dengan aturan baru yang lebih menitikberatkan pada penerapan sanksi denda,” katanya.

Irwan menambahkan, dalam beberapa bentuk pelanggaran tertentu, proses hukum memerlukan adanya laporan atau pengaduan dari pihak yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia menegaskan, pemerintah daerah bersama Satpol PP tetap berkomitmen menjaga ketertiban umum sekaligus mempertahankan nilai-nilai masyarakat Sumatera Barat yang berlandaskan falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK).

Menurut Irwan, sebelum direvisi, Perda Nomor 5 Tahun 2020 telah mengatur berbagai aspek penegakan ketertiban, mulai dari ketertiban jalan dan jalur hijau, ketertiban sosial, hingga ketertiban perizinan sebagai bagian dari upaya mewujudkan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat. (h/len)



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	SELASA, 28 JULI 2026	2

Bundo Kanduang Padang Dukung Penerapan Perda Tranribumlimmas

PADANG, HALUAN

—Bundo Kanduang Kecamatan Padang Selatan mengesahkan komitmen mendukung penerapan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Tranribumlimmas). Organisasi perempuan adat itu siap menjadi mitra pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya budaya tertib.

Komitmen tersebut disampaikan Ketua Bundo Kanduang Kecamatan Padang Selatan, Eris Triana, saat menghadiri sosialisasi Perda Nomor 5 Tahun 2020 yang digelar Ketua DPRD Sumbar, Muhi di Padang, Minggu (26/7).

Menurut Eris, sosialisasi Perda masih perlu terus dilakukan karena belum seluruh masyarakat memahami aturan yang

mengatur hak dan kewajiban warga dalam kehidupan bermasyarakat.

“Kami mendukung penuh Perda Nomor 5 Tahun 2020. Sosialisasi seperti ini sangat penting karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui isi perda, sehingga pemahamannya perlu terus diperkuat,” ujarnya.

Ia menilai, salah satu persoalan yang masih kerap ditemukan ialah penggunaan bahu jalan untuk pelaksanaan pesta atau kegiatan masyarakat. Tradisi dan kebersamaan, katanya, tetap harus dijaga, namun pelaksanaannya tidak boleh mengabaikan kepentingan umum.

“Kegiatan masyarakat tentu harus kita hormati, tetapi jangan sampai mengganggu pengguna jalan lain. Semua harus saling menghargai agar aktivitas masyarakat tetap berjalan dengan nyaman,” katanya. Sebagai organisasi yang dekat dengan masyarakat,

lanjut Eris, Bundo Kanduang siap berperan aktif menyosialisasikan pentingnya menaati aturan demi terciptanya lingkungan yang tertib, aman, dan harmonis.

“Kami siap menjadi bagian dari pemerintah untuk mengajak masyarakat memahami perda ini. Ketertiban bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhi, menjelaskan bahwa Perda Nomor 5 Tahun 2020 disusun sebagai landasan hukum untuk menjaga ketertiban dan ketertiban umum di Sumatera Barat.

“Setiap kehidupan bermasyarakat membutuhkan aturan. Salah satu yang diatur dalam perda ini adalah tertib jalan, sehingga hak setiap warga tetap terlindungi,” ujarnya.

Sementara itu, Camat Padang Selatan, Wilman

Mukhtar, mengajak seluruh elemen masyarakat ikut mengawal pelaksanaan perda di lingkungan masing-masing. Menurutnya, kepedulian masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan ketertiban dan ketertiban.

“Kalau menemukan persoalan di lingkungan, mari kita komunikasikan dengan pemerintah. Kita harus memahami bahwa

dalam hidup bermasyarakat ada hak orang lain yang juga harus dihormati,” katanya.

Melalui sosialisasi tersebut, diharapkan pemahaman masyarakat terhadap Perda Nomor 5 Tahun 2020 semakin meningkat, sehingga budaya tertib dapat tumbuh dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. (h/len)



Sosialisasi Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tranribumlimmas yang digelar Ketua DPRD Sumbar, Muhi di Padang. IST

BREAKING
NEWS!



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Rakyat Sumbar SELASA, 28 JULI 2026		9

DPRD Sumbar Gelar Paripurna Penyampaian Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026

Padang, Rakyat Sumbar— DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar rapat paripurna agenda Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tahun 2026, di ruang sidang utama, Senin, (27/7) siang.

Sesuai dengan Pasal 170 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dalam rangka penyusunan Perubahan APBD, Kepala Daerah menyusun Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menjadi pedoman untuk penyusunan Rancangan Perubahan APBD yang diajukan kepada DPRD Provinsi Sumbar M. Iqra Chissa Putra, saat memimpin sidang paripurna.

la melanjutkan, secara umum muatan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS 2026 yang disampaikan pemerintah daerah sudah

diketahui, baik terhadap perubahan asumsi makro, perubahan kebijakan dan target pendapatan dan belanja daerah serta perubahan kebijakan pembiayaan daerah.

Melihat dari konstruksi target pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang diusulkan dalam Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2026, kita perlu meresposi kembali beberapa kebijakan dan target-target yang sudah ditetapkan pada Perda APBD tahun 2026," ucap Iqra.

Menurut Iqra, sesuai Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pengeseran anggaran antar organisasi, antar program dan antar jenis belanja, keadaan yang

menyebabkan SILPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan pada tahun anggaran berjalan, serta terjadinya kondisi darurat dan keadaan mendesak.

Selanjutnya dalam Pasal 161 ayat (1) dijelaskan pula, Perubahan APBD juga dilakukan dengan memperhatikan laporan realisasi anggaran semester pertama yang merupakan gambaran terhadap pencapaian target asumsi KUA pada semester pertama tahun anggaran berjalan," ungkap Iqra, didampingi wakil ketua Evi Yandri Rajo Budiman Nanda Satria.

la menyebutkan, memperhatikan laporan anggaran realisasi semester pertama tahun 2026, dimana realisasi belanja daerah rata-rata sebesar 36,38 persen, dan realisasi pendapatan baru sebesar 48,92 persen serta adanya SILPA APBD tahun 2025 sebesar Rp-284.666.043.617, yang bisa digu-

nakan pada tahun anggaran berjalan termasuk adanya tambahan TKD.

"Maka APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2026, perlu dilakukan Perubahan, agar APBD dapat lebih akomodatif, produktif dan lebih efektif untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah," sebutnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseiny mengatakan rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tahun 2026 belum sepenuhnya mengkomodir semua usulan dan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.

"Namun, dengan mempertimbangkan perubahan RKPD tahun 2026 dan kapasitas keuangan daerah yang tersedia, kami telah berusaha seoptimal mungkin dalam penyusunan rancangan tersebut," pungkasnya. (*)

BREAKING NEWS!



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA



SEJUMLAH anggota DPRD Sumbar M. saat mengikuti rapat paripurna Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tahun 2026, di ruang sidang utama, Senin, (27/7).



WAKIL Ketua DPRD Sumbar M. Iqra Chissa Putra didampingi Evi Yandri Rajo Budiman, Nanda Satria, dan Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, saat rapat paripurna Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Perubahan



WAKIL Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tahun 2026, saat rapat paripurna di ruang sidang utama, Senin, (27/7) siang.



WAKIL Ketua DPRD Sumbar M. Iqra Chissa Putra, Evi Yandri Rajo Budiman, Nanda Satria, mendengarkan Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, menyampaikan Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tahun 2026, saat rapat paripurna di ruang sidang utama, Senin, (27/7) siang.



WAKIL Ketua DPRD Sumbar M. Iqra Chissa Putra didampingi Evi Yandri Rajo Budiman, Nanda Satria, menerima nota pengantar dari Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, saat rapat paripurna Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tahun 2026, di ruang sidang utama, Senin, (27/7) siang.

NEWS

**BREAKING
NEWS!**

112



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Rakyat Sumbang	SELASA, 28 JULI 2026	9

Nurfirmanwansyah Sosialisasikan Perda Penyelenggaraan Pendidikan

Muara Labuh, Rakyat Sumbang
— Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 mengatur tentang Penyelenggaraan Pendidikan, yang bertujuan menjamin pemerataan akses, peningkatan mutu dan kepastian biaya bagi masyarakat.

Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Drs. H. Nurfirmanwansyah, Apt, MM saat di konfirmasi Senin (27/7) mengatakan,

kegiatan Anggota DPRD untuk mensosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) merupakan bagian dari fungsi pengawasan, penyelesaian produk hukum daerah, dan tanggung jawab membantani masyarakat agar memahami hak serta kewajiban hukum mereka.

"Adapun tujuan dan fungsi sosialisasi Perda Pendidikan memberi pemahaman hukum serta memastikan warga, orang tua dan guru

paham isi Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan," kata Nurfirmanwansyah.

Kemudian, lanjutnya, kami menginformasikan program wajib belajar 12 tahun serta akses pendidikan tanpa diskriminasi, serta mencegah anak putus sekolah menyampaikan informasi penting agar tidak ada anak daerah yang putus sekolah karena

kendala biaya.

"Tanggungjawab mengatur peran aktif pemerintah daerah, masyarakat, serta dunia usaha dalam menjamin kualitas pendidikan, mutu dan layanan, serta meningkatkan standar pelayanan minimal, pengelolaan tenaga pendidik, serta relevansi kurikulum dengan kebutuhan daerah," ujar anggota DPRD Sumbang dari Dapil Solok Raya itu.

NEWS

BREAKING
NEWS!



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG RABU, 29 JULI 2026		2

ANTREAN PENGISIAN BBM MASIH 'MENGULAR'

Kinerja Satgas Pengawasan Dipertanyakan

PADANG, KP — Antrean panjang kendaraan yang masih terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) memicu keprihatinan legislatif. Anggota Komisi IV DPRD Sumbang, Muzli M Nur, mempertanyakan efektivitas kinerja Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan BBM dalam menertibkan tata kelola distribusi BBM bersubsidi.

Muzli menilai, fenomena antrean kendaraan hingga berjam-jam menjadi indikator kuat adanya masalah serius pada rantai penyaluran di lapangan.

Pasalnya, pihak Pertamina berulang kali mengklaim bahwa pasokan BBM untuk wilayah Sumbang dalam kondisi aman dan mencukupi.

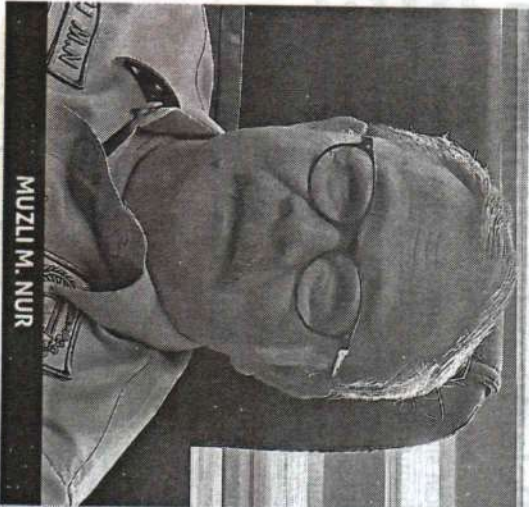
"Kalau kita konfirmasi ke Pertamina, mereka menyatakan stok BBM mencukupi. Kalau memang stok cukup, mengapa antrean panjang masih terjadi hampir di setiap SPBU? Ini yang harus

dijelaskan kepada masyarakat," ujar Muzli M Nur, Selasa (28/7).

Ia menduga, BBM bersubsidi rentan bocor dan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Praktik penyimpangan tersebut sangat merugikan warga berpenghasilan rendah serta memicu dampak berantai terhadap kelancaran arus logistik dan kenaikan harga bahan pokok.

Muzli mendesak Gubernur Sumbang segera bertindak tegas dengan mengumpulkan seluruh kepala daerah kabupaten dan kota beserta aparat penegak hukum guna mengusut tuntas penyebab utama antrean panjang kendaraan di SPBU.

"Pengawasan intensif di tingkat SPBU harus ditingkatkan agar alokasi subsidi benar-benar mendarat ke tangan masyarakat yang membutuhkan," pungkasnya. (fai)



MUZLI M. NUR

BREAKING NEWS



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
	Rakyat Sumbang RABU, 29 JULI 2026	9

Tindak Tegas Oknum Guru Berperilaku Menyimpang

Muara Labuh, Rakyat Sumbang
— Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai Nasdem, Nanda Satria bergerak cepat menyikapi dugaan pelanggaran yang melibatkan seorang oknum guru di Kabupaten Solok Selatan.

Menerima informasi mengenai peristiwa tersebut, Nanda Satria langsung berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat agar oknum guru yang bersangkutan segera dinonaktifkan dari tugasnya selama proses pemeriksaan berlangsung.

Ia menegaskan, apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku, maka oknum guru tersebut harus diberhentikan sesuai mekanisme hukum dan peraturan kepegawaian.

"Hari ini yang bersangkutan telah dinonaktifkan, dan tim dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat juga sudah turun langsung ke Solok Selatan untuk melakukan penanganan dan pendalaman terhadap kasus ini," ujar Nanda Satria.

Selain mengawal proses penanganan kasus, Nanda Satria juga akan menindaklanjutinya melalui Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat. Ia mendorong Dinas Pendidikan Provinsi untuk menyusun program yang lebih konkret dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman bagi seluruh peserta didik.

Menurutnya, program Sekolah Aman dan Nyaman harus menjadi prioritas bersama sehingga kasus serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang. Upaya pencegahan, pengawasan serta perlindungan terhadap siswa harus diperkuat melalui kebijakan yang terukur dan berkelanjutan.

Nanda Satria menegaskan komitmennya untuk terus mengawal

proses penanganan perkara tersebut hingga tuntas. Apabila nantinya terbukti bersalah berdasarkan hasil pemeriksaan resmi, ia memastikan akan mengawal agar oknum guru tersebut diberikan sanksi tegas, termasuk pemberhentian tidak hormat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kita ingin dunia pendidikan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan memberikan rasa percaya kepada masyarakat. Tidak boleh ada toleransi terhadap pelanggaran yang mencederai kepercayaan publik," tegasnya.

Kasus ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan di lingkungan pendidikan serta memastikan perlindungan terhadap peserta didik menjadi prioritas utama pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.

Pada kesempatan itu Nanda Satria, berharap pada semua siswa yang punya bukti dan data terkait adanya oknum guru yang berperilaku menyimpang (LGBT) untuk dapat menyerahkan pada pihak terkait baik dari pihak sekolah maupun dari pihak lainnya untuk pembuktian terkait dugaan adanya tindakan guru yang berperilaku menyimpang tersebut.

Sebelumnya Kepala SMAN 1 Solseil, Mairisna pada wartawan melalui telepon seluler, Senin (27/7) membenarkan adanya aksi demo siswa terkait adanya oknum guru sekolah itu yang berperilaku menyimpang.

"Benar demo pak, namun kami masih menelusuri bukti terkait tuntutan siswa yang mengatakan adanya perbuatan menyimpang salah seorang guru di sekolah kita. Sebaiknya bapak datang langsung biar bisa kami jelaskan," kata Mairisna, Senin (27/7). (juf)

BREAKING
NEWS!



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KURUNG BERITA

KORAN

AN



WAKIL Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria





SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Rakyat Sumbar RABU, 29 JULI 2026		3

Nurfirmanwansyah Sosialisasikan Perda Provinsi No 2 Tahun 2019

Tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Solok Selatan, Rakyat Sumbar—Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat Nurfirman Wansyah menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, di Kabupaten Solok Selatan.

Dalam kegiatan yang dihadiri guru, kepala sekolah, dan tokoh masyarakat itu, Nurfirman menegaskan Perda No 2 Tahun 2019 adalah payung hukum Pemprov Sumbar untuk menjamin pemerataan, mutu, dan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.

"Perda ini mengatur tentang wajib belajar 12 tahun, peran pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Kita tidak ingin ada lagi anak Sumbar yang putus sekolah karena terbentur biaya," ujar Nurfirmanwansyah saat dikonfirmasi kemaren.

Menurutnya, Komisi 5 DPRD Sumbar yang membina pendidikan, kesehatan, dan keagamaan memiliki tanggung jawab memastikan produk hukum daerah ini tidak hanya menjadi dokumen, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya sampai ke tingkat nagari.

"Memasyarakatkan produk hukum daerah untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul. Itu tujuan kita bersama," tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Nur-

firman juga menyinggung kebijakan beberapa negara terkait penggunaan gawai oleh pelajar. Di sejumlah negara, pemerintah mulai mengatur batasan penggunaan handphone di sekolah dan usia minimal

penggunaan media sosial.

Siswa SD dan SMP dilarang membawa handphone ke sekolah sejak 2018. Sementara di Amerika Serikat dan Australia, beberapa negara bagian mewajibkan usia minimal 13 tahun

untuk membuat akun media sosial, dan tengah mengkaji kenaikan menjadi 16-17 tahun karena dampak kesehatan mental.

"Ini bisa jadi bahan kajian kita. Bagaimana anak bisa fokus belajar, tapi juga terlindungi

dari dampak negatif gadget. Perda No 2/2019 juga mendorong pendidikan karakter dan literasi digital bagi peserta didik," jelas Nurfirman.

Sosialisasi ini juga menjadi wadah menyerap aspirasi dari

pelaku pendidikan di Solok Selatan terkait kendala di lapangan. Diharapkan Pemkab Solok Selatan dapat bersinergi dengan Pemprov dalam mengalokasikan anggaran pendidikan secara tepat sasaran. (juf)





ANGGOTA DPRD Provinsi Sumatera Barat Drs H Nufirmanwansyah, Apt, MM usai Sosialisasi Perda.



BREAKING NEWS



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	RABU, 29 JULI 2026	1

KEJATI DIMINTA FOKUS TINDAK OKNUM Penanganan Korupsi KUR Jangan Sudutkan Bank Nagari

PADANG, HALUAN— Sekretaris Komisi III DP-
RD Sumatera Barat (Sum-
bar), Nofrizon menyoroti
proses penanganan kasus
dugaan korupsi penyaluran
Kredit Usaha Rakyat (KUR)
oleh Kejaksaan Tinggi (Ke-
jati) Sumbar yang dinilai
terkesan menyudutkan Bank
Nagari secara kelembagaan.

Nofrizon mengatakan,
DPRD Sumbar mendukung
penuh setiap penanganan
kasus korupsi yang dilakukan
aparatus penegak hukum
(APH). Namun, proses pe-
nanganannya diharapkan
dilakukan secara profesional
dan proporsional dengan
fokus mengusut oknum
yang terlibat.

Terkait dugaan korupsi
penyaluran KUR di Bank
Nagari Talawi, Nofrizon
menyayangkan adanya kete-
rangan pers dan informasi
yang disampaikan melalui
media sosial Kejati Sumbar
yang terkesan menyudutkan
Bank Nagari secara kelem-
bagaan hingga menjadi viral
di tengah masyarakat. Salah
satunya adalah pernyataan
mengenai rencana pemer-
iksaan terhadap seluruh
jajaran direksi Bank Nagari



Sekretaris Komisi III DPRD Sumbar, Nofrizon. IST

dan pihak OJK.

"Kenapa sasarannya se-
lah-olah Bank Nagari secara
menyeluruh, sampai akan
memeriksa seluruh jajaran
direksi, kemudian keterang-
an yang disampaikan di
media itu viral. Saya sangat
menyayangkan hal ini. Jan-
gan sampai penanganan
kasus ini membuat citra
Bank Nagari menjadi buruk
dan menurunkan tingkat
kepercayaan masyarakat
terhadap lembaga perban-
kan kita," ujar Nofrizon di
Kantor DPRD Sumbar,
Selasa (28/7).

Ia mengaku kecewa se-
lah mengikuti pemberitaan
dan pernyataan Kejati Sum-

bar tersebut. Menurutnya,
penyampaian informasi
kepada publik seharusnya
dilakukan secara hati-hati.
"Jika ada oknum yang me-
lakukan kesalahan, silakan
diproses, tetapi jangan sam-
pai lembaga perbankannya
yang diobok-obok. Lemba-
ga perbankan sangat ber-
gantung pada kepercayaan
masyarakat. Jika kepercayaan
masyarakat menurun, tentu
akan berdampak terhadap
kinerja Bank Nagari," kata-
nya.

Nofrizon mengingatkan,
Bank Nagari merupakan
salah satu Badan Usaha Milik





SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

Daerah (BUMD) yang sehat dan mampu memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumbar. Dividen yang diberikan Bank Nagari, menurutnya, mencapai sekitar setengah triliun rupiah setiap tahun.

Dengan kondisi Sumbar yang bukan merupakan daerah industri maupun pertambangan, Bank Nagari menjadi salah satu penyumbang PAD terbesar yang sangat diandalkan pemerintah daerah.

Selain memberikan dividen yang besar Bank Nagari juga dinilai mampu menjaga kualitas penyaluran kredit. Hal itu terlihat dari rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) yang hanya berada di kisaran 2,8 persen.

Ia juga menyebut tingkat kepercayaan pemerintah pusat terhadap Bank Nagari masih sangat baik. Hal itu dibuktikan dengan ratusan miliar rupiah dana pusat untuk pelaksanaan berbagai proyek di Sumbar yang dikelola melalui Bank Nagari.

Ia menyebut, dampak pemberitaan mulai dirasakan di tengah masyarakat. Banyak warga

hingga pelaku usaha yang mempertanyakan kondisi Bank Nagari kepada DPRD Sumbar. "Kalau dulu masyarakat bertanya soal jalan rusak, sekolah rusak, atau irigasi rusak. Sekarang yang mereka tanyakan bagaimana Bank Nagari, apakah benar hancur karena korupsi. Itu yang harus kami jelaskan kepada masyarakat," ujarnya.

Nofrizon menegaskan dirinya tidak menampik bahwa Bank Nagari memiliki kelemahan dan kekurangan. Karena itu, apabila ada oknum yang terbukti melakukan penyimpangan, ia mendukung agar ditindak tegas.

Bahkan, sebagai komisi yang membidangi pengawasan keuangan daerah dan BUMD, Komisi III DPRD Sumbar akan mendorong manajemen Bank Nagari memberikan seluruh data terkait oknum yang melakukan pelanggaran kepada aparat penegak hukum.

"Lembaga perbankan itu yang diandalkan adalah kepercayaan masyarakat. Dengan berita yang viral ini, jika masyarakat tidak percaya lagi kepada Bank Nagari, mereka bisa beralih ke bank-bank swasta. Kalau itu terjadi Sumbar akan

TAN rugi besar, karena dividen Bank Nagari yang biasanya menyumbang terhadap pendapatan daerah akan menurun," katanya.

Diketahui, Kejati Sumbar saat ini tengah melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi pada penyaluran kredit yang terjadi di sejumlah cabang Bank Nagari, di antaranya Cabang Pembantu Siberut, Cabang Pembantu Ta bek Patah, dan Cabang Pembantu Lubuk Alung.

Dalam hal ini, penyidik tidak menutup kemungkinan akan melakukan pemeriksaan terhadap jajaran Direksi Bank Nagari maupun Kuasa Pemilik Modal terkait pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan. Langkah tersebut dilakukan menyusul maraknya dugaan tindak pidana korupsi di sektor perbankan yang juga sedang ditangani sejumlah kejaksaan di Sumbar.

"Bidang Tindak Pidana Khusus akan terus mengumpulkan alat bukti untuk membuat terang tindak pidana dan menemukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana," katanya.

Asisten Intelijen Kejati Sumbar, Agustinus

Hanung Widyatmaka menyampaikan, pemanggilan ini dilatarbelakangi oleh sejumlah perkara dugaan korupsi sektor perbankan sebelumnya telah ditangani aparat penegak hukum di Sumbar.

"Kasus-kasus tersebut di antaranya melibatkan PT BNI, Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT Bank Mandiri di Pasaman Barat, Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping, serta KUR BRI Unit Balai Selasa," katanya, Rabu (22/7).

Ia menyampaikan, pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh keterangan mengenai peran pengawasan OJK sekaligus memperkuat tata kelola dan sistem pengawasan sektor perbankan.

Kejati Sumbar juga menilai masukan dari OJK diperlukan sebagai bahan evaluasi dalam memperbaiki sistem pengawasan agar praktik penyimpangan di sektor jasa keuangan tidak kembali terjadi.

"Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat pencegahan tindak pidana korupsi pada sektor perbankan, khususnya yang berkaitan dengan penyaluran kredit yang berpotensi merugikan keuangan negara," katanya. (h/len)





SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat	RABU, 29 JULI 2026	2

Ketua DPRD Sumbar Dorong UMKM Naik Kelas

PADANG, HALUAN – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, mengajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga membangun pola pikir sukses melalui pengelolaan keuangan yang baik, peningkatan kompetensi, serta perluasan jejaring usaha.

Pesan tersebut disampaikan Muhidi saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pelaku UMKM di Padang, Selasa (28/7).

Dalam pemaparannya, Muhidi menegaskan bahwa keberhasilan usaha tidak diraih secara instan, melainkan melalui komitmen, kerja keras, serta kedisiplinan dalam mengelola keuangan.

“Literasi finansial bukan hanya soal menghitung uang, tetapi bagaimana mengelola keuangan agar kita bisa meraih kesuksesan. Tujuan hidup harus jelas, ingin sukses di dunia sekaligus sukses di akhirat,” ujarnya.

Menurut Muhidi, pelaku UMKM juga harus membangun jaringan usaha yang luas dan tidak hanya mengandalkan kemampuan pribadi. Kolaborasi, katanya, menjadi salah satu kunci dalam mengembangkan usaha.

“Jangan hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri. Bangun jaringan, cari mitra, dan terus belajar. Kesuksesan sering kali lahir dari kolaborasi, bukan bekerja sendirian,” katanya.

Ia mengingatkan, setiap orang akan menghadapi berbagai ujian dalam hidup. Karena itu, pelaku usaha harus memiliki visi dan cita-cita jangka panjang agar tidak mudah menyerah

ketika menghadapi tantangan.

“Orang yang tidak pernah punya cita-cita untuk masa depan, sesungguhnya sedang merencanakan kegagalan di masa depan. Berpikirlah jauh ke depan dan tetap fokus pada tujuan,” tegasnya.

Muhidi juga memaparkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi UMKM di Sumatera Barat, mulai dari terbatasnya akses pembiayaan, rendahnya daya saing dan kualitas produk, lemahnya branding, hingga belum optimalnya pemanfaatan platform digital dan e-commerce.

Menurutnya, perkembangan teknologi harus dimanfaatkan sebagai peluang untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing usaha.

“Di era digital ini, peluang belajar terbuka sangat luas. Manfaatkan teknologi, ikuti pelatihan, dan terus tingkatkan kompetensi agar usaha mampu bersaing,” ungkapnya.

Selain itu, Muhidi menekankan pentingnya disiplin dalam mengelola pendapatan dengan membiasakan menabung, berinvestasi, serta menyiapkan dana untuk kebutuhan kesehatan dan pendidikan.

“Masalah keuangan sering muncul karena kita tidak punya komitmen. Sisihkan pendapatan untuk tabungan, investasi, kesehatan, dan pendidikan. Dahulukan kebutuhan yang wajib, baru kelola sisanya dengan bijak,” katanya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergoda berutang tanpa perencanaan yang matang.

“Kalau tidak benar-benar terpaksa, jangan berutang. Kecuali untuk pengembangan usaha yang sudah diperhitungkan dengan matang dan memiliki kemampuan membayar dari hasil usaha itu sendiri,” pesannya.

Muhidi menambahkan, kegagalan dalam berusaha bu-

kanlah akhir dari perjalanan. Pelaku UMKM harus terus bangkit, berinovasi, serta tidak bergantung pada satu sumber penghasilan.

“Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Terus berusaha, terus belajar, dan jangan hanya mengandalkan satu jenis usaha. Jika satu belum berhasil, masih ada peluang lain yang bisa dikembangkan,” tuturnya.

Sementara itu, salah seorang peserta Bimtek, Jerusalem, yang juga Ketua KUBE UMKM Sejahtera, mengapresiasi inisiatif Ketua DPRD Sumbar menyelenggarakan pelatihan tersebut. Menurutnya, kegiatan itu menja-

di penyemangat sekaligus menambah wawasan pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha. “Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Ketua DPRD Sumbar yang telah menginisiasi kegiatan ini. Materi yang diberikan sangat membuka wawasan kami dalam mengelola usaha agar lebih berkembang dan berdaya saing,” ujarnya.

Hal senada disampaikan peserta lainnya, Zufrizal, yang akrab disapa Ucok. Ia mengaku memperoleh banyak pengetahuan baru yang dapat diterapkan dalam mengembangkan usahanya.

“Kegiatan ini sangat bermanfaat. Kami tidak hanya belajar mengelola usaha dan keuangan, tetapi juga mendapatkan motivasi untuk terus berkembang,” katanya.

Ucok yang menjalankan usaha jual beli barang bekas mengaku ingin segera mengurus legalitas usahanya agar dapat berkembang lebih besar. (h/len)



Ketua DPRD Sumbar, Muhidi saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pelaku UMKM di Padang, Selasa (28/7). IST

**BREAKING
NEWS!**



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	RABU, 29 JULI 2026 /	2

PERUBAHAN KUA-PPAS 2026 MULAI DIBAHAS

DPRD Sumbar Dorong Penyesuaian Kebijakan APBD

PADANG, HALUAN – DPRD Sumbar mulai membahas Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2026 ini ditandai dengan diserahkannya pengantar Perubahan KUA-PPAS 2026 oleh Pemprov Sumbar kepada DPRD dalam rapat paripurna yang digelar, Senin (28/7).

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Iqra Chissa saat memimpin rapat paripurna tersebut menegaskan, pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 menjadi momentum untuk menyesuaikan kembali arah kebijakan fiskal daerah dengan kondisi aktual.

Menurut Iqra, perubahan struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang diusulkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengharuskan adanya reposisi terhadap sejumlah kebijakan dan target yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

“Melihat dari konstruksi target pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang diusulkan dalam Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2026, kita perlu meresposi kembali beberapa kebijakan dan target-target yang sudah ditetapkan pada Perda APBD Tahun 2026,” ujar Iqra.

Ia mengatakan, penyesuaian tersebut diperlukan agar pelaksanaan APBD tetap selaras dengan perkembangan kebutuhan pembangunan dan dinamika fiskal yang terjadi sepanjang tahun anggaran berjalan.

Iqra menambahkan, setelah penyampaian pengantar Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026 oleh pemerintah daerah, DPRD bersama pemerintah provinsi akan segera

memasuki tahapan pembahasan secara mendalam.

Pembahasan tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy dalam kesempatan itu, mengatakan total belanja daerah diusulkan meningkat dari Rp6,40 triliun menjadi Rp7,08 triliun, atau bertambah sekitar Rp671,23 miliar.

“Kenaikan belanja difokuskan untuk memperkuat pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta mendukung program-program prioritas yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujar Vasko dalam rapat paripurna DPRD Sumbar, Senin (27/7).

Salah satu komponen yang mengalami peningkatan paling besar adalah belanja modal. Nilainya naik dari Rp471,12 miliar menjadi Rp952,06 miliar, atau lebih dari dua kali lipat dibanding alokasi sebelumnya. Selain itu, pemerintah daerah juga mengusulkan penambahan belanja tidak terduga guna memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana dan keadaan darurat.

Di sisi pendapatan, Pemprov Sumbar memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp6,27 triliun, sedikit lebih rendah dibanding target awal karena penyesuaian proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, penurunan tersebut diperkirakan dapat ditutup melalui peningkatan dana transfer dari pemerintah pusat yang naik sekitar Rp540,23 miliar menjadi Rp3,29 triliun. (h/len)

NEWS

BREAKING
NEWS!



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Rakyat Sumbar KAMIS, 30 JULI 2026		7

Pungut Pajak Air Permukaan Secara Serius

Padang, Rakyat Sumbar — Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman mengatakan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak air permukaan sangat besar. Namun, realisasinya masih belum sesuai harapan.

"Oleh sebab itu, kami mendesak pemerintah provinsi supaya serius melaksanakan tugas pemungutan pajak air permukaan (PAP), terutama yang dimanfaatkan oleh perusahaan perkebunan," kata Evi, Rabu, (29/7).

Ia melanjutkan, pembahasan dan kesepakatan antara DPRD dan pemerintah provinsi terhadap objek PAP sudah dilakukan sejak awal tahun 2025.

"Namun, hingga akhir Juli 2026 ini, realisasi kinerjanya sangat mengecewakan, padahal semua proses sudah dijalani dan tidak ada masalah, tinggal eksekusi atau pelaksanaan oleh dinas terkait," sebutnya.

Menurut Evi, apabila potensi PAD dari sektor PAP perkebunan bisa terlaksana optimal, maka akan bisa menutupi kesenjangan kapasitas fiskal daerah untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan.

"Aturan hukumnya jelas. Peraturan Gubernur tentang Nilai Perolehan Air Permukaan pun sudah ada yakni Pergub nomor 13 tahun

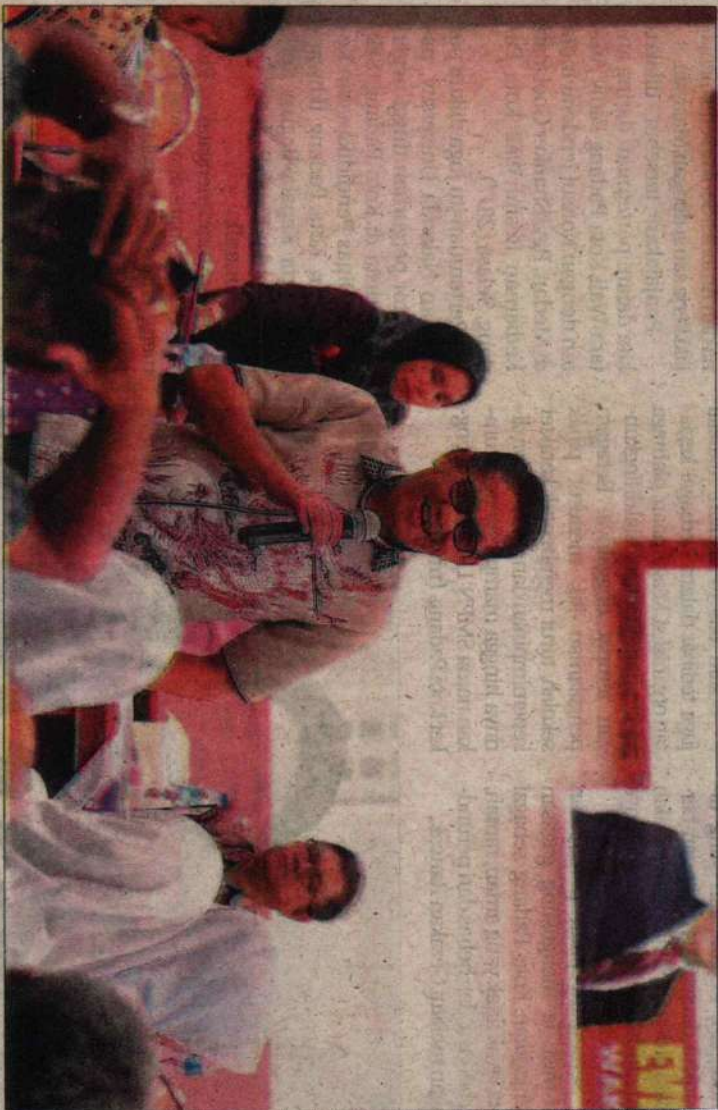


FOTO : KOMINFO

WAKIL Ketua DPRD Provinsi Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman.

2023," ungkap Evi. Evi Yandri menyebutkan, potensi PAP yang menjadi hak daerah ini cukup besar, nilainya bisa ratusan miliar setiap tahun.

"Berdasarkan data komoditas perusahaan kelapa sawit di Sumbar pada tahun 2025 saja luasnya mencapai 215 ribu hektar dan berdasar-

kan data BPS tahun 2024 produksi crude palm oil (CPO) mencapai 699,39 ribu ton," ulasnya.

Ia mengatakan, DPRD akan meminta laporan secara berkala dari Bapenda, Dinas ESDM dan Dinas Perkebunan terhadap progres realisasi pemungutan PAP dan kendala yang dihadapi, serta pen-

egakan hukum bagi pelanggaran pajak daerah.

"DPRD bersama Pemprov sudah melakukan koordinasi dan sosialisasi hingga kabupaten yang memiliki perkebunan sawit termasuk dengan gabungan pengusaha kelapa sawit di Sumbar serta lintas instansi vertikal," tutupnya. (byr/rel)

NEWS

BREAKING
NEWS



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	KAMIS, 30 JULI 2026	8

Ketua DPRD Sumbar Dorong UMKM Kua sai Teknologi Digital

PADANG, HALUAN — Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi, mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar terus meningkatkan kapasitas serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital guna memperkuat daya saing usaha.

Hal itu disampaikan Muhidi saat membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas UMKM bertema Peran DPRD Sumbar dalam Pengelolaan dan Pengembangan UMKM, Senin (27/7).

Menurut Muhidi, langkah terpenting dalam membangun usaha adalah memiliki pola pikir yang tepat dan keberanian untuk memulai. Ia mengingatkan pelaku usaha agar tidak menunggu semua fasilitas atau

modal tersedia sebelum memulai bisnis.

“Berusaha itu yang paling utama adalah mindset. Mulailah usaha dan jangan menunggu semuanya lengkap. Dengan memulai, kita akan mengetahui apa saja kebutuhan, kelemahan, dan skala prioritas yang harus dibenahi,” ujar Muhidi.

Ia menambahkan, setelah usaha berjalan, pelaku UMKM harus tetap fokus mengembangkan bisnisnya serta men-

junjung tinggi kejujuran sebagai fondasi membangun kepercayaan konsumen.

Dalam kesempatan tersebut, Muhidi juga menegaskan komitmen DPRD Sumbar dalam mendukung peningkatan kompetensi pelaku UMKM, termasuk memperluas jejaring usaha dan akses pemasaran.

Hingga akhir Juli 2026, program Peningkatan Kapasitas UMKM telah dilaksanakan sebanyak 13 angkatan dari total 19 angkatan yang direncanakan sepanjang tahun ini.

Muhidi menilai transformasi digital menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Perubahan pola konsumsi masyarakat yang kini semakin bergantung pada media sosial dan platform digital harus dijawab dengan inovasi dan strategi pemasaran yang relevan.

“Sekarang menjalankan bisnis tidak harus memiliki toko yang besar. Produk bisa dipasarkan melalui platform digital maupun media sosial sehingga jangkauan pasarnya lebih luas. Jangan hanya menunggu peluang datang, tetapi ciptakan peluang dengan memanfaatkan teknologi,” katanya.

Ia bahkan mendorong pelaku UMKM untuk mulai memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi, termasuk menjadi kreator konten yang mampu memperkenalkan produk kepada masyarakat.

Selain pemasaran, Muhidi menekankan pentingnya peningkatan kualitas produk, kemasan, dan penyajian agar mampu bersaing di tengah pasar yang semakin kompetitif.

“Kualitas, kemasan, dan penyajian menjadi faktor penting. Untuk menghasilkan pro-

duk yang baik, pelaku usaha harus memiliki literasi membaca dan literasi digital. Kalau hanya mengandalkan kemampuan apa adanya, hasilnya juga akan apa adanya. Karena itu, kita harus kreatif, inovatif, dan terus belajar mengikuti perkembangan zaman,” ujarnya.

Muhidi menegaskan, perkembangan teknologi merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Karena itu, pelaku UMKM harus memiliki kemampuan beradaptasi dengan cepat agar usaha tetap bertahan dan berkembang.

“Yang harus disiapkan bukan menolak perubahan, tetapi kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar,” tegasnya.

Ia juga menyoroti perubahan perilaku konsumen yang kini lebih banyak mencari informasi melalui media sosial





SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

sebelum memutuskan membeli suatu produk.

“Sekarang orang mencari informasi melalui telepon genggam. Setelah melihat konten yang menarik, mereka datang untuk membeli atau mencicipi produk. Karena itu, pelaku UMKM tidak bisa lagi pasif. Kita harus bergerak mengikuti perkembangan agar

tidak tertinggal,” katanya.

Melalui kegiatan tersebut, Muhidi berharap pelaku UMKM di Sumatera Barat semakin siap memanfaatkan transformasi digital untuk memperluas pasar, meningkatkan daya saing, sekaligus memperkuat perekonomian daerah di tengah persaingan usaha yang semakin ketat. (*)



KETUA DPRD Sumbar, Muhidi



KEGIATAN Peningkatan Kapasitas UMKM bertema Peran DPRD Sumbar dalam Pengelolaan dan Pengembangan UMKM yang diinisiasi Ketua DPRD Sumbar, Muhidi



PESERTA kegiatan



KETUA DPRD Sumbar, Muhidi saat membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas UMKM bertema Peran DPRD Sumbar dalam Pengelolaan dan Pengembangan UMKM

NG
NEWS!
126



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Kamis, 30 Juli 2026 (15 Syafar 1448 H)	2

DPRD Desak Pemprov Sumbar Serius
Pungut Pajak Air Permukaan

PADANG - DPRD Sumatra Barat (Sumbar) mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk serius dan sungguh-sungguh memungut Pajak Air Permukaan (PAP), terutama yang dimanfaatkan oleh perusahaan perkebunan di Sumbar.

Hal itu ditegaskan Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Bu diman, kepada wartawan di Gedung DPRD Sumbar, Rabu (29/7).

"Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak air permukaan atas pengelolaan dan pemanfaatan air permukaan oleh usaha perkebunan di Sumbar sangat besar. Namun, realisasinya masih jauh dari harapan," ujarnya.

Evi Yandri mengaku kecewa atas kinerja Bapenda. Sebab, potensi PAD dari sektor PAP perkebunan ini, jika dioptimalkan, mampu menutupi kesenjangan kapasitas fiskal daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan.

Ia menjelaskan bahwa pembahasan dan kesepakatan antara DPRD dan Pemprov Sumbar terkait objek PAP sudah dilakukan sejak awal 2025. "Kita sudah bahas dan sepakati, bahkan dengan melibatkan lintas instansi. Baik secara hukum dan regulasi, sistem dan mekanisme pemungutan, hingga sosialisasi dengan pelaku usaha perkebunan di Sumatra Barat sudah dilaksanakan. Semua proses sudah kita jalani dan tidak ada masalah, tinggal eksekusi oleh dinas terkait. Namun, hingga akhir Juli 2026 ini, realisasi kinerjanya sangat mengecewakan," tuturnya.

Untuk itu, pihak legislatif mendesak Pemprov serius menjalankan amanah konstitusi terkait PAP tersebut. "Aturan hukumnya jelas. Peraturan Gubernur tentang Nilai Perolehan Air Permukaan pun sudah ada, yakni Pergub Nomor 13 Tahun 2023," tegas Evi Yandri.

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemprov memiliki kewenangan lebih luas dalam mengelola pajak dan retribusi daerah sebagai sumber PAD. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga menetapkan PAP sebagai objek pajak daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Sekretaris DPD Gerindra Sumbar ini menambahkan bahwa Kementerian Keuangan melalui surat Dirjen Perimbangan Keuangan Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor S-109/PK.5/2026 tertanggal 18 Juni 2026 menegaskan pemungutan pajak daerah dapat dilakukan sepanjang terdapat dasar hukum serta memenuhi syarat objektif dan subjektif.

Berdasarkan surat tersebut, khusus PAP untuk usaha perkebunan kelapa sawit, terdapat empat areal pemanfaatan air permukaan yang menjadi objek pajak. Keempatnya meliputi pabrik pengolahan kelapa sawit, pembibitan kelapa sawit, dan sarana penunjang operasional perkebunan kelapa sawit.

Selanjutnya, saluran pada perkebunan kelapa sawit yang berfungsi menurunkan atau menampung air permukaan sekaligus menyediakan ruang perakaran untuk mendukung pertumbuhan kelapa sawit juga termasuk objek PAP. Hal itu berlaku jika airnya berasal dari mata air, sungai, danau di sekitar perkebunan, maupun air hujan.

Potensi PAD

Evi Yandri memaparkan bahwa potensi PAP yang menjadi hak daerah ini cukup besar dan nilainya bisa mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahun. Berdasarkan data komoditas perusahaan kelapa sawit di Sumbar pada 2025 saja, luas lahan mencapai 215 ribu hektare. Sementara itu, data BPS tahun 2024 menunjukkan produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) mencapai 699,39 ribu ton.

Melihat potensi tersebut, ia mendesak Bapenda untuk melaksanakan tugas dengan baik, serius, serta penuh tanggung jawab guna mengoptimalkan pemungutan PAP.

"DPRD bersama Pemprov sudah melakukan koordinasi dan sosialisasi hingga ke tingkat kabupaten yang memiliki perkebunan sawit, termasuk dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) di Sumbar serta lintas instansi vertikal," tambahnya.

DPRD, lanjutnya, akan meminta laporan berkala dari Bapenda, Dinas ESDM, dan Dinas Perkebunan mengenai progres realisasi pemungutan PAP, kendala yang dihadapi, hingga penegakan hukum bagi pelanggar pajak daerah. (401)

BREAKING
NEWS!



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Kamis, 30 Juli 2026 (15 Syafar 1448 H)	9

Ketua DPRD Sumbar Tegaskan Pentingnya Perda Trantibum

PADANG - SINGGALANG

Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi, menegaskan bahwa setiap kehidupan bermasyarakat memerlukan regulasi yang jelas untuk menjamin kenyamanan bersama.

Salah satu fokus utama pemerintah saat ini adalah penerapan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas).

"Perda ini dirancang sebagai payung hukum untuk menjamin kenyamanan publik di seluruh wilayah Sumatera Barat. Salah satu poin penting yang diatur adalah ketertiban jalan, yang bertujuan melindungi hak-hak setiap warga negara," ujar Muhidi saat menghadiri kegiatan sosialisasi perda tersebut baru-baru ini.

Pernyataan tersebut mendapat sambutan positif dari organisasi perempuan adat Minangkabau. Bundo Kandung Kecamatan Padang Selatan menyatakan kesiapannya untuk menjadi penggerak utama dalam membangun budaya tertib di tengah masyarakat, serta berkomitmen mendukung penuh implementasi perda tersebut.

Ketua Bundo Kandung Kecamatan Padang Selatan, Etris Trianai, menilai bahwa edukasi mengenai regulasi ini memang sangat mendesak. Menurutnya, masih banyak warga yang belum memahami secara utuh mengenai hak dan kewajibannya dalam kehidupan ber-

masyarakat.

"Kami mendukung penuh Perda Nomor 5 Tahun 2020. Sosialisasi seperti ini sangat krusial agar pemahaman masyarakat terhadap isi aturan dapat terus diperkuat," kata Etris.

Secara khusus, Etris menyoroti salah satu persoalan klasik yang kerap memicu konflik sosial di lapangan, yaitu penggunaan bahu jalan untuk kepentingan pribadi seperti pesta pernikahan atau kegiatan adat. Ia menilai, meski tradisi kebersamaan harus tetap dijaga, pelaksanaannya tidak boleh mengorbankan kepentingan publik yang lebih luas.

"Aktivitas masyarakat tentu harus dihormati, tetapi jangan sampai mengganggu hak pengguna jalan lain. Semua pihak harus saling menghargai agar kenyamanan bersama tetap terjaga," tambahnya.

Sebagai lembaga yang dekat dengan akar rumput, Bundo Kandung siap mengambil peran aktif untuk menyosialisasikan aturan ini secara persuasif demi mewujudkan lingkungan yang harmonis.

Sementara itu, Camat Padang Selatan, Wilman Mukhtar, turut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk proaktif mengawal penegakan perda ini di lingkungan masing-masing.

Ia menekankan bahwa partisipasi aktif warga adalah kunci utama keberhasilan regulasi tersebut.

"Jika ada potensi gangguan atau persoalan di lapangan, segera komunikasikan dengan pemerintah setempat. Kita harus selalu ingat bahwa dalam ruang publik, ada hak orang lain yang wajib dihormati," tutur Wilman.

Melalui sinergi kuat antara legislatif, eksekutif, dan tokoh adat ini, Pemerintah Kota Padang optimistis kesadaran hukum masyarakat akan meningkat, sehingga budaya tertib dapat melekat menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari. (*)





SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN

AMAN



**BREAKING
NEWS!**

128



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
POSMETRO PADANG	JUMAT, 31 JULI 2026	7

Wakil Ketua DPRD Sumbar Kecam Keras Orgen Tunggal dengan Biduan Erotis di Kuranji

Evi Yandri: Harus Ada Sanksi Adat
PADANG, METRO

Sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) dari daerah pemilihan (Dapil) I Sumbar, yaitu Kota Padang, Evi Yandri Rajo Budiman mengecam keras orgen tunggal yang diiringi artis atau biduan erotis di Rimbo Tarok, Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji, Kenagarian Pauh IX Kota Padang.

Diperparah lagi rekaman video kejadian tersebut telah viral di media sosial dan menyedot perhatian publik dengan beragam komentar yang membuat citra buruk atau negatif, tidak hanya bagi Rimbo Tarok dan Nagari Pauh IX, tetapi juga Kota Padang serta Sumatera Barat.

"Sebagai Wakil Ketua DPRD Sumbar dan anak nagari, saya mengecam keras kejadian ini. Tak cukup hanya permintaan maaf pelaku," pungkas Evi Yandri melalui panggilan WhatsApp kepada awak media, Kamis (30/7).

Evi Yandri mengatakan, ini adalah peringatan keras dan terakhir kepada pelaku tarian erotis dan pemilik orgen tunggal tersebut agar tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan di Kuranji, Kota Padang dan Sumbar.

"Karena ini sudah masuk ranah pidana, yaitu tarian erotis, termasuk pornografi dan pornoaksi yang bisa diancam hukuman penjara 10 tahun. Maka ini adalah peringatan terakhir, sebab kami sebagai anak nagari bisa menempuh jalur hukum,"

tegas Ketua FKAN Pauh IX ini.

Tak hanya itu, Evi Yandri juga menegaskan, pelaku dan pemilik orgen telah melanggar adat dan budaya yang ada di nagari Pauh IX. Tak hanya sebatas melanggar norma susila, dan etika.

"Saya sarankan Ketua KAN memperkarakan ini secara adat dengan mengundang ninik mamak tapi-an dan bajiniah adat. Pelaku dan pemilik orgen harus dipanggil ke kantor KAN beserta ninik mamaknya. Harus ada sanksi adat," cakap Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumbar tersebut.

Evi Yandri juga mengapresiasi langkah cepat Camat, Kapolsek, Satpol dan Lurah Kuranji yang telah memanggil yang bersangkutan dan pemilik orgen sudah minta maaf.

"Tapi sekali lagi, tak cukup minta maaf, Nagari Pauh IX, nagari kami ini dikenal dengan adatnya yang kental, harus ada sanksi adat. Harus disidangkan di KAN," kata anak buah Prabowo ini.

Sebelumnya, pemilik orgen tunggal JMD Music yang bernama Putra diketahui telah dipanggil camat dan minta maaf atas kejadian di perayaan ulang tahunnya tersebut. (*)



MENGECAM— Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman mengeluarkan pernyataan terkait viralnya orgen tunggal dengan biduan erotis di Kuranji.

BREAKING
NEWS



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat	JUMAT, 31 JULI 2026	2

ATASI KETERBATASAN FISIOTERAPIS

Rafdinal Bekali Orang Tua Anak Cerebral Palsy Terapi Mandiri

BUKITTINGGI, HALUAN- Puluhan orang tua yang mendampingi anak penyandang Cerebral Palsy (CP) di Sumatera Barat (Sumbar) mengikuti pelatihan terapi selama tiga hari, 29–31 Juli 2026. Melalui pelatihan tersebut, para orang tua diharapkan mampu melakukan terapi secara mandiri di rumah, mengingat masih terbatasnya jumlah fisioterapis di Sumbar.

Pelatihan bertajuk Bimbingan Teknis Terapis bagi Orang Tua Pendamping dan Anak Penyandang Disabilitas Anak Berkebutuhan Khusus

(ABK) Angkatan II itu diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Sumatera Barat melalui dana Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Anggota Komisi III DPRD Sumbar, Rafdinal.

Kegiatan tersebut juga bekerja sama dengan Yayasan Rumah Gadang Cerebral Palsy (Raga CP) dan digelar di salah satu hotel di Bukittinggi.

Rafdinal mengatakan, pelatihan tersebut merupakan program yang dilaksanakan setiap

tahun. Sepanjang 2026, kegiatan telah digelar dalam dua angkatan dengan jumlah peserta masing-masing 58 orang tua pendamping, sehingga total mencapai 116 peserta.

"Anak penyandang Cerebral Palsy membutuhkan fisioterapi secara berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya jumlah fisioterapis di Sumatera Barat masih sangat terbatas. Karena itu, peran orang tua dan pendamping menjadi sangat penting untuk menunjang perkembangan anak," ujar Rafdinal saat pembukaan kegiatan, Rabu malam (29/7).

Ia menjelaskan, untuk mengatasi keterbatasan tenaga fisioterapis, pelaksanaan bimtek angkatan kedua turut melibatkan akademisi dan mahasiswa Universitas Fort De Kock Bukittinggi sebagai peserta.

Menurut Rafdinal, tantangan lain yang dihadapi pemerintah daerah adalah belum terdapatnya data yang akurat mengenai jumlah penyandang Cerebral Palsy di Sumatera Barat. Padahal, jumlah penyandang CP diperkirakan cukup banyak.

Karena itu, pihaknya bekerja sama dengan Yayasan Rumah Gadang Cerebral Palsy (Raga CP) untuk mendata sekaligus menghimpun para orang tua pendamping penyandang CP agar dapat mengikuti berbagai kegiatan pembinaan, termasuk pelatihan terapi mandiri yang

dapat diterapkan di rumah.

"Dengan pelatihan ini, kami berharap orang tua tidak hanya bergantung pada layanan fisioterapi di fasilitas kesehatan, tetapi juga mampu memberikan terapi dasar secara mandiri di rumah untuk mendukung tumbuh kembang anak penyandang Cerebral Palsy," tutup Rafdinal.

Pembukaan pelatihan itu juga dihadiri Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis. Ia mengapresiasi kepedulian Anggota Komisi III DPRD Sumbar, H. Rafdinal, yang secara konsisten memperjuangkan program pemberdayaan bagi keluarga penyandang disabilitas.

Menurutnya, pelatihan tersebut menjadi langkah konkret untuk meningkatkan kapasitas orang tua dalam mendampingi tumbuh kembang anak penyan-

dang Cerebral Palsy di tengah keterbatasan tenaga fisioterapis.

Sementara itu Kabid PHPA-DP3AP2KB, Desra Elena mengatakan Bimtek angkatan ke dua ini diikuti oleh peserta dari Kota Bukittinggi, Padang, Payakumbuh, Sawahlunto, serta sejumlah daerah lainnya di Sumatera Barat.

Melalui bimbingan teknis ini, kami mengajarkan orang tua agar mampu melakukan terapi secara mandiri di rumah. Ini sangat penting karena keterampilan yang diperoleh selama pelatihan dapat langsung dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari," jelas Desra.

Menurutnya, kemampuan orang tua melakukan terapi mandiri akan sangat membantu ketika anak tidak dapat menjalani terapi di fasilitas kesehatan secara rutin. (h/len)

NEWS

BREAKING
NEWS!



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	JUMAT, 31 JULI 2026	2

RAIH GELAR DOKTOR DI UNAND

Zulkenedi Said Kaji Difusi Kebijakan Pena nganan Covid-19

PADANG, HALUAN - Wakil Ketua Bapem-perda DPRD Sumbar, Zulkenedi Said, resmi menyandang gelar doktor bidang ilmu sosial dan ilmu politik dari Universitas Andalas (Unand). Gelar tersebut diraih usai menjalani Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor) di Kampus Unand Jati, Kota Padang, Kamis (30/7).

Dalam ujian tersebut, politisi Golkar berusia 62 tahun ini dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan. Ia mempertahankan disertasi berjudul "Difusi Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 di Sumatera Barat: Studi Kasus Pem-

bentukan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19".

Ujian dipimpin oleh Dekan FISIP Unand Jendrius selaku ketua tim penguji, didampingi

Prof. Asrinaldi bersama tim promotor, ko-promotor, serta penguji eksternal. Di hadapan penguji, Zulkenedi memaparkan bahwa Perda Nomor 6 Tahun 2020 merupakan regulasi tercepat yang pernah disahkan oleh DPRD Sumbar.

"Perda ini disusun hanya dalam waktu 9 hari kerja. Biasanya, penyusunan perda menghabiskan waktu paling cepat enam bulan," ujar Zulkenedi.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Sumbar melakukan lompatan kebijakan dengan mengubah regulasi lunak menjadi peraturan tegas berbentuk

perda. Langkah crisis-driven ini diambil karena situasi darurat pandemi menuntut payung hukum kuat untuk melegitimasi sanksi administratif hingga pidana kurungan, yang tidak diakomodasi dalam Peraturan Gubernur sebelumnya.

Melalui penelitiannya, Zulkenedi berhasil mengembangkan model baru dalam teori difusi kebijakan pada konteks krisis dan desentralisasi. Hasil studi menunjukkan bahwa dalam kondisi darurat, pembentukan perda dapat dilakukan secara fleksibel tanpa terikat birokrasi yang kaku.

Akselerasi ini terwujud

berkat komitmen DPRD Sumbar sebagai formulator yang berkoordinasi intensif dengan Pemerintah Pusat, Forkopimda, serta tokoh masyarakat Tungku Tigo Sajaringan (Ninik Mamak, Alim Ulama, dan Cerdik Pandai). Kolaborasi para aktor tersebut berhasil menyelaraskan kepentingan politik lokal dan teknis hukum dalam waktu singkat.

Zulkenedi menambahkan, difusi kebijakan Perda Nomor 6 Tahun 2020 memberikan kepastian hukum dan standarisasi penanganan Covid-19 di seluruh Sumbar. Regulasi ini menjadi dasar bagi aparat untuk

mendisiplinkan warga serta menyatukan gerak pemerintah kabupaten/kota dalam satu komando. Dalam jangka panjang, perda ini juga bermanfaat mengubah paradigma hidup sehat masyarakat.

Sebagai rekomendasi, ia menyarankan Pemprov Sumbar menyusun Panduan Legislasi Akseleratif untuk menetapkan alur koordinasi baku dengan pusat saat kondisi darurat. Hal ini penting agar proses legislasi cepat tetap menjamin kualitas harmonisasi hukum yang kuat dan sesuai dengan kebutuhan spesifik lokal. (h/len)

NEWS

BREAKING
NEWS!

132



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

RAIH GELAR — Wakil Ketua Bapemperda DPRD Sumbar, Zulkenedi Said bersama tim penguji dan tim promotor usai menjalani Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor) di Kampus Unand Jati, Kota Padang.



**BREAKING
NEWS!**

133



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Jumat, 31 Juli 2026 (16 Syafar 1448 H)	5

Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri
Kecam Orgen Tunggal Artis Erotis di Kuranji



Evi Yandri

Padang, Singgalang
Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Evi Yandri Rajo Budiman, mengancam keras pertunjukan orgen tunggal yang menampilkan biduan erotis di Rimbo Tarok, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Rekaman video kejadian tersebut viral di media sosial dan memicu sentimen negatif publik terhadap citra daerah setempat.

"Sebagai Wakil Ketua DPRD Sumbar dan anak nagari, saya mengancam keras kejadian ini. Tidak cukup hanya permintaan maaf dari pelaku," ujar Evi Yandri, Rabu (29/7).

La mengancam pertunjukan tersebut menjadi peringatan keras dan terakhir bagi pelaku maupun pemilik orgen tunggal agar tidak mengulangi perbuatanya. Menurutnya, tindakan tersebut telah memasuki ranah hukum.

"Karena ini sudah masuk ranah pidana, yaitu tarikan erotis yang termasuk porno-grafi dan pornoaksi dengan ancaman hukuman penjara hingga 10 tahun. Jika terulang, kami sebagai anak nagari akan menempuh jalur hukum," kata Ketua Forum Komunikasi Anak Nagari (FKAN) Pauh IX tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, tindakan mempertontonkan diri atau orang lain di muka umum yang bermuatan pornografi dapat diancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar.

Selain hukum pidana, Evi Yandri menilai perbuatan tersebut melanggar norma susila, etika, serta adat Nagari Pauh IX. Ia mendorong Kerapatan Adat Nagari (KAN) untuk menjatuhkan sanksi adat.

"Saya menyarankan Ketua KAN memperkarakan ini secara adat dengan mengundang ninik mamak. Pelaku dan pemilik orgen harus dipanggil ke kantor KAN bersama ninik mamak mereka," tutur Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumbar tersebut.

Evi Yandri mengapresiasi langkah cepat camat, kapolsek, lurah, dan Satpol PP Kuranji yang telah memanggil pihak terkait. Meski pemilik orgen tunggal JMD Music bernama Putra dilaporkan sudah meminta maaf, ia menegaskan proses adat harus tetap berjalan.

"Nagari Pauh IX dikenal dengan adanya yang kental. Jadi tidak cukup hanya meminta maaf, harus ada sanksi adat dan disidangkan di KAN," ucapnya. (401)

BREAKING NEWS!



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Jumat, 31 Juli 2026 (16 Syafar 1448 H)	5

LULUS UJIAN TERBUKA DI UNAND

Zulkenedi Said Raih Gelar Doktor Bidang Sospo

Padang, Singgalang

Wakil Ketua Bapemperda DPRD Sumbar, Zulkenedi Said, resmi menyandang gelar doktor bidang ilmu sosial dan ilmu politik dari Universitas Andalas (Unand). Gelar tersebut diraih usai menjalani Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor) di Kampus Unand Jati, Kota Padang, Kamis (30/7).

Dalam ujian tersebut, politisi Golkar berusia 62 tahun ini dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan. Ia memper-tahankan disertasi berjudul "Difusi Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 di Sumatera Barat: Studi Kasus Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19".

Ujian dipimpin oleh Dekan FISIP Unand Jendrius selaku ketua tim penguji, didampingi Prof. Asrinaldi bersama tim promotor, ko-promotor, serta

penguji eksternal. Di hadapan penguji, Zulkenedi memaparkan bahwa Perda Nomor 6 Tahun 2020 merupakan regulasi tercepat yang pernah disahkan oleh DPRD Sumbar.

"Perda ini disusun hanya dalam waktu 9 hari kerja. Biasanya, penyusunan perda menghabiskan waktu paling cepat enam bulan," ujar Zulkenedi.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Sumbar melakukan lompatan kebijakan dengan mengubah regulasi lunak menjadi peraturan tegas berbentuk perda. Langkah crisis-driven ini diambil karena situasi darurat pandemi menuntut payung hukum kuat untuk melegitimasi sanksi administratif hingga pidana kurungan, yang tidak diakomodasi dalam Peraturan Gubernur sebelumnya.

Melalui penelitiannya, Zulkenedi berhasil mengembangkan model baru dalam teori difusi kebijakan pada konteks krisis dan desentralisasi. Hasil studi menunjukkan bahwa dalam kondisi darurat, pembentukan perda dapat dilakukan secara fleksibel tanpa terikat birokrasi yang kaku.

Akselerasi ini terwujud berkat komitmen DPRD Sumbar sebagai formulator yang berkoordinasi intensif dengan

dalam waktu singkat.

Zulkenedi menambahkan, difusi kebijakan Perda Nomor 6 Tahun 2020 memberikan kepastian hukum dan standarisasi penanganan Covid-19 di seluruh Sumbar. Regulasi ini menjadi dasar bagi aparat untuk mendisiplinkan warga serta menyatukan gerak pemerintah kabupaten/kota dalam satu komando. Dalam jangka panjang, perda ini juga bermanfaat mengubah paradigma hidup sehat masyarakat.

Sebagai rekomendasi, ia menyarankan Pemprov Sumbar menyusun Panduan Legislasi Akseleratif untuk menetapkan alur koordinasi baku dengan pusat saat kondisi darurat. Hal ini penting agar proses legislasi cepat tetap menjamin kualitas harmonisasi hukum yang kuat dan sesuai dengan kebutuhan spesifik lokal. (401)

Pemerintah Pusat, Forkopimda, serta tokoh masyarakat Tungku Tigo Sajarangan (Ninik Mamak, Alim Ulama, dan Cerdik Pandai). Kolaborasi para aktor tersebut berhasil menyelaraskan kepentingan politik lokal dan teknis hukum



UJIAN TERBUKA - Wakil Ketua Bapemperda DPRD Sumbar, Zulkenedi Said saat ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor) di Kampus Unand Jati, Kota Padang, Kamis (30/7). (1st)

AKING
NEWS!



KLIPING KORAN



Jl. Khatib Sulaiman No.87 Padang Telp. (0751) 7057391 - 705753
Fax. (0751) 7059328 Padang 25133, Sumatera Barat